



PEMERINTAH PROVINSI
Nusa Tenggara Barat



Blue Print

NTB

Bumi Sejuta Sapi



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya sehingga dapat disusun dokumen Blue Print Nusa Tenggara Barat Bumi Sejuta Sapi (NTB-BSS).

Nusa Tenggara Barat secara historis telah lama dikenal sebagai gudang ternak dan pengeksport sapi ke daerah-daerah lain di Indonesia dan luar negeri. Sampai dengan sekarang inipun NTB masih memiliki potensi pengembangan sapi yang besar, didukung oleh sumberdaya lahan, sumberdaya ternak, dan sosial budaya masyarakat.

Program NTB BSS merupakan suatu gerakan terobosan dalam pengembangan peternakan sapi dengan lebih mengutamakan pemberdayaan sumberdaya lokal dengan tujuan agar sesegera mungkin dapat tercapai populasi sapi optimal sesuai dengan daya dukung wilayah, sehingga peternakan sapi di NTB dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan masyarakat pedesaan, memenuhi kebutuhan daging nasional, dan permintaan bibit sapi bagi daerah-daerah lain. Dengan demikian peternakan sapi dapat menjadi lokomotif penggerak atau pengungkit sektor ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Blue Print NTB BSS ini perlu ditindaklanjuti dan dijabarkan ke dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga semua komponen masyarakat NTB dapat berperan aktif mendukung program NTB BSS dengan sebaik-baiknya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan Blue Print NTB BSS ini diucapkan terima kasih.

Mataram, Pebruari 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



H.M. ZAINUL MAJDI, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR ISTILAH	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Blue Print	3
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Proses Penyusunan Blue Print	4
1.5. Pengguna	5
BAB II. KERANGKA PIKIR NTB BSS	6
2.1. Pengertian	6
2.2. Pendekatan Program	7
2.3. Kerangka Pikir	9
BAB III. KONDISI PETERNAKAN SAPI	11
3.1. Peran strategis peternakan sapi	11
3.2. Sumber daya ternak sapi	12
3.3. Daya dukung wilayah	14
3.4. SDM dan Kelembagaan Peternak	17
3.5. Dukungan sarana dan prasarana	18
3.6. Peluang pasar dan transaksi jual beli.....	19
3.7. Peluang investasi	19
3.8. Pola pengembangan peternakan	22
BAB IV. ANALISIS DINAMIKA PERCEPATAN	25
4.1. Pertumbuhan populasi sapi	25
4.2. Pertumbuhan produksi dan produktivitas sapi	26

4.2.1. Kelahiran pedet	26
4.2.2. Kematian ternak sapi	28
4.2.3. Panen pedet	30
4.2.4. Pemotongan dalam Daerah	31
4.2.5. Pengeluaran Sapi Bibit	33
4.2.6. Pengeluaran Sapi Potong	35
4.3. Dampak Ekonomi Program Percepatan	36
4.3.1. Nilai Ekonomi Sapi yang Dipotong Dalam Daerah	36
4.3.2. Nilai Penjualan Sapi Bibit Keluar Daerah	38
4.3.3. Nilai Pengeluaran Sapi Potong	39
4.3.4. Total Nilai Produksi Sapi di NTB	41
BAB V. KELUARAN YANG INGIN DICAPAI	43
BAB VI. PROGRAM AKSI NTB BSS	44
6.1. Isu Strategis	44
6.2. Kebijakan	44
6.2.1. Peningkatan Populasi, Produksi, dan Produktivitas	44
6.2.2. Tata ruang padang penggembalaan	45
6.2.3. Pemanfaatan Teknologi Pakan, Lahan Basis Pakan, dan Limbah Pertanian/ Industri	45
6.2.4. Penyediaan Daging ASUH	46
6.2.5. Pengembangan SDM dan Kelembagaan	46
6.2.6. Sarana dan Prasarana Peternakan Sapi	46
6.2.7. Investasi Bidang Peternakan	47
6.3. Kegiatan	47
6.4. Sasaran	50
6.5. Pembiayaan	53
BAB VII. ORGANISASI PELAKSANA NTB BSS	55
7.1. Tingkat Pusat	55
7.2. Tingkat Provinsi	55
7.3. Tingkat Kabupaten/Kota	56
7.4. Mekanisme Kerja	57
BAB VIII. PENUTUP	60
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR SINGKATAN

ACIAR	Australian Centre for International Agricultural Research
3S	Satu induk-Satu anak-Satu tahun
APBD I	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat I
APBD II	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat II
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASUH	Aman, Sehat, Utuh, dan Halal
AU	Animal Unit = Satuan Ternak (ST)
Batamas	Biogas Asal Ternak untuk Masyarakat
BPMD	Badan Penanaman Modal Daerah
BPLM	Bantuan Pemerintah Langsung Masyarakat
BPM	Badan Penanaman Modal
BPM-PD	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
BSS	Bumi Sejuta Sapi
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
DAS	Daerah Aliran Sungai
GEMARAMPAK	Gerakan Masyarakat Menanam Rumput Raja secara Serempak
Ha	Hektar
HGU	Hak Guna Usaha
HMT	Hijauan Makanan Ternak
IB	Inseminasi Buatan
JICA	Japan International Cooperation Agency
KK	Kepala Keluarga
KKP-E	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
KTNA	Kontak Tani Nelayan Andalan
KUPS	Kredit Usaha Perbibitan Sapi
MONEV	Monitoring dan Evaluasi
MOU	<i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepakatan)
LM3	Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NTB	Nusa Tenggara Barat
P2SDS	Percerpatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAH	Pangan Asal Hewan
PDRB	Product Domestic Regional Bruto
PHM	Penyakit Hewan Menular
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PUSKESWAN	Pusat Kesehatan Hewan
PTT	Pegawai Tidak Tetap
R & D	Research & Development

RPH	Rumah Potong Hewan
SDM	Sumber Daya Manusia
SMD	Sarjana Membangun Desa
SP3	Skim Pembiayaan Pembangunan Pertanian
Toga	Tokoh Agama
Toma	Tokoh Masyarakat
TP	Tambahan Populasi
UKM	Usaha Kecil Menengah
UPT	Unit Pelaksana Teknis
VBC	Village Breeding Centre

DAFTAR ISTILAH

Akseptor	Ternak betina yang akan di inseminasi buatan
Angka kebuntingan (<i>pregnancy rate</i>)	Persentase jumlah ternak bunting terhadap jumlah ternak betina yang seharusnya dapat bunting dalam waktu setahun
Angka kelahiran (<i>calving rate</i>)	Persentase jumlah anak yang lahir terhadap jumlah induk
Angka kematian (<i>mortality rate</i>)	Persentase jumlah ternak yang mati dalam populasi
<i>Beef Cattle Centre</i>	Pusat Pengkajian dan pengembangan ternak sapi di NTB
Betina produktif	Betina yang masih mampu memproduksi
Bibit ternak	Ternak muda yang akan menjadi calon induk dan/atau pejantan
<i>Bio Security</i>	Sistem keamanan biologis
<i>Culling</i>	Pengeluaram ternak dari populasi karena tidak produktif
Ekstensif	Sistem berternak dengan cara dilepas di dalam padang penggembalaan
<i>Exotic Breed</i>	Peremajaan pejantan unggul
Gasbio (Biogas)	Gas metan yang dihasilkan oleh urine dan feses yang diletakkan di dalam bak tertutup rapat, dapat digunakan sebagai bahan bakar dan penerangan
<i>Grading up</i>	Sistem perbaikan mutu genetik dengan jalan disilangbalikkan dengan bangsa pejantan secara terus-menerus
Inseminasi buatan (<i>Artifisial insemination</i>)	Pemasukan air mani (semen) ke dalam alat kelamin betina (vagina) menggunakan suatu alat dan tidak secara alami
Intensif	Sistem berternak dengan cara dikandangan
Jarak beranak (<i>Calving interval</i>)	Tenggang waktu antara kelahiran sebelum (yang lalu) dengan kelahiran berikutnya
Kematian pedet	Persentase pedet yang mati terhadap jumlah yang terlahir
Laju perkembangbiakan (<i>reproduction rate</i>)	Persentase kelahiran ternak per tahun yang dihitung dari jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah induk yang seharusnya dapat melahirkan dalam kurun waktu satu tahun
<i>Lar/So</i>	Padang Penggembalaan (bahasa Sumbawa/bahasaBima)
Panen Pedet (<i>Calf crop</i>)	Persentase antara jumlah pedet sapihan yang diperoleh dalam keadaan hidup pada umur penyapihan dibanding dengan jumlah induk dalam suatu kelompok ternak atau wilayah tertentu dalam waktu setahun

Pedet	Anak sapi sejak dilahirkan hingga disapih (umur 10 bulan), berasal dari bahasa jawa: <i>pedhet</i>
Pejantan unggul (<i>proven bull</i>)	Pejantan yang telah dibuktikan memiliki keunggulan mutu genetik
Penggemukan (<i>fattening</i>)	Usaha pemeliharaan ternak dengan pakan khusus untuk meningkatkan kecepatan pertambahan bobot badan harian pada kurun waktu tertentu
Penyapihan (<i>weaning</i>)	Tindakan memisahkan anak (pedet) dari induknya agar tidak menyusui lagi
Perkawinan alam (<i>natural mating</i>)	Perkawinan yang terjadi secara kontak langsung antara hewan jantan dengan betina, dengan atau tanpa bantuan manusia
Perkembangbiakan	Proses penangkaran jumlah keturunan anak
Peternak (<i>farmer</i>)	Orang atau badan hukum yang seluruh atau sebagian kegiatannya memanfaatkan ternak demi kepentingan manusia
Peternakan (<i>husbandry</i>)	Segala kegiatan perusahaan untuk mengambil manfaat yang lebih besar dari ternak demi kepentingan manusia
Protein Hewani	Protein yang berasal dari produk hewani dan/atau ikan
Ransum (<i>ration</i>)	Campuran bahan baku pakan yang disusun secara khusus dengan memperhitungkan kebutuhan hidup serta produksinya
<i>Recording</i>	Istilah pencatatan/pendataan ternak
Regulasi	Sistem yang mengatur keserasian proses-proses
Rumah Potong Hewan	Rumah tempat pemotongan ternak secara resmi
Semen beku	Semen (air mani) yang telah mengalami proese pengawetan dan pembekuan (menggunakan nitrogen cair suhu – 196°C)
Semen cair	Semen (air mani) yang telah mengalami proses pengenceran untuk diperbanyak dan diawetkan
Semen segar	Semen (air mani) yang baru ditampung dari ejakulasi dan belum mengalami proses apapun
Siklus birahi (<i>oestrus/estrus cycle</i>)	Waktu antara birahi yang satu dengan birahi berikutnya yang merupakan suatu siklus dalam kehidupan seksual ternak betina
Skim Kredit	Bantuan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah
Ternak (<i>livestock</i>)	Hewan piaraan yang seluruh kehidupannya diatur manusia dan dipelihara secara khusus dan dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sandang, tenaga kerja, pupuk, dan untuk hiburan
Ternak bibit	Mani atau embryo yang dihasilkan melalui seleksi untuk reproduksi dengan tujuan utama untuk produksi tertentu
Zoonosis	Istilah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan/atau sebaliknya

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Prediksi populasi sapi program reguler (tanpa upaya percepatan).....	7
2.2. Perdiksi perkembangan populasi sapi program percepatan.	8
3.1. Perkembangan populasi sapi Tahun 2004- 2008.....	10
3.2. Keunggulan komparatif peternakan sapi Provinsi NTB secara nasional....	11
3.3. Potensi lahan, pakan ternak, daya tampung, terpakai ternak dan peluang pengembangan sapi di NTB	12
3.4. Jumlah kawasan perbibitan sapi rakyat di wilayah NTB Tahun 2008.....	13
3.5. Sarana dan prasarana pelayanan peternakan di NTB Tahun 2008.....	14
3.6. Produksi sapi potong dan sapi bibit dan nilai transaksi pasar.....	14
4.1. Pertumbuhan populasi sapi antara program reguler dan percepatan	15
4.2. Pertumbuhan jumlah kelahiran pedet pada program percepatan dan tanpa program percepatan.....	17
4.3. Jumlah kematian ternak sapi untuk program percepatan dan tanpa program percepatan.....	19
4.4. Jumlah panen pedet antara program percepatan dan program tanpa Percepatan.....	21
4.5. Jumlah pemotongan sapi dalam daerah pada Program Percepatan dan Tanpa Percepatan.....	23
4.6. Jumlah sapi bibit yang dapat dikeluarkan pada Program Percepatan dan Program Tanpa Percepatan (Reguler).....	24
4.7. Pengeluaran sapi potong pada Program Percepatan dan Program Reguler	25
4.8. Nilai Ekonomi Sapi yang Dipotong di Dalam Daerah.....	27
4.9. Nilai penjualan ternak sapi bibit ke luar daerah pada program reguler dan program percepatan.....	28
4.10. Nilai penjualan sapi potong ke luar NTB pada program percepatan dan tanpa percepatan (reguler).....	30
4.11. Nilai produksi sapi di NTB tanpa program percepatan.....	31
4.12. Nilai produksi sapi di NTB dengan program percepatan.....	31
4.13. Perbandingan nilai produksi sapi antara program percepatan & reguler..	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
4.1. Populasi Sapi 2008 - 2018.....	16
4.2. Kelahiran Pedet 2008 - 2018.....	18
4.3. Kematian Ternak Sapi 2008- 2018.....	20
4.4. Panen Pedet 2008-2018.....	22
4.5. Pemotongan Sapi Dalam Daerah.....	23
4.6. Pengeluaran Bibit Sapi 2008-2018.....	25
4.7. Pengeluaran Sapi Potong 2008-2018.....	26
4.8. Nilai sapi yang dipotong.....	27
4.9. Nilai penjualan sapi bibit pada program percepatan dan reguler.....	29
4.10 Nilai penjualan sapi potong.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Rencana Aksi NTB Bumi Sejuta Sapi 2009 - 2013	60
2. Program dan Kegiatan NTB NTB Bumi Sejuta Sapi 2009 - 2013.....	65
3. Analisis Prediksi Perkembangan Populasi dan Produktivitas sapi Tahun 2009 – 2013	68
4. Rencana Pembiayaan NTB BSS Tahun 2009	69
5. Rencana Pembiayaan NTB BSS Tahun 2010	72
6. Rencana Pembiayaan NTB BSS Tahun 2011	76
7. Rencana Pembiayaan NTB BSS Tahun 2012	80
8. Rencana Pembiayaan NTB BSS Tahun 2013	83
9. Rekapitulasi Pembiayaan NTB BSS Tahun 2009-2013	86
10. Potensi Padang Pengembalaan (LAR/SO) di Pulau Sumbawa.....	87
11. Tim Penyusun Blue Print NTB BSS	90
12. Susunan Organisasi Pelaksana NTB BSS Tingkat Provinsi	94
13. Tim Ahli Program NTB BSS	99
14. Kesepakatan Bersama Antara Departemen Pertanian RI dengan Pemerintah Provinsi NTB tentang Kerjasama Pelaksanaan Program P2SDS Tahun 2010.....	102
15. Nota Kesepakatan antara Gubernur NTB dengan Bupati Sumbawa Barat tentang Kerjasama Pengembangan Peternakan Sapi Sistem LAR	106
16. Nota Kesepakatan antara Gubernur NTB dengan Bupati Sumbawa tentang Kerjasama Pengembangan Peternakan Sapi Sistem LAR.....	109
17. Nota Kesepakatan antara Gubernur NTB dengan Bupati Dompu tentang Kerjasama Pengembangan Peternakan Sapi Sistem SO.....	113
18. Nota Kesepakatan antara Gubernur NTB dengan Bupati Bima tentang Kerjasama Pengembangan Peternakan Sapi Sistem SO.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sub-sektor peternakan pada dasarnya merupakan implementasi dan bagian dari kebijakan pembangunan pertanian yang memiliki nilai penting dalam ketahanan pangan dan berupaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Penanganan masalah pangan menjadi sangat penting seiring dengan perubahan struktural ekonomi (*the structural change of economy*), di mana dalam perubahan ini sektor pertanian berperan sebagai penyedia bahan baku yang mampu menciptakan dampak peningkatan nilai tambah melalui keterkaitan ke belakang dan ke depan (*backward and forward linkages*). Ini berarti sektor pertanian dalam arti luas bukan saja memiliki peran yang sangat strategis, namun juga memiliki peran yang sangat besar, terutama dalam usaha mengatasi masalah kekurangan pangan dan gizi yang masih dialami oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Menyadari arti penting pembangunan pertanian dalam arti luas maka Pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Juni 2005 mencanangkan suatu program yang dikenal dengan **Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK)**. Pencanangan program RPPK ini adalah untuk melihat kembali peran sektor pertanian sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi; serta untuk menekankan kembali arti pentingnya sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Untuk menindaklanjuti program tersebut, Departemen Pertanian telah meluncurkan **Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2005-2010** yang menetapkan lima komoditas pangan strategis, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi. Sejalan dengan itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Baltbangtan) juga telah menyusun buku tentang **Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis 17 Komoditas Unggulan**, tiga di antaranya adalah unggas, sapi, dan kambing/domba. Dari ketiga komoditas peternakan tersebut, yang perlu mendapat perhatian terbesar adalah komoditas (daging) sapi mengingat sampai saat ini impor daging dan sapi bakalan jumlahnya masih sangat besar. Agar dapat melepaskan ketergantungan impor dari negara-negara lain, Departemen Pertanian menetapkan

Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2010 (P2SDS 2010). Tujuan Program Swasembada Daging Sapi 2010 ini adalah untuk mempercepat pencapaian peningkatan produksi daging sapi di dalam negeri untuk memenuhi permintaan konsumsi masyarakat Indonesia, mengurangi ketergantungan impor terhadap daging dan sapi bakalan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha budidaya ternak ruminansia. Tercapainya swasembada daging sapi pada tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPPK merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan RPPK di bidang peternakan.

Program Swasembada Daging Sapi 2010 yang secara politik telah mendapatkan dukungan dari Presiden Republik Indonesia, ditegaskan kembali oleh Presiden SBY dalam pidatonya di depan para peternak Doro Ncanga Kabupaten Dompu, Provinsi NTB pada tanggal 6 April 2006. Oleh karena itu, guna mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait upaya menyukseskan Program Swasembada Daging Sapi 2010, pemerintah Provinsi NTB telah menuangkan program tersebut ke dalam Visi dan Misi yang disusunnya, yaitu sebagai salah satu kebijakan utama pembangunan sub-sektor peternakan di daerah.

Visi pemerintah Provinsi NTB periode Tahun 2008-2013 yaitu: **Terwujudnya masyarakat NTB yang Beriman dan Berdayasaing (NTB BerSaing).** Ada lima Misi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan cita-cita (Visi) tersebut, salah satu di antaranya adalah **menumbuhkan ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.**

Sumberdaya lokal NTB yang sudah berkembang, membudaya, dan terbukti memberikan sumbangan besar terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sub sektor peternakan, khususnya peternakan sapi. Dibandingkan ternak ruminansia lainnya, populasi sapi menempati urutan pertama, sekitar empat kali lipat daripada populasi kerbau, enam kali lipat populasi kuda, dan sekitar dua kali lipat populasi kambing. Dengan demikian, peternakan sapi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun perekonomian masyarakat. Peternakan sapi rakyat selain sebagai sumber pendapatan rumah tangga peternak, juga berfungsi sebagai penghasil pupuk kandang guna menjaga kesuburan lahan pertanian, dan sebagai tabungan hidup yang sewaktu-waktu mudah diuangkan.

Kontribusi sapi NTB terhadap pengembangan sapi dan kebutuhan daging secara nasional sangat signifikan. Setiap tahun, NTB dapat mengirim sapi potong rata-rata

16.500 ekor dan sapi bibit 12.000 ekor ke pelbagai provinsi di Indonesia. Mengingat potensi yang dimilikinya, dalam program nasional percepatan pencapaian swasembada daging sapi (P2SDS) NTB ditetapkan sebagai salah satu provinsi sumber sapi potong dan sapi bibit di antara 18 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan potensi dan peluang pengembangan ternak sapi secara nasional sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah Provinsi NTB bertekad dan berkomitmen membangun peternakan sapi yang tangguh melalui suatu program yang disebut: “Nusa Tenggara Barat Bumi Sejuta Sapi” (NTB BSS). Penganjangan (*launching*) program ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2008 oleh Gubernur bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Emas Ke-50 NTB. Penganjangan tersebut disertai penandatanganan kesepakatan bersama antara Dirjen Peternakan dengan Gubernur NTB. Untuk menjabarkan kebijakan, rencana aksi, organisasi pelaksana, serta keluaran (*outcomes*) yang ingin dicapai, perlu disusun Blue Print (Cetak Biru) Nusa Tenggara Barat Bumi Sejuta Sapi Tahun 2009-2013.

1.2. Tujuan Penyusunan Blue Print

Blue Print NTB BSS disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pedoman umum kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan unsur terkait lainnya dalam melaksanakan program aksi untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Bumi Sejuta Sapi.
- 2) Memberikan pemahaman kepada semua pihak yang berkepentingan akan pentingnya ternak sapi sebagai komoditas unggulan daerah NTB yang berdayasaing tinggi dan menjadi pengungkit atau penggerak utama (*prime mover*) pengembangan sektor ekonomi lainnya.
- 3) Memberikan pedoman kepada Tim Penyusun Blue Print untuk menyusun pedoman umum (Petunjuk Pelaksanaan) dan pedoman operasional (Petunjuk Teknis) pelaksanaan program aksi NTB BSS di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
- 4) Memberikan pedoman kepada pelaksana NTB BSS di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota untuk menyusun rencana kerja tahunan dalam pengembangan ternak sapi.
- 5) Memberikan informasi dan laporan kepada penentu kebijakan di tingkat pusat mengenai program NTB BSS agar memperoleh dukungan politik maupun dukungan pendanaan.

1.3. Ruang lingkup

Ruang lingkup Blue Print ini pada dasarnya meliputi tiga aspek, yaitu *outcomes* (keluaran), program aksi, dan organisasi pelaksana. Keluaran meliputi visi dan sasaran yang ingin dicapai. Program aksi merupakan upaya untuk mencapai keluaran, yang meliputi penetapan isu strategis, kebijakan, strategi, program kegiatan, lokasi, indikator capaian, dan pendanaan. Organisasi pelaksana terdiri dari struktur, mekanisme kerja, dan pembagian tugas mulai dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota.

Penyusunan Blue Print ini mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2009-2013, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, Pedoman P2SDS 2010, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Periode 2009-2013, serta berbagai dokumen kebijakan pembangunan nasional di bidang peternakan.

Dokumen Blue Print ini diawali dengan uraian mengenai latar belakang yang mendasari munculnya gagasan NTB BSS yang disajikan pada Bab I. Pada Bab II diuraikan kerangka pikir NTB BSS yang mencakup pengertian dan pendekatan program. Pada Bab III dipaparkan berbagai hal yang terkait dengan kondisi peternakan sapi di Provinsi NTB. Pada Bab IV dijabarkan secara luas analisis dinamika program percepatan dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan. Selanjutnya uraian mengenai program kunci yakni Program Aksi NTB BSS dipaparkan pada Bab VI. Di sini diuraikan isu strategis pembangunan dan sasaran yang akan dicapai melalui NTB BSS. Selain itu, pada bab ini dijabarkan pula kebijakan, sasaran, lokasi, rencana anggaran, dan penanggung jawab kegiatan. Secara rinci program aksi tersebut diuraikan dalam bentuk matriks pada Lampiran 1 s/d 6. Dengan demikian, setiap kegiatan akan dapat dijabarkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pengguna lainnya sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing. Indikator-indikator capaian yang terdapat dalam program aksi ini akan menjadi dasar bagi monitoring dan evaluasi program pada tingkat wilayah kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

1.4. Proses penyusunan Blue Print

Penyusunan Blue Print diawali dengan pencanangan secara resmi Nusa Tenggara Barat sebagai Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS) pada tanggal 17 Desember 2008, yaitu saat memperingati Hari Ulang Tahun Emas Ke-50 NTB. Selanjutnya pencanangan ini ditindaklanjuti dalam pertemuan antara seluruh jajaran SKPD se-Provinsi NTB dengan

Wakil Gubernur NTB pada tanggal 6 Pebruari 2009. Dalam pertemuan tersebut sekaligus dibentuk Tim Penyusun Blue Print NTB BSS yang terdiri atas unsur-unsur Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini Bappeda NTB, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Fakultas Peternakan Universitas Mataram, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB, dan beranggotakan pakar-pakar dari unsur-unsur Fakultas Peternakan Universitas Mataram dan BPTP NTB. Tim Penyusun secara intensif melakukan analisis dan diskusi untuk menyusun kebijakan, strategi dan rencana aksi NTB BSS. Pada tanggal 16 Pebruari 2009 Tim Penyusun melakukan pemaparan dan sosialisasi Blue Print NTB BSS dihadapan Ketua Bappeda Provinsi NTB dan seluruh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota, Badan Koordinasi Penyuluhan Kabupaten/Kota; dan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTB. Selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2009 Tim melakukan pertemuan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk mendapatkan arahan, masukan, perbaikan dan penyempurnaan Blue Print. Direncanakan pertemuan asistensi akan dilakukan antara Tim Penyusun dengan Bappenas, antara Tim Penyusun dengan Direktorat Jenderal Peternakan untuk uji klinis, dan akhirnya presentasi Blue Print akan dilakukan dihadapan Presiden R.I., Bapak Dr. Susilo Bambang Yudoyono oleh Gubernur/Wakil Gubernur NTB di Istana Negara.

1.5. Pengguna

Blue Print NTB BSS ini merupakan dokumen yang secara terpadu memuat kebijakan-kebijakan terobosan pembangunan peternakan sapi dalam rangka mewujudkan NTB BSS yang pada gilirannya dapat mendukung tercapainya P2SDS Nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, pemenuhan gizi masyarakat, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) NTB. Dokumen Blue Print NTB BSS disusun sebagai acuan pelaksanaan program NTB BSS bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.

BAB II

KERANGKA PIKIR NTB BSS

2.1. Pengertian

Bumi Sejuta Sapi (BSS) adalah wilayah pengembangan peternakan sapi di NTB di mana telah tercapai populasi optimal sesuai dengan daya dukung wilayah (*carrying capacity*). Kata sejuta tidak berarti angka mutlak, tetapi merupakan visi yang mengandung semangat untuk mempercepat tercapainya populasi optimal melalui program terobosan NTB BSS. Jenis sapi yang dikembangkan terutama adalah sapi Bali disamping jenis sapi lainnya seperti Hissar, Simental, Limousin, Brangus, Frisien Holstein, Brahman, dan sapi-sapi hasil persilangan berbagai jenis tersebut.

Program NTB BSS adalah program percepatan (akselerasi) pengembangan peternakan sapi dengan lebih mengutamakan pemberdayaan sumberdaya lokal dengan tujuan agar sesegera mungkin dapat tercapai populasi optimal sesuai dengan daya dukung wilayah sehingga peternakan sapi di NTB dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan masyarakat pedesaan, memenuhi kebutuhan daging nasional, memenuhi permintaan bibit sapi bagi daerah-daerah lain, dan memenuhi kebutuhan konsumsi daging dalam daerah. Dengan demikian, secara tidak langsung peternakan sapi diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak atau pengungkit sektor ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan program NTB BSS tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau mengabaikan program pengembangan jenis ternak lain seperti kerbau dan ternak ruminansia lainnya, karena kenyataannya sampai saat ini masyarakat NTB masih menerima dan mengonsumsi daging kerbau sebagai layaknya daging sapi. Oleh karenanya untuk kondisi agroekologi dan sosial budaya tertentu, pengembangan ternak kerbau dapat terus dilakukan. Pengembangan ternak kerbau dan ternak lainnya tetap menjadi program reguler pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Keberadaan program NTB BSS lebih dimaksudkan untuk menjadikan ternak sapi sebagai ternak unggulan NTB karena memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan jenis ternak lainnya.

2.2. Pendekatan Program

Program NTB BSS merupakan program percepatan yang berangkat dari program reguler sebagai pembanding.

2.2.1. Program reguler (tanpa program percepatan)

Program reguler merupakan kegiatan pengembangan peternakan sapi yang dilaksanakan tanpa program percepatan. Kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam program reguler diasumsikan seperti yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut maka populasi, produksi, dan produktivitas ternak sapi sampai tahun 2013 dapat diprediksi sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Prediksi populasi sapi program reguler (tanpa upaya percepatan).

No.	Tahun	Populasi (ekor)	Induk Sapi (ekor)	Panen Pedet (ekor)
1.	2009	587.247	204.018	108.864
2.	2010	631.511	219.396	117.070
3.	2011	679.111	235.716	125.894
4.	2012	730.299	253.716	135.383
5.	2013	785.346	272.840	145.587
Jumlah				632.798

Dalam melakukan prediksi digunakan beberapa indikator dan asumsi sebagai berikut:.

- a) Populasi sapi pada tahun 2008 sebanyak 546.114 ekor, dengan jumlah induk 37,36% dari seluruh populasi.
- b) Angka kelahiran 66,7% dari jumlah induk sapi.
- c) Angka kematian anak sapi (pedet) 20% dari jumlah ternak sapi yang lahir.
- d) Jumlah panen pedet sebanyak 101.239 ekor.
- e) Jumlah pemotongan betina produktif dan tidak tercatat sebesar 20% dari pemotongan tercatat.
- f) Jumlah pemotongan dalam daerah (lokal) sebesar 41.575 ekor.
- g) Jumlah sapi bibit dan sapi potong yang dikeluarkan dari NTB sebanyak 28.500 ekor.

2.2.2. Program Percepatan

Program percepatan merupakan program yang diarahkan pada upaya-upaya percepatan pengembangan peternakan sapi untuk mencapai populasi sapi optimal sesuai dengan daya dukung wilayah dalam kurun waktu lima tahun (2009-2013). Dalam program percepatan diintroduksi kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang mampu mempercepat pengembangan populasi, produksi, dan produktivitas sapi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Dalam program percepatan ini digunakan indikator dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a) Peningkatan jumlah induk sapi sebesar 38 - 42% dari populasi sapi.
- b) Peningkatan kelahiran pedet sebesar 75 - 85% dari jumlah induk sapi.
- c) Penurunan angka kematian pedet sebanyak 18 - 10% dari jumlah sapi yang lahir.
- d) Penurunan pematangan sapi betina produktif hingga 15-8% dari jumlah pematangan sapi tercatat.
- e) Pertumbuhan populasi sapi sebesar 10 - 15%/tahun
- f) Pengendalian pengeluaran bibit yang semula sekitar 13.000 ekor menjadi 10.000 ekor selama tiga tahun (2009 - 2011).

Berdasarkan indikator dan asumsi tersebut maka prediksi perkembangan populasi, produksi dan produktivitas sapi dapat ditentukan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Prediksi perkembangan populasi sapi program percepatan.

No.	Tahun	Populasi (ekor)	Induk Sapi (ekor)	Panen Pedet (ekor)
1.	2009	602.333	207.513	130.277
2.	2010	683.347	234.910	173.716
3.	2011	780.724	273.339	204.457
4.	2012	897.832	320.097	242.153
5.	2013	1.032.507	377.090	288.474
Jumlah				1.039.077

Prediksi perkembangan populasi sapi pada program percepatan seperti yang tercantum dalam Tabel 2.2 akan tercapai dengan dilakukannya Program Aksi yang rinciannya disajikan pada Bab VI.

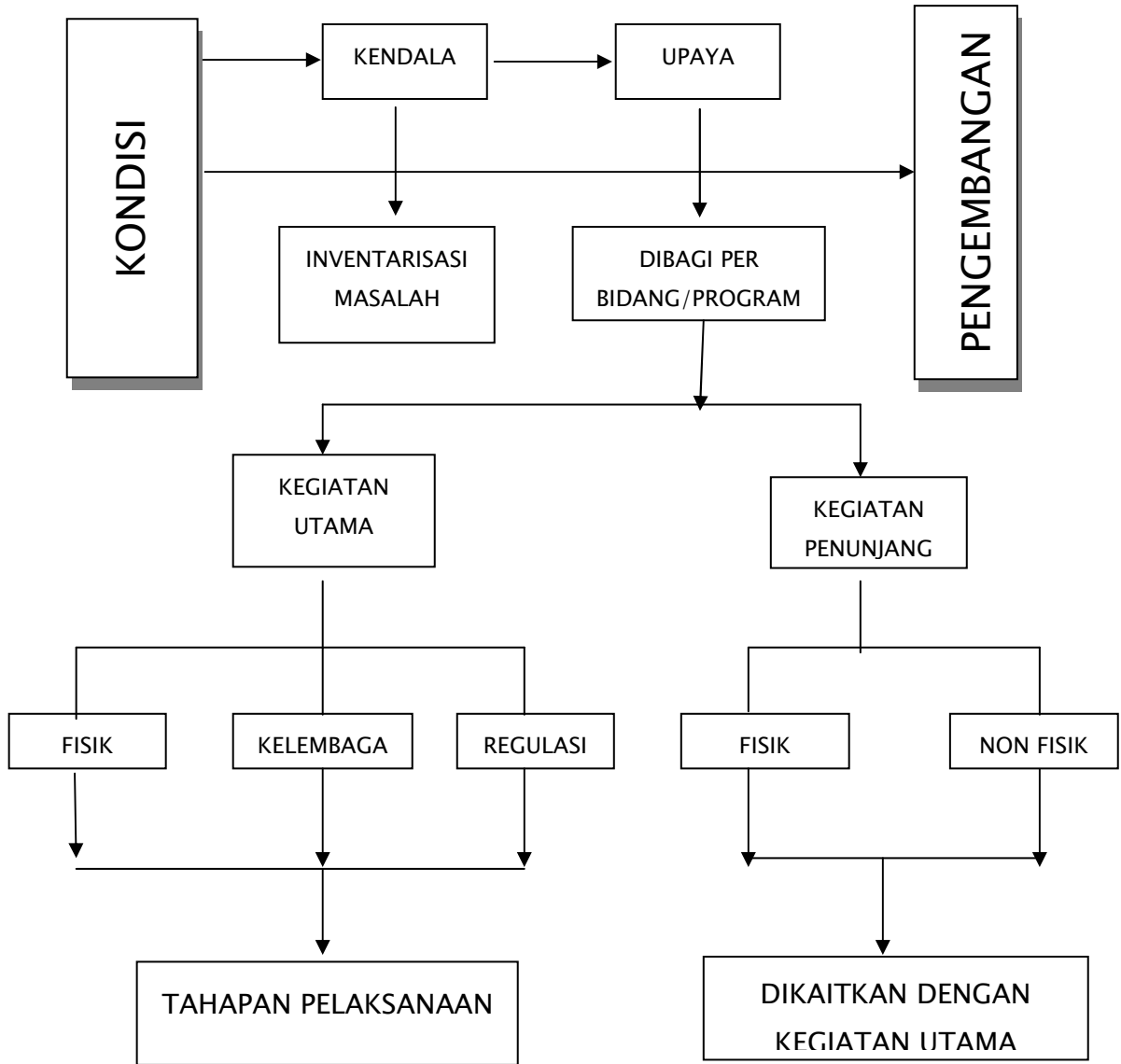
2.3. Kerangka Pikir NTB Bumi Sejuta Sapi

Program NTB BSS pada dasarnya merupakan program percepatan (*acceleration*) yang bertujuan untuk mencapai populasi, produksi, dan produktivitas ternak sapi optimal sesuai dengan daya dukung sumberdaya lahan yang tersedia di NTB. Program percepatan tersebut berangkat dari capaian kinerja program reguler beberapa tahun terakhir yang tercermin pada kondisi tahun 2008 (*existing conditions*). Tujuan NTB BSS tersebut diharapkan dapat tercapai pada Tahun 2013 atau selama 5 (lima) tahun anggaran (2009-2013).

Kondisi eksisting yang paling penting dikemukakan adalah (1) populasi ternak pemakan hijauan (sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba) dalam satuan ternak (ST), (2) luas lahan yang memiliki potensi sumber pakan ternak, dan (3) kondisi SDM dan kelembagaan. Dengan diketahuinya populasi ternak dan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan (2), dapat dihitung daya tampung ternak di seluruh wilayah NTB. Populasi ternak sapi sesuai dengan daya tampung optimal inilah yang ingin dicapai dalam program NTB BSS. Kondisi SDM yang perlu dikemukakan meliputi kondisi peternak, penyuluh, pelaku usaha, dan petugas Dinas/Instansi. Kelembagaan yang perlu dikemukakan meliputi lembaga pendukung (perbankan, pasar, puskesmas, penyuluhan, RPH, dsb), kelompok tani-ternak, kandang kolektif, asosiasi, dan sebagainya.

Berdasarkan kondisi eksisting tersebut, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang membutuhkan upaya penanganan secara cepat dan tepat. Permasalahan yang urgen ini selanjutnya dikenal sebagai isu strategis. Upaya penanganan isu strategis dibagi menurut bidang atau program. Misalnya, bidang sumberdaya manusia, sumberdaya ternak, sumberdaya lahan, dan kelembagaan. Pada setiap bidang, direncanakan berbagai kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi kegiatan utama (pokok) dan kegiatan penunjang (pendukung). Sebagai contoh, pada bidang sumberdaya ternak, kegiatan utamanya adalah peningkatan populasi dan peningkatan produksi/produktivitas sedangkan kegiatan pendukungnya perkreditan dan pemasaran. Pada masing-masing kegiatan, baik kegiatan utama maupun penunjang, perlu dibagi menjadi kegiatan fisik dan non fisik.

Untuk memperjelas kerangka berfikir dalam upaya mencapai program NTB BSS sebagaimana diuraikan diatas, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut (Gambar 2.1)



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Pengembangan NTB BSS

Dalam bagan tersebut nampak bahwa pada dasarnya upaya pencapaian program NTB BSS terbagi dalam tiga komponen utama, yaitu penyajian kondisi peternakan sapi saat sekarang (*existing conditions*), inventarisasi masalah, dan penyusunan program/kegiatan secara rinci. Rincian dari ketiga komponen tersebut dibahas dalam Bab VI tentang Program Aksi NTB BSS.

BAB III

KONDISI PETERNAKAN SAPI

3.1. Peran strategis peternakan sapi

3.1.1. Peran di daerah NTB

Peran strategis peternakan sapi dalam rangka pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat NTB adalah sebagai berikut:

- Sumber pendapatan sebagian besar masyarakat pedesaan.
- Tabungan masyarakat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, seperti ongkos ibadah haji, biaya pendidikan, dan lain-lain.
- Penyediaan protein hewani yang sangat berguna bagi kesehatan, kecerdasan, dan pencegahan kasus gizi buruk.
- Penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha masyarakat.
- Pelestarian lingkungan berupa sumber energi gas bio dan pupuk organik.
- Menghasilkan bahan baku industri pengolahan/industri rakyat.
- Menyumbang PDRB sebesar 14,27% dari sektor pertanian dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah .

3.1.2. Peran secara nasional

Peran strategis peternakan sapi NTB secara nasional adalah eksistensinya sebagai daerah sumber ternak bibit dan ternak potong nasional. Kontribusi Provinsi NTB dalam penyediaan bibit sapi rata-rata mencapai 12.000 ekor per tahun untuk 14 provinsi di Indonesia. Dukungan terhadap Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) Nasional juga sangat besar yaitu mencapai 31.728 ekor/tahun.

3.1.3. Keunggulan komparatif secara nasional

Secara historis Provinsi NTB merupakan daerah pengekspor sapi dan kerbau ke Hongkong dan Singapura. Namun pada Tahun 1978 kegiatan ekspor keluar negeri tersebut dihentikan. Hal ini untuk melaksanakan kebijakan nasional yaitu upaya pemenuhan defisit kebutuhan daging dalam negeri. Sebagai daerah penghasil ternak sapi, NTB memiliki daya saing yang komparatif secara nasional (lihat Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Keunggulan komparatif peternakan sapi Provinsi NTB secara nasional

No	Keunggulan Komparatif	NTB	Nasional	Keterangan
1.	Populasi ternak sapi (ekor)	546.114	11.365.879	8 besar
2.	Kelahiran (% dari induk sapi)	66,70%	40,72%	-
3.	Kontribusi swasembada daging nasional.	Surplus	Defisit	Impor
	- Ternak potong (ekor/tahun)	31.728	265.700	
	- Sapi bibit (ekor/tahun)	12.000	6.200	
	- Daging (ton/tahun)	9.711	25.949	
4.	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	5,78	4,13	-
5.	Rasio sapi dan penduduk	1 : 6	1 : 17	-
6.	Pola pemeliharaan kandang kolektif	803	Langka	Multi fungsi
7.	Penyakit hewan menular strategis (Rabies, Jembrana, Brucellosis dan Septichaemia Epizootica)	Bebas	Belum	-
8.	Sebagai lokasi magang bagi peternak sapi potong dari provinsi lain	3 kab.	Terbatas	Kawasan VBC
9.	Lokasi magang Drh dan paramedis Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan)	3 kab.	Terbatas	Pelayanan Keswan

Keunggulan komparatif tersebut, (1) populasi sapi termasuk delapan besar nasional; (2) ternak sapi sebagai modal sosial yang turun temurun dan melekat di masyarakat; (3) kondisi geografi NTB cocok untuk pengembangan peternakan sapi; (4) tempat pemurnian sapi Bali nasional; (5) pusat pengembangan sapi Hissar (di Penyaring Kabupaten Sumbawa); (6) daya dukung SDA cukup tersedia; (7) bebas berbagai penyakit hewan menular strategis; (8) NTB surplus sapi; dan (9) sumber ternak bibit dan ternak potong nasional.

3.2. Sumberdaya ternak sapi

Di wilayah NTB berkembang dengan baik berbagai jenis sapi yaitu sapi ras Bali, Hissar, Simental, Brangus, Limousin, Frisian Holstein dan sapi-sapi hasil persilangan dari berbagai jenis sapi tersebut. Populasi ternak sapi pada Tahun 2008 mencapai 546.114 ekor dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,41%/tahun. Berdasarkan wilayah penyebarannya, sebanyak 48% ternak sapi dipelihara oleh petani di Pulau Lombok dan 52% dipelihara oleh petani di Pulau Sumbawa.

Potensi sumberdaya ternak sapi dapat dilihat dari perkembangan populasinya di seluruh kabupaten/kota se-NTB seperti tercantum pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perkembangan populasi sapi Tahun 2004- 2008

No	Kab/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	r (%)
1.	Mataram	938	952	996	1.292	714	- 2,69
2.	Lobar	102.460	106.695	112.648	110.462	121.582	4,46
3.	Loteng	72.159	72.519	73.891	74.843	75.744	1,22
4.	Lotim	60.896	60.135	60.677	64.947	64.414	1,47
P. Lombok		236.453	240.301	248.212	251.544	262.430	2,65
5.	KSB	15.449	17.941	20.224	21.737	29.337	17,83
6.	Sumbawa	68.690	75.650	88.964	102.095	114.595	13,68
7.	Dompus	43.164	49.947	52.339	58.897	61.120	9,20
8.	Bima	57.087	59.012	61.874	62.398	65.988	3,71
9.	Kota Bima	5.191	8.314	9.763	11.165	12.616	26,24
P. Sumbawa		189.581	210.864	233.164	256.292	283.656	10,60
Jumlah		426.034	451.165	481.376	507.836	546.114	6,41

Ternak sapi memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan ternak lainnya sebagai lokomotif penggerak ekonomi di NTB, didasarkan pada keunggulan-keunggulan berikut:

- Pemeliharaan sapi telah membudaya sejak lama bagi masyarakat NTB.
- Populasinya terbanyak dibandingkan dengan ternak lainnya dan tersebar hampir di seluruh desa di NTB.
- Mampu beradaptasi dengan baik pada lingkungan tropis lembab.
- Bebas dari beberapa penyakit hewan menular strategis .
- Pangsa pasar luar daerah sangat besar, permintaan mencapai 50.000 ekor/tahun.
- Tingkat kesuburan yang tinggi (Satu induk Satu tahun Satu anak).
- Menyerap tenaga kerja yang cukup besar, melibatkan 0,33 orang tenaga kerja/ekor atau 181.856 orang secara keseluruhan.

- Sebagai tenaga kerja pengolah lahan pertanian.
- Kotoran sapi dapat diolah menjadi pupuk organik yang berguna untuk pertanian dan dapat diolah sebagai sumber energi alternatif (gas bio).
- Bahan baku usaha industri rumah tangga (produk olahan) seperti kerajinan kulit, dendeng, abon, kerupuk kulit, dan lain-lain.
- Dapat berintegrasi dengan sub sektor dan sektor lainnya.

Populasi ternak pemakan hijauan (sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba) di NTB pada Tahun 2008 dalam satuan ternak (ST) adalah sebagai berikut (Tabel 3.3). Populasi ternak dalam satuan ternak sangat penting untuk memperhitungkan daya dukung wilayah.

Tabel 3.3. Populasi ternak di NTB Tahun 2008 dalam satuan ternak (ST)

No	Ternak	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Jumlah
1	Kota Mataram	544	52	935	338	33	1.902
2	Lobar	92.621	7.463	3.382	6.762	181	110.410
3	Loteng	57.705	16.291	3.877	9.409	96	87.378
4	Lotim	49.071	5.338	4.003	15.002	714	74.128
	P. Lombok	199.941	29.144	12.197	31.511	1.024	273.817
5	KSB	22.349	11.615	4.186	1.926	171	40.245
6	Sumbawa	87.298	57.036	25.159	4.903	134	174.531
7	Dompu	46.561	13.852	4.374	5.443	15	70.245
8	Bima	50.270	28.225	6.442	16.477	1.649	103.063
9	Kota Bima	9.611	4.207	1.631	1.816	65	17.329
	P. Sumbawa	216.890	114.934	41.792	30.565	2.034	405.414
	NTB	416.030	144.078	53.990	62.077	3.058	679.232
	Jumlah (%)	61	21	7,9	9,1	0,5	100

Pada Tabel 3.3 terlihat bahwa populasi sapi adalah yang terbanyak (61%) dibandingkan dengan populasi ternak lainnya. Kondisi ini merupakan salah satu alasan mengapa ternak sapi menjadi ternak unggulan di NTB.

3.3 Daya dukung wilayah

Sumber daya alam (SDA) NTB sangat mendukung untuk pengembangan peternakan sapi. Berdasarkan potensi SDA tersebut, di wilayah NTB diperkirakan dapat menampung ternak sekitar 2 (dua) juta ekor atau setara dengan 1,5 juta satuan ternak (ST). Daya tampung ternak tersebut diperhitungkan dari potensi pakan ternak yang dapat dihasilkan dari berbagai lahan sumber pakan ternak. Jenis lahan yang memiliki potensi sebagai sumber pakan ternak meliputi lahan sawah, tegal, kebun, ladang, hutan negara,

hutan rakyat, perkebunan, lahan yang sementara tidak digunakan, dan padang penggembalaan. Jenis dan luas penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4. dan Tabel 3.5.

Tabel 3.4. Luas lahan menurut penggunaannya di wilayah Pulau Lombok Tahun 2008.

No	Jenis Penggunaan	Kabupaten/Kota				
		Lobar	Loteng	Lotim	Mataram	P. Lombok
I	LAHAN SAWAH (Ha)	25.153	51.189	45.350	2.095	123.787
1	Irigasi	21.316	39.977	44.708	2.095	108.096
2	Tadah Hujan	3.837	11.212	642	-	15.691
II	LAHAN KERING (Ha)	129.154	41.392	91.997	148	262.691
1	Tegal/ Kebun	39.628	20.576	22.677	83	82.964
2	Ladang/ Huma	13.199	1.058	6.178	-	20.435
3	Padang Pengembalaan	320	-	556	-	876
4	Lahan tidk diusahakan	-	-	20	-	20
5	Hutan rakyat	12.616	2.260	3.476	-	18.352
6	Hutan negara	47.310	17.021	55.927	-	120.258
7	Perkebunan	16.081	477	3.163	65	19.786
	Jumlah	154.307	92.581	137.347	2.243	386.478

Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa luas lahan yang memiliki potensi sebagai sumber pakan ternak di P. Lombok mencapai 386.478 ha, yang terdiri dari sawah 123.787 ha (32%) dan lahan kering 262.691 ha (68%). Lahan hutan negara yang tergolong lahan kering memiliki luas yang dominan, yaitu mencapai 120.258 ha atau 45% dari luas lahan kering keseluruhan. Dengan asumsi bahwa lahan sawah dan lahan kering selain hutan dapat menampung ternak 1,5 ST per ha dan lahan hutan 0,25 ST per ha, maka wilayah P. Lombok diperkirakan dapat menampung ternak sebanyak 444.424,50 ST. Sementara, populasi ternak di P. Lombok pada Tahun 2008 (lihat Tabel 3.3) adalah 273.817 ST. Dengan demikian, wilayah P. Lombok dengan tanpa introduksi teknologi pakan masih dapat menampung ternak sapi sekitar 170.608 ST atau setara dengan 221.790 ekor.

Tabel 3.5. Luas lahan menurut penggunaannya di Pulau Sumbawa Tahun 2008.

NO	JENIS PENGGUNAAN	Kabupaten/Kota					
		KSB	Sumbawa	Dompu	Bima	Kota Bima	Pulau Sumbawa
I	LAHAN SAWAH (Ha)	5.885	46.873	18.985	30.743	2.283	104.769
1	Irigasi	5.011	39.160	14.903	23.060	2.054	84.188
2	Tadah Hujan	874	7.713	4.082	7.683	229	20.581
II	LAHAN KERING (Ha)	149.543	495.932	153.929	381.397	18.108	1.198.909
1	Tegal/ Kebun	9.497	59.000	15.192	65.538	3.113	152.340
2	Ladang/ Huma	2.266	9.883	2.754	7.570	1.173	23.646
3	Padang Pengembalaan	2.445	3.773	6.526	15.326	-	28.070
4	Lahan tidk diusahakan	1.905	25.937	3.838	22.108	215	54.003
5	Hutan rakyat	1.850	91.336	20.905	40.375	2.840	157.306
6	Hutan negara	128.263	278.154	96.272	219.703	9.827	732.219
7	Perkebunan	3.317	27.849	8.442	10.777	940	51.325
	Jumlah	155.428	542.805	172.914	412.140	20.391	1.303.678

Dalam Tabel 3.5 terlihat bahwa luas lahan di Pulau Sumbawa yang memiliki potensi sumber pakan ternak mencapai 1.303.678 ha, yang terdiri sawah 104.769 ha (8%) dan lahan kering 1.198.909 ha (92%). Lahan hutan negara tercatat 732.219 ha atau 61% dari luas lahan kering keseluruhan. Berdasarkan luas lahan tersebut, wilayah Pulau Sumbawa diperkirakan dapat menampung ternak 925.833 ST atau setara dengan 1.203.582,9 ekor. Sementara, populasi ternak pemakan hijauan di Pulau Sumbawa Tahun 2008 tercatat 405.414 ST. Dengan demikian wilayah P. Sumbawa diperkirakan masih dapat menampung ternak sapi sekitar 520.419 ST atau setara dengan 676.545 ekor.

Berdasarkan data pada Tabel 3.3, Tabel 3.4, dan Tabel 3.5 dapat diperhitungkan daya tampung ternak per Kabupaten seperti pada Tabel 3.6. Tabel 3.6 menunjukkan bahwa wilayah NTB memiliki daya tampung ternak sekitar 1.370.258 ST atau setara dengan 1.781.335 ekor. Apabila populasi ternak selain sapi pada tahun-tahun mendatang dipertahankan seperti pada Tahun 2008, maka potensi pengembangan populasi sapi di NTB dapat mencapai 691.027 ST atau setara dengan 898.334 ekor. Potensi pengembangan tersebut terbagi di P. Lombok sebanyak 170.608 ST atau setara 221.790 ekor, di P. Sumbawa 520.419 ST atau setara dengan 676.545 ekor.

Tabel 3.6. Daya tampung ternak per Kabupaten/Kota di NTB

No	Kabupaten/Kota	Lahan Sumber Pakan (ha)	Daya tampung (ST)	Populasi Th.2008 (ST)	Potensi Pengembangan Sapi (ST)	Potensi Pengembangan Sapi (ekor)
1	Lombok Barat	118.824	178.236	110.410	67.826	88.174
2	Lombok Tengah	79.815	119.723	87.378	32.345	42.048
3	Lombok Timur	95.401	143.102	74.128	68.974	89.666
4	Kota Mataram	2.243	3.365	1.902	1.463	1.901
	Pulau Lombok	296.283	444.425	273.817	170.608	221.790
1	KSB	59.231	88.847	40.245	48.602	63.182
2	Sumbawa	334.189	501.284	174.531	326.753	424.778
3	Dompu	100.710	151.065	70.245	80.820	105.066
4	Bima	247.363	371.045	103.063	267.982	348.376
5	Kota Bima	13.020	19.530	17.329	2.201	2.861
	Pulau Sumbawa	617.222	925.833	405.414	520.419	676.545
	NTB	913.505	1.370.258	679.231	691.027	898.334

Ket. : 1) Diasumsikan daya tampung ternak lahan sumber pakan adalah 1,5 ST per ha.
2) Satu satuan ternak (ST) adalah setara sapi dewasa bobot 300 kg.

Asumsi daya tampung yang digunakan dalam analisis ini merupakan asumsi sebelum ada intervensi kebijakan pengembangan pakan ternak. Oleh karena itu dalam upaya pelaksanaan program NTB BSS diperlukan kegiatan-kegiatan untuk optimalisasi lahan sumber pakan, misalnya dengan perbaikan dan penataan padang penggembalaan, optimalisasi penggunaan lahan kering sebagai sumber pakan ternak, pemanfaatan limbah tanaman, penanaman rumput unggul yang terintegrasi dengan tanaman perkebunan dan tanaman pangan, dan sebagainya. Upaya selanjutnya, untuk meningkatkan penyediaan pakan ternak perlu dibangun pabrik pakan ternak.

3.4. SDM dan Kelembagaan Peternak

Rumah tangga pemelihara ternak di NTB sangat besar yaitu 200.218 KK atau sekitar 23% dari total rumah tangga penduduk NTB. Jumlah pemilikan ternak sapi berkisar 2 – 3 ekor/KK di Pulau Lombok dan lebih dari 5 ekor/KK di Pulau Sumbawa. Sebagian besar peternak sudah tergabung dalam 1.096 kelompok tani ternak yang tersebar di wilayah NTB.

Sumberdaya aparatur pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB berjumlah 237 orang terdiri dari PNS 106 orang, CPNS 81 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) 47 orang, Honor Daerah 3 orang. Sumberdaya tenaga teknis di kabupaten/kota dan yang bertugas di lapangan berjumlah 472 orang terdiri dari Dokter Hewan 61 orang, Sarjana Peternakan 141 orang, Paramedis dan Penyuluh Peternakan 137 orang dan Petugas Inseminator 133 orang.

Untuk memperkuat posisi NTB sebagai daerah utama sumber bibit sapi nasional, telah dirintis pengembangan kawasan/sentra perbibitan sapi rakyat atau *Village Breeding Centre* (VBC). Data pada Tabel 3.7 memperlihatkan jumlah kelompok peternak yang berada di kawasan produksi untuk program pemberdayaan dan pembibitan sapi rakyat .

Tabel 3.7. Jumlah kawasan perbibitan sapi rakyat di wilayah NTB Tahun 2008.

No.	Kabupaten	Kawasan Produksi	Kelompok Peternak	Program
1.	Lombok Barat	Narmada dan Lingsar	4	Pemberdayaan / BPLM
2.	Lombok Tengah	Pringgarata dan Jonggat	8	PPA / BPLM
3.	Lombok Timur	Aikmel, Wanasaba dan Montong Gading	5	Aksi Perbibitan / BPLM
4	Sumbawa	Moyo Utara	5	Pemberdaaan / Lar
5.	Sumbawa Barat	Seteluk	3	Pemberdayaan / BPLM
6.	Dompu	Manggelewa dan Kempo	7	Aksi perbibitan / BPLM

Pola pemeliharaan ternak sapi di NTB berbeda antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pemeliharaan sapi di Pulau Sumbawa dilaksanakan secara ekstensif, ternak dilepas bebas di padang penggembalaan umum. Sebaliknya di Pulau Lombok ternak dikelola secara semi-intensif dengan sistem kandang kolektif yang jumlahnya mencapai 880 unit, dengan kapasitas tampung 75 – 300 ekor/unit.

3.5. Dukungan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana peternakan yang dapat difungsikan sebagai unit pelayanan, bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat masih terbatas. Tabel 3.8 memperlihatkan jumlah sarana dan prasarana pelayanan peternakan di NTB.

Tabel 3.8. Sarana dan prasarana pelayanan peternakan di NTB Tahun 2008.

No.	Uraian	Lokasi		Jumlah (unit)
		P. Lombok	P. Sumbawa	
1.	Pos Kesehatan Hewan	27	25	52
2.	Laboratorium Tipe B	1	0	1
3.	Laboratorium Tipe C	3	3	6
4.	Holding Ground	1	2	3
5.	Pasar Hewan	9	4	13
6.	UPT Inseminasi Buatan	1	0	1
7.	Pos Inseminasi Buatan	9	6	15
8.	Rumah Sakit Hewan	1	0	1
9.	Rumah Potong Hewan	24	9	33
10.	Rumah Potong Modern	1	1	2
11.	Pembibitan Sapi Brangus	1	0	1
12.	Pembibitan HMT & Ternak	1	2	3

3.6. Peluang pasar dan transaksi jual beli

Usaha ternak sapi memiliki peluang pasar yang luas dan cenderung terus meningkat baik pemasaran lokal maupun pemasaran ke luar NTB. Daerah pemasaran sapi bibit NTB meliputi 14 provinsi di Indonesia yaitu wilayah Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, Sulsel, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Jambi dan Papua. Kemudian untuk ternak potong pemasarannya dikirim ke Kaltim, Kalsel, DKI dan Jawa Barat. Jumlah nilai transaksi jual beli ternak sapi di dalam dan diluar NTB mencapai Rp. 373,7 milyar/tahun (Tabel 3.9).

Tabel 3.9. Produksi sapi potong dan sapi bibit dan nilai transaksi pasar.

No.	Komoditi Ternak	Nilai Produksi		Nilai Transaksi		
		Jumlah (ekor)	Nilai (Milyar Rp.)	Ekspor (ekor)	Lokal (ekor)	Jumlah (Milyar Rp)
1.	Sapi Potong	52.924	363.85	16.500	38.600	321,20
2.	Sapi Bibit	48.315	193,26	12.000	3.000	52,50
T o t a l		101.239	557,11	28.500	41.600	373,70

3.7. Peluang Investasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap usaha peternakan rakyat, nilai investasi masyarakat dibidang peternakan sapi berupa ternak beserta fasilitas perkandangannya mencapai Rp. 3,1 triliun. Nilai investasi yang berupa ternak adalah sebesar Rp. 2,9

triliun, dan untuk kandang sebesar Rp. 261,8 juta, belum termasuk kebun dan lahan usaha peternakan sapi yang dikelola oleh masyarakat.

Investasi usaha peternakan di wilayah NTB sangat menjanjikan, hal ini ditunjang ketersediaan sumberdaya alam berupa populasi ternak, lahan dan pakan ternak, sosial budaya masyarakat dan permintaan pasar yang terus meningkat baik lokal maupun antar daerah.

Investasi dibidang peternakan sapi yang memiliki kelayakan secara teknis, ekonomis maupun kelayakan secara perbankan dapat dilakukan dalam 3 bentuk usaha sebagai berikut :

1. Usaha perbibitan sapi.
2. Usaha penggemukan sapi.
3. Usaha peternakan mini ranch.
4. Usaha peternakan hilir

Keempat usaha tersebut diatas dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sektor pertanian dalam arti luas (perkebunan, kehutanan, tanaman pangan dan perindustrian).

Tabel 3.10. Kelayakan usaha perbibitan dan penggemukan sapi di NTB

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Usaha Perbibitan	Usaha Penggemukan
1	Pola Bagi Hasil	%	60:40	60:40
1	Hintungan skala usaha	ekor	2	2
2	Siklus Usaha	tahun	5	0,5
3	BC Rasio	-	2,74	1,37
4	Tingkat Pengembalian Bunga	%	13,89	29,97
5	Pendapatan petani	Rp./ek/thn	1.005.000	1.362.000
6	Laba Perusahaan Inti	Rp./ek/thn	670.000	908.000

Berdasarkan potensi lahan pengembangan peternakan (Lar/So) masih tersedia cukup luas, maka usaha perbibitan lebih diarahkan di Pulau Sumbawa melalui pola investasi Mini Ranch Perbibitan dan kemitraan usaha perbibitan sapi berbasis padang penggembalaan.

Daya tampung padang penggembalaan diprediksi setiap hektar menampung 1 ekor sapi, sehingga kemampuan daya tampung padang penggembalaan di Pulau Sumbawa diperkirakan mencapai 59.957 ekor, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.2.

Tabel 3.11. Potensi Padang Penggembalaan Ternak di Pulau Sumbawa

No.	Kabupaten	Kecamatan (So/Lar)	Padang Penggembalaan		Kebun HMT	
			Potensi (Ha)	Rencana perluasan (Ha)	Potensi (Ha)	Rencana Perluasan (Ha)
1	Sumbawa Barat	5	3.253,00	2.048,00	539,00	653,00
2	Sumbawa	13	32.989,45	1.699,20	14.148,25	425,25
3	Dompu	8	8.126,00	3.650,00	1.520,00	231,00
4	Bima	14	15.589,00	1.160,00	805,00	126,00
TOTAL		40	59.957,45	8.587,20	17.013,25	1.435,25

Sumber data : Statistik PLA Provinsi NTB.

Untuk investasi usaha campuran penggemukan dan perbibitan sapi lebih diarahkan di Pulau Lombok, mengingat luas lahan terbatas, sistem pemeliharaan intensif dan kandang kolektif.

Tabel 3.12. Potensi Pengembangan Investasi melalui Kelompok Kandang Kolektif

No	Kab/Kota	Kandang Kolektif (Unit)	Peternak Anggota (KK)	Daya Tampung Saat ini (ekor)	Potensi Pengemb. Ternak (ekor)	Peluang pengemb. Ternak (ekor)
1	Lombok Barat	324	7.890	15.780	31.560	15.780
2	Lombok Tengah	226	4.580	9.160	18.320	9.160
3	Lombok Timur	228	5.728	10.883	20.050	9.167
	P.Lombok	778	18.198	35.823	69.930	34.107

Sumber data : Disnak dan Fapet Unram 2007.

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa sampai saat ini pemilikan ternak rata-rata 2 ekor/KK, sedangkan kemampuan pemeliharaan oleh setiap peternak adalah 4 - 5 ekor di pulau Lombok dan 9 - 10 ekor di pulau Sumbawa. Sehingga peluang pengembangan melalui pola kemitraan kandang kolektif masih tersedia sebesar 48.200 ekor.

Dalam rangka membuka peluang investasi usaha peternakan pada bagian hilir telah tersedia fasilitas dan dukungan sumberdaya peternakan yaitu penyediaan sapi potong 53.000 ekor/tahun, mengurangi pengiriman sapi potong keluar daerah dalam

bentuk ternak hidup guna efisiensi dan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Modern kapasitas masing-masing 50 ekor/hari (RPH Banyumulek-Lombok Barat dan RPH Pototano-Sumbawa Barat).

3.8. Pola Pengembangan Peternakan Sapi

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan pola pengembangan peternakan sapi di NTB yaitu Sistem Kelompok Kandang Kolektif di Pulau Lombok dan Sistem LAR-SO (Padang Penggembalaan) di Pulau Sumbawa.

a. Sistem Kandang Kolektif

Sistem kandang kolektif merupakan pola pemeliharaan sapi dalam suatu kandang bersama, yang dibangun secara gotong royong oleh para peternak, untuk difungsikan sebagai wadah kerjasama peternak, unit usaha agribisnis sapi dan mulfi fungsi lainnya.

Penetapan pengembangan peternakan dengan sistem ini dilandasi pertimbangan kultur pemeliharaan sapi di Pulau Lombok yang lebih intensif, ternak dipelihara dalam kandang siang malam, luas lahan relatif sempit dan jumlah pemilikan ternak sapi relatif kecil antara 2-3 ekor. Pengembangan kandang kolektif harus memenuhi ketentuann dan prinsip yaitu :

- a. Ramah lingkungan, sehingga lokasinya berada diluar lingkungan pemukiman.
- b. Bangunan kandang berada pada tanah milik kelompok dan atau tanah pemerintah Desa.
- c. Dibangun secara gotong royong melibatkan partisipasi dan swadaya para peternak.
- d. Mempunyai Awiq-Awiq yaitu tata tertib atau kesepakatan yang wajib ditaati seluruh peternak dalam kelompok kandang kolektif.
- e. Didayagunakan untuk berbagai kepentingan bersama dan kerjasama bagi peternak anggota kelompok.

Adapun manfaat kandang kolektif adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wadah kerjasama peternak dalam kelompok maupun dengan kelompok/lembaga lainnya.
2. Meningkatkan kemudahan bagi peternak untuk akses informasi/tehnologi dari Dinas/Instansi terkait untuk peningkatan produksi ternak.

3. Membantu meningkatkan pengamanan kegiatan usaha dan sistim keamanan lingkungan (Siskamling).
4. Memudahkan pengelolaan ternak seperti mengawinkan, seleksi, pencatatan, pengamanan penyakit dan lain-lain.
5. Menghemat pengeluaran usaha agribisnis peternakan, terutama efisiensi penggunaan lahan dan biaya bangunan kandang.
6. Meningkatkan nilai tambah usaha peternakan karena kotoran ternak dapat ditampung dalam suatu tempat untuk diolah menjadi pupuk organik dan energi gas bio.
7. Memudahkan Dinas Peternakan dan Dinas/Instansi terkait dalam membina, membimbing dan memberikan pelayanan kepada para petani peternak.

b. Sistem Lar/So

Pola pengembangan peternakan sapi di Pulau Sumbawa akan dilakukan dengan Sistem Padang Penggembalaan Ternak (atau dalam bahasa Sumbawa disebut LAR atau SO dalam bahasa Bima/Dompu).

Lar/So adalah lokasi atau hamparan lahan luas yang digunakan masyarakat untuk tempat menggembalakan ternak. Sistem Lar/So merupakan pola usaha peternakan sapi yang menggunakan padang penggembalaan dengan perhitungan daya tampung lahan sebagai basis kegiatan usaha produksi sapi bibit dan sapi potong.

Penetapan pengembangan sistem Lar/So atas dasar pertimbangan kultur pemeliharaan sapi yang bersifat ekstensif, ternak dipelihara lepas di padang penggembalaan, ketersediaan lahan masih luas dan prospek pengembangan sapi dapat ditingkatkan dengan skala usaha yang lebih besar.

Pengembangan Sistem LAR-SO harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yaitu :

- Merupakan lokasi pelepasan ternak oleh masyarakat.
- Wilayah Lar/So ditetapkan dengan peraturan dan atau keputusan Bupati.
- Tanah masyarakat dan telah disepakati untuk diajdikan wilayah Lar/So.
- Memiliki kelembagaan kelompok yang beranggotakan para peternak .
- Memiliki tata tertib atau kesepakatan bersama yang wajib ditaati seluruh peternak dalam wilayah Lar/So.
- Secara teknis, sosial budaya dan ekonomis sangat layak dijadikan Lar/So.

Adapun manfaat sistem Lar/So sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas tampung ternak di padang penggembalaan.
- Mengembangkan peternakan terintegrasi dengan sektor terkait.
- Memudahkan peternak dalam mengembalakan ternaknya.
- Meningkatkan populasi dan produksi ternak.
- Meningkatkan skala pemilikan dan pendapatan peternak.
- Memudahkan Dinas Peternakan dan Dinas/Instansi terkait dalam membina, membimbing dan memberikan pelayanan kepada para petani peternak.

Potensi padang penggembalan ternak di Pulau Sumbawa tersebar pada hampir semua kecamatan dengan luas mencapai 68.544,65 Ha. Sedangkan potensi lahan untuk kebun untuk penanaman Hijauan Pakan Ternak (HMT) mencapai 17.013,25 Ha.

BAB IV

ANALISIS DINAMIKA PERCEPATAN

Analisis ini pada prinsipnya merupakan perbandingan prediksi pertumbuhan populasi, produksi, produktivitas ternak sapi, dan nilai ekonominya antara pada pengembangan peternakan sapi program percepatan dan pada program reguler.

4.1. Pertumbuhan Populasi Sapi

Pertumbuhan populasi sapi 5 tahun ke depan diupayakan mengalami peningkatan 10-15%/tahun, sehingga akhir Tahun 2013 populasi mencapai 1.032.507 ekor, dan akhir Tahun 2018 mencapai 1.471.420 ekor. Jumlah ini ditetapkan sebagai jumlah optimum sesuai daya dukung wilayah Nusa Tenggara Barat. Peningkatan populasi tersebut dapat dicapai hanya jika dilakukan kegiatan yang mendukung percepatan peningkatan populasi, yaitu (1) peningkatan kuantitas dan kualitas sapi betina bibit dan sapi pejantan, (2) peningkatan kuantitas dan kualitas pakan, (3) peningkatan skala usaha dan teknik budidaya, (4) peningkatan penanganan kesehatan ternak, dan (5) perbaikan manajemen kelembagaan bidang peternakan sapi. Berdasarkan asumsi koefisien teknis usaha sapi perbibitan dan adanya kebijakan percepatan dalam pembangunan peternakan sapi, dapat diprediksi pertumbuhan sapi 10 tahun ke depan adalah sebagai berikut (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Pertumbuhan populasi sapi antara program reguler dan percepatan.

Tahun	Populasi Proreg (ekor)	Populasi Proper (ekor)	TP Proper (ekor)	TP Proper (ekor)	TP Proreg (%)	TP Proper (%)	PP Proper dan Proreg (ekor)
2008	546.114	546.114	-	-	-	-	-
2009	587.247	602.333	41,161	56,247	7,5	10	15.086
2010	631.511	683.347	44,264	81,014	7,5	13	51.836
2011	679.111	780.724	47,600	97,377	7,5	14	101.613
2012	730.299	897.832	51,188	117,108	7,5	15	167.533
2013	785.346	1.032.507	55,047	134,675	7,5	15	247.161
2014	844.541	1.166.733	59,195	134,226	7,5	13	322.192
2015	908.198	1.283.407	63,657	116,674	7,5	10	375.209
2016	976.654	1.360.411	68,456	77,004	7,5	6	383.757
2017	1.050.269	1.414.827	73,615	54,416	7,5	4	364.558
2018	1.129.433	1.471.420	79,164	56,593	7,5	4	341.987

Keterangan: Proreg = program reguler; Proper = program percepatan; TP = tambahan populasi; PP = perbedaan populasi.

Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa dalam periode Tahun 2009-2013, persentase peningkatan populasi semakin besar, dari 10% menjadi 15%, dan setelah Tahun 2013 persentase peningkatan populasi cenderung terus menurun hingga tercapai populasi sapi optimal, yaitu sekitar 1,5 juta ekor. Periode Tahun 2009-2013 merupakan periode percepatan, sedangkan setelah Tahun 2013 merupakan periode pemeliharaan untuk menjaga kestabilan populasi optimal. Pada periode percepatan diperlukan dukungan kebijakan, strategi, dan kegiatan-kegiatan yang selektif, terutama yang langsung dapat berpengaruh terhadap peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas ternak sapi. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tentu saja harus dialokasikan dana yang cukup dan penggunaan dana secara efektif dan efisien.

Perbedaan laju pertumbuhan populasi sapi antara jika pengembangan sapi tanpa program percepatan (reguler) dan jika dengan program percepatan terlihat pada Grafik 4.1 berikut.

4.2. Pertumbuhan Produksi dan Produktivitas Sapi

4.2.1. Kelahiran Pedet

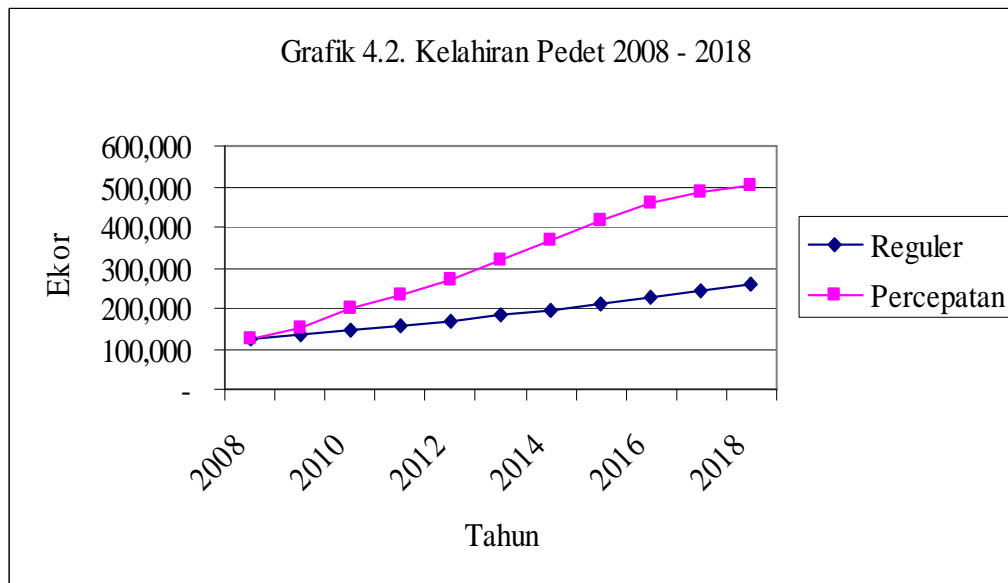
Jumlah kelahiran pedet sangat menentukan produksi ternak sapi. Upaya `percepatan peningkatan kelahiran pedet dilakukan dengan cara memperpendek jarak kelahiran dari 18 bulan menjadi 14 bulan atau dari angka kelahiran 66,7% menjadi 73-85% induk sapi. Pertumbuhan jumlah kelahiran pedet antara jika dilaksanakan program percepatan dan jika tanpa program percepatan adalah sebagai berikut (Tabel 4.2). Dalam Tabel 4.2 terlihat bahwa perbedaan jumlah kelahiran antara jika dilaksanakan program percepatan dan jika tanpa program percepatan sangat signifikan, mulai Tahun 2012 telah mampu memberikan tambahan di atas 100.000 ekor. Dari jumlah kelahiran pedet diasumsikan 63% lahir betina dan 37% lahir jantan. Dari pedet betina tersebut akan digunakan sebagai calon induk dan bibit betina yang akan dijual ke luar NTB.

Tabel 4.2. Pertumbuhan jumlah kelahiran pedet pada program percepatan dan tanpa program percepatan.

Tahun	Populasi Pedet Proreg	Populasi Pedet Proper	PP pedet Proreg dan Proper (ekor)	TP Proreg	TP Proper	TP Proreg (%)	TP Proper (%)
2008	126.548	126.548	-				
2009	136.080	151.484	15.404	9.532	24.936	7.53	19.70
2010	146.337	199.673	53.336	10.257	48.189	7.54	31.81
2011	157.367	232.338	74.971	11.030	32.665	7.54	16.36
2012	169.229	272.082	102.853	11.862	39.744	7.54	17.11
2013	181.098	320.526	138.542	12.755	48.444	7.54	17.80
2014	195.701	368.605	172.904	13.717	48.079	7.54	15.00
2015	210.452	416.524	206.072	14.751	47.919	7.54	13.00
2016	226.315	458.176	231.861	15.863	41.652	7.54	10.00
2017	243.374	485.667	242.293	17.059	27.491	7.54	6.00
2018	261.718	505.093	243.375	18.344	19.426	7.54	4.00

Dalam upaya memperbanyak induk sapi selama periode percepatan (2009-2013), pemerintah NTB perlu mengeluarkan kebijakan pembatasan pengeluaran sapi betina bibit untuk sementara waktu. Sebelum Tahun 2009, pengeluaran sapi bibit mencapai 13.000 ekor, namun melalui program NTB BSS pengeluaran sapi bibit selama 3 tahun (2009-2011) dapat dikurangi menjadi sekitar 8.000 ekor per tahun. Pengurangan sapi bibit ke luar daerah pada tahun tertentu secara langsung akan menambah induk sapi pada tahun berikutnya. Dengan bertambahnya induk sapi maka jumlah kelahiran pedet pun bertambah dan dampaknya jumlah populasi sapi turut meningkat. Kebijakan pembatasan pengeluaran sapi bibit selama tiga tahun sangat diperlukan agar setelah Tahun 2013 keinginan untuk menjadikan NTB sebagai Bumi Sejuta Sapi dapat diwujudkan. Dengan demikian, peranan NTB dalam mendukung Program Swasembada Daging Sapi Nasional teroptimalisasikan.

Perbedaan laju pertumbuhan kelahiran pedet antara yang melalui program percepatan dan yang tidak melalui program percepatan dilukiskan dalam Grafik 4.2. Pada Grafik 4.2. tampak bahwa, pada program percepatan jumlah kelahiran pedet terus meningkat sampai Tahun 2017, setelah itu jumlah kelahiran pedet relatif tetap. Hal ini mengindikasikan jika populasi sapi, terutama populasi induk telah mencapai optimal.



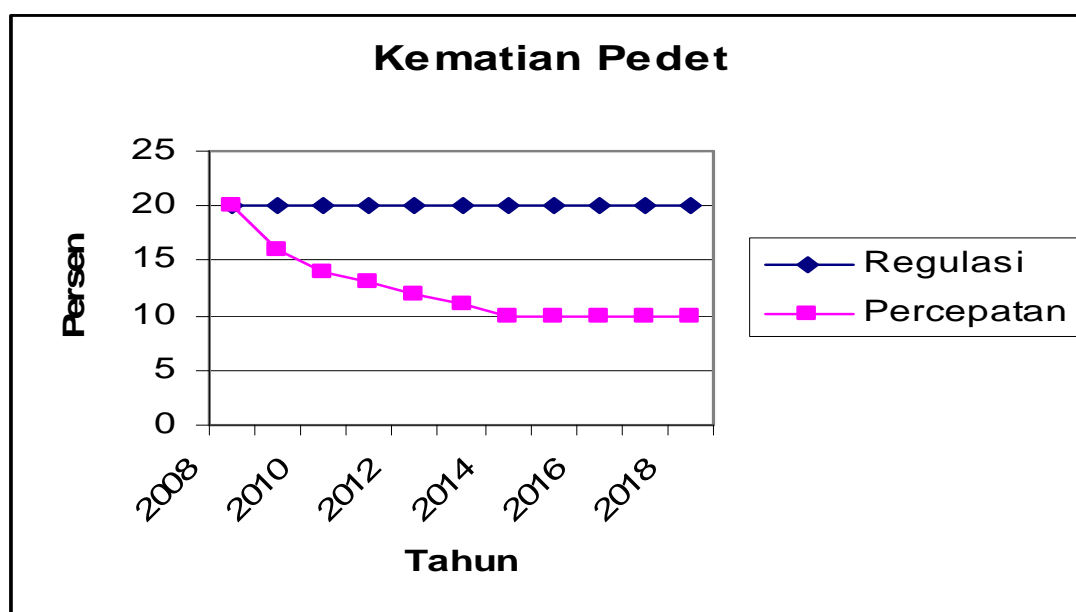
4.2.2. Kematian Ternak Sapi

Angka kematian ternak terutama kematian pedet sangat mempengaruhi populasi dan produksi ternak sapi. Melalui program percepatan diharapkan dapat menurunkan tingkat kematian ternak sapi dari 20% menjadi 10% total kelahiran pedet. Perbandingan jumlah kematian ternak sapi antara jika dilaksanakan program percepatan dan tanpa percepatan dapat dilihat pada Tabel 4.3. Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah kematian ternak sapi pada tahun 2013, dengan program percepatan tercatat 32.053 ekor atau 11%, sedangkan tanpa program percepatan (reguler) tercatat 36.397 ekor atau 25% dari total jumlah kelahiran pedet. Pada tahun-tahun setelah 2013 diharapkan persentase kematian ternak sapi masih dapat diturunkan. Upaya menurunkan kematian ternak sapi selain melalui kegiatan-kegiatan pengendalian kesehatan hewan, dapat pula dilakukan dengan cara memperbaiki manajemen reproduksi, tatalaksana pemeliharaan, dan pakan. Perbedaan jumlah kematian sapi antara jika dilaksanakan program percepatan dan tanpa percepatan dapat dilihat pada Grafik 4.3. Walaupun jumlah kematian ternak sapi terlihat meningkat seperti nampak pada Grafik 4.3, namun persentase kematian pada program percepatan menurun cukup signifikan. Data penurunan kematian ternak sapi dari Tahun 2008 sampai Tahun 2013 berturut-turut adalah: 25%, 16%, 15%, 14%, 13%, dan 11% dari jumlah kelahiran. Dengan makin meningkatnya kelahiran sapi dan menurunnya kematian sapi maka populasi sapi meningkat secara nyata

Tabel 4.3. Jumlah kematian ternak sapi untuk program percepatan dan tanpa program percepatan.

Tahun	Populasi Kematian Proreg (ekor)	Populasi Kematian Proper (ekor)	Populasi Kelahiran Proreg (ekor)	Populasi Kelahiran Proper (ekor)	Persentase Kematian Proreg (%)	Persentase Kematian Proper (%)
2008	25.310	25.310	101.238	101.238	25,00	25,00
2009	27.216	21.208	108.864	130.276	25,00	16,28
2010	29.267	25.958	117.070	173.715	25,00	14,94
2011	31.473	27.881	125.894	204.457	25,00	13,64
2012	33.846	29.929	135.383	242.153	25,00	12,36
2013	36.397	32.053	145.587	288.473	25,00	11,11
2014	39.140	36.861	156.561	331.744	25,00	11,11
2015	42.090	41.652	168.362	374.872	25,00	11,11
2016	45.263	45.818	181.052	412.358	25,00	11,11
2017	48.675	48.567	194.699	437.100	25,00	11,11
2018	52.344	50.509	209.374	454.584	25,00	11,11

Grafik 4.3. Kematian Pedet 2008-2018



4.2.3. Panen Pedet

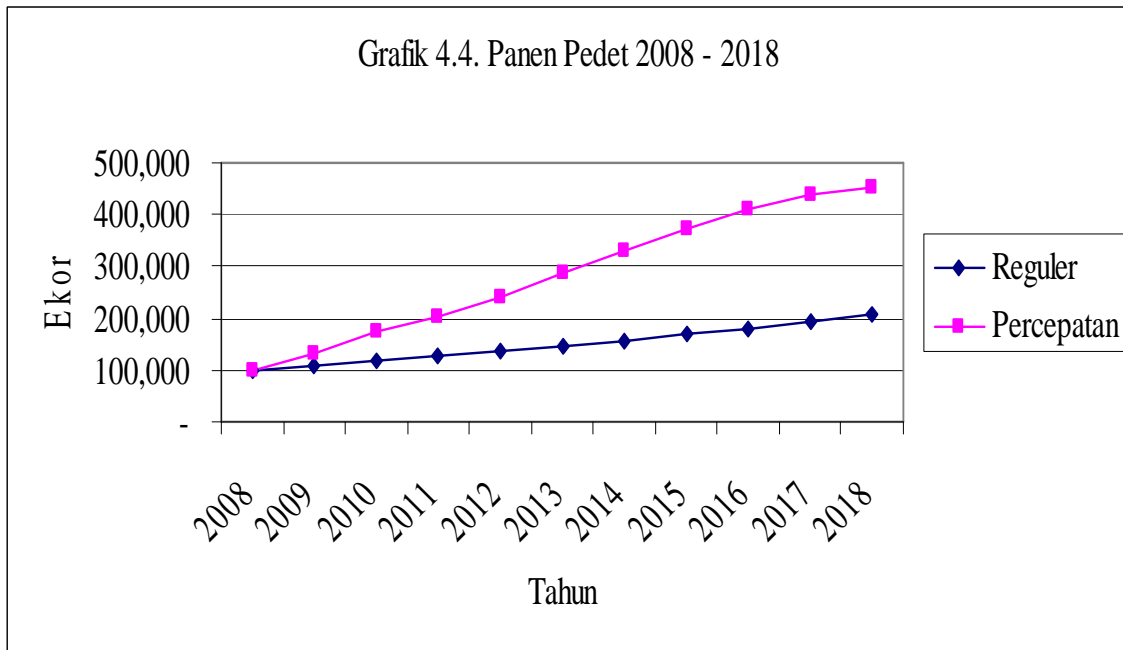
Panen pedet merupakan produksi usaha ternak sapi setiap tahun yang merupakan selisih antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian pedet dalam setahun. Prediksi jumlah panen pedet dalam 10 tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 4.4. Produksi usaha ternak sapi atau jumlah panen pedet seperti tampak pada Tabel 4.4 akan digunakan sebagai sapi betina bibit pengganti induk (*replacement stocks*), sapi betina bibit yang dijual ke luar NTB, sapi bakalan untuk penggemukan dalam daerah, sapi potong jantan untuk dipotong di dalam daerah, dan sapi potong jantan untuk dijual ke luar NTB. Dalam upaya memperbanyak jumlah induk, perlu dilakukan pembatasan pengeluaran sapi betina bibit untuk sementara. Dengan membatasi pengeluaran pada Tahun 2009, diharapkan pada Tahun 2010 jumlah induk sapi meningkat sehingga pada gilirannya jumlah panen pedet juga meningkat. Pembatasan pengeluaran pada Tahun 2010 akan berdampak pada peningkatan panen pedet pada Tahun 2011, dan seterusnya. Kebijakan pembatasan pengeluaran sapi bibit perlu dilakukan selama tiga tahun (2009-2011), dengan harapan pada tahun 2013 sudah terjadi booming pedet. Setelah tahun 2013, pengeluaran sapi bibit ke luar daerah dapat dilakukan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan kestabilan populasi induk.

Tabel 4.4. Jumlah panen pedet antara program percepatan dan program tanpa Percepatan.

Tahun	Panen Pedet Proreg (ekor)	Panen Pedet Proper (ekor)	P P Proreg dan Proper (ekor)	TP Proreg (ekor)	TP Proper (ekor)	TP Proreg (%)	TP Proper (%)
2008	101.238	101.238	-				
2009	108.864	130.276	21.412	7.626	29.038	7,53	28,68
2010	117.070	173.715	56.645	8.206	43.439	7,54	33,34
2011	125.894	204.457	78.563	8.824	30.742	7,54	17,70
2012	135.383	242.153	106.770	9.489	37.696	7,54	18,44
2013	145.587	288.473	142.886	10.204	46.320	7,54	19,13
2014	156.561	331.744	175.183	10.974	43.271	7,54	15,00
2015	168.362	374.872	206.510	11.801	43.128	7,54	13,00
2016	181.052	412.358	231.306	12.690	37.486	7,54	10,00
2017	194.699	437.100	242.401	13.647	24.742	7,54	6,00
2018	209.374	454.584	245.210	14.675	17.484	7,54	4,00

Keterangan: PP = Perbedaan populasi pedet; Proreg = program reguler; Proper = program percepatan; TP = tambahan populasi panen pedet.

Perbedaan jumlah panen pedet pada program percepatan dan program reguler terlukiskan pada Grafik 4.4. Dalam Tabel 4.4. dan Grafik 4.4 terlihat bahwa, dengan program percepatan jumlah panen pedet yang diperoleh hampir mencapai 300.000 ekor pada Tahun 2013 dan naik menjadi sebanyak 450.000 ekor pada Tahun 2018. Jumlah panen pedet ini dapat diartikan sebagai produksi usaha ternak sapi. Setelah Tahun 2018, jumlah panen pedet diharapkan sudah stabil (jumlah tertentu) karena populasi sapi, termasuk induk sapi, telah mencapai optimal sesuai dengan daya dukung wilayah.



4.2.4. Pemotongan Dalam Daerah

Produksi ternak sapi dipergunakan sebagai bibit pengganti induk, bibit pengganti pejantan, sapi bibit dan sapi potong yang dijual ke luar daerah, dan pemotongan untuk konsumsi dalam daerah. Prediksi jumlah pemotongan sapi dalam daerah selama 10 tahun ke depan tercantum pada Tabel 4.5. Dalam Tabel 4.5 terlihat bahwa dengan adanya program percepatan jumlah pemotongan ternak pada Tahun 2013 akan mencapai 60.255 ekor, lebih banyak dibandingkan pada program reguler, yaitu sebanyak 55.612 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program percepatan, konsumsi daging sapi oleh masyarakat NTB juga naik, hal ini secara tidak langsung akan menaikkan tingkat kesehatan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa protein hewani asal daging sangat diperlukan dalam pertumbuhan sel-sel tubuh manusia.

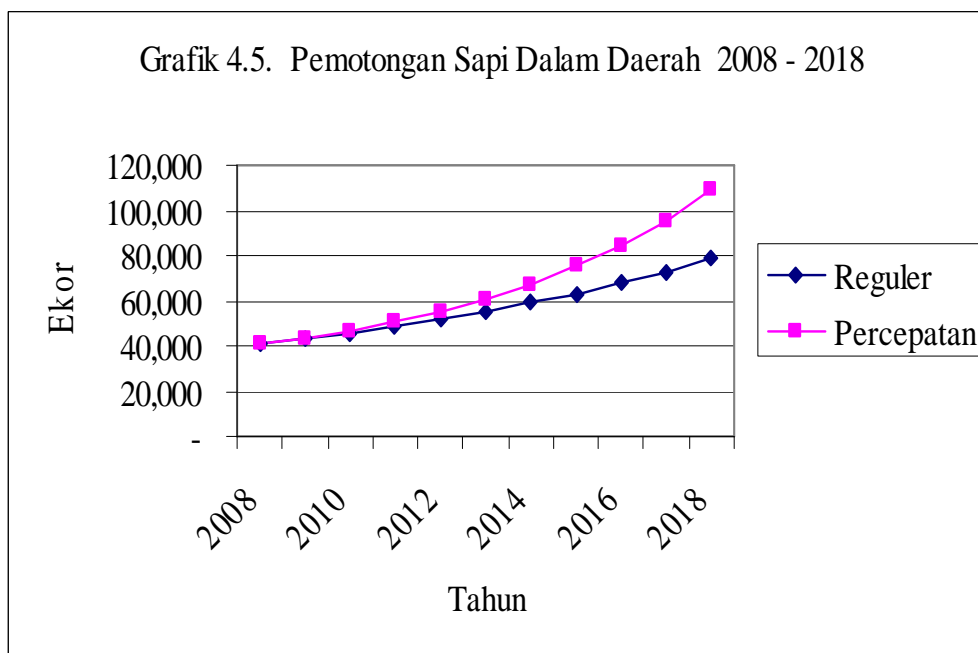
Berdasarkan jumlah pemotongan ternak sapi yang tertera Tabel 4.5 terlihat bahwa pada program reguler angka pemotongan betina produktif sekitar 20%, sedangkan pada program percepatan diasumsikan pemotongan betina produktif terus menurun sampai 10% pada Tahun 2013 dan 5% pada Tahun 2018. Penurunan angka pemotongan betina produktif ini merupakan hasil kebijakan pengendalian pemotongan betina produktif yang terus menerus dilakukan setiap tahun.

Tabel 4.5. Jumlah pemotongan sapi dalam daerah pada Program Percepatan dan Tanpa Percepatan.

Tahun	Tongnak Proreg (ekor)	Tongnak Proper (ekor)	Selisih Tongnak Proreg dan Proper (ekor)	Tambahan Tongnak Proreg (ekor)	Tambahan Tongnak Proper (ekor)	Tambahan Tongnak Proreg (%)	Tambahan Tongnak Proper (%)
2008	41.575	41.575	-				
2009	43.238	43.429	191	1.663	1.854	4,00	4,46
2010	45.400	46.727	1.327	2.162	3.298	5,00	7,59
2011	48.124	50.490	2.366	2.724	3.763	6,00	8,05
2012	51.493	54.787	3.294	3.369	4.297	7,00	8,51
2013	55.612	60.255	4.643	4.119	5.468	8,00	9,98
2014	58.949	67.185	8.236	3.337	6.930	6,00	11,50
2015	63.075	75.247	12.172	4.126	8.062	7,00	12,00
2016	68.121	84.653	16.532	5.046	9.406	8,00	12,50
2017	72.890	95.658	22.768	4.769	11.005	7,00	13,00
2018	78.721	109.050	30.329	5.831	13.392	8,00	14,00

Keterangan: Tongnak = pemotongan ternak

Perbedaan laju perkembangan pemotongan sapi dalam daerah antara jika dilaksanakan program percepatan dan tanpa program percepatan (reguler), dapat dilihat pada Grafik 4.5. Laju pemotongan sapi dalam daerah sangat tergantung pada kebutuhan konsumsi dalam daerah dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pemotongan sapi dalam daerah harus mempertimbangkan kedua faktor tersebut.



4.2.5. Pengeluaran Sapi Bibit

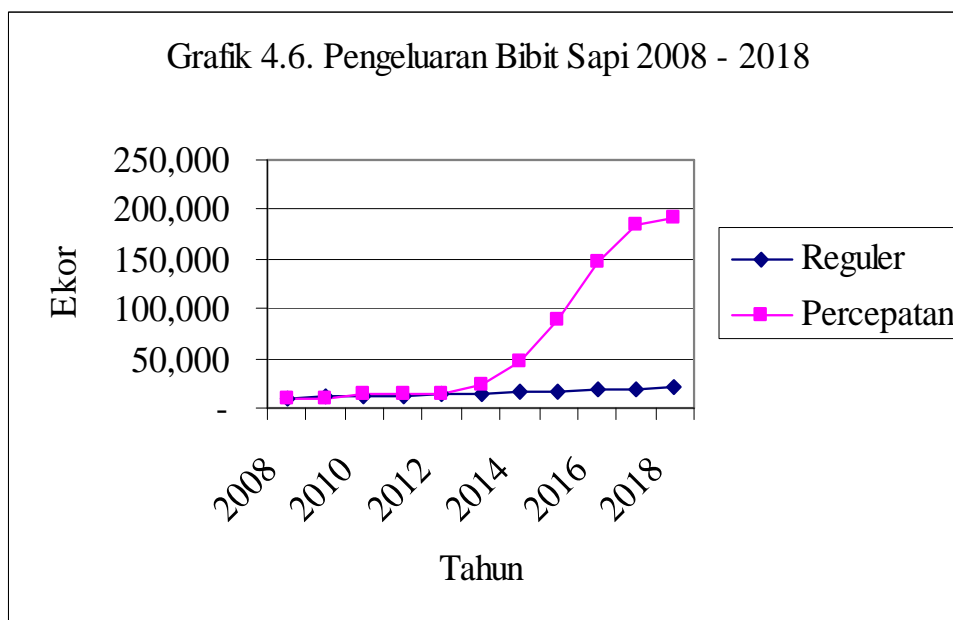
Berdasarkan hasil analisis *supply* dan *demand* dan pertimbangan kebutuhan peremajaan dan pertumbuhan populasi ternak sapi di daerah, maka jumlah sapi bibit yang dapat dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain dapat diprediksi sebagai berikut (Tabel 4.6).

Dalam Tabel 4.6 terlihat bahwa dengan program percepatan, pengeluaran bibit ternak ke luar NTB akan meningkat tajam sejak Tahun 2012. Pada tahun 2012, NTB dapat mengeluarkan ternak sapi bibit sebanyak 14.636 ekor, Tahun 2013 sebanyak 22.783 ekor, dan pada Tahun 2018 ketika populasi sapi sudah optimal menjadi sebanyak 191.533 ekor. Peningkatan pengeluaran sapi bibit yang cukup signifikan tersebut merupakan hasil kebijakan pembatasan pengeluaran sapi bibit selama tiga tahun (2009-2011). Selain itu juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang langsung dapat meningkatkan produktivitas ternak. Meningkatnya pengeluaran sapi bibit mulai Tahun 2013 tersebut akan memberikan kontribusi terhadap PSDS nasional dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) NTB.

Tabel 4.6. Jumlah sapi bibit yang dapat dikeluarkan pada Program Percepatan dan Program Tanpa Percepatan (Reguler)

Tahun	Bibit keluar Proreg (ekor)	Bibit keluar Proper (ekor)	Tambahan Bibit keluar Proreg (ekor)	Tambahan Bibit keluar Proper (ekor)	Tambahan Bibit keluar Proreg (%)	Tambahan Bibit keluar Proper (%)
2008	10.037	10.037				
2009	10.793	10.359	756	322	7,53	3,21
2010	11.606	12.858	813	2.499	7,53	24,12
2011	12.481	13.487	875	629	7,54	4,89
2012	13.422	14.636	941	1.149	7,54	8,52
2013	14.434	22.783	1.012	8.147	7,54	55,66
2014	15.521	46.850	1.087	24.067	7,53	105,64
2015	16.691	87.943	1.170	41.093	7,54	87,71
2016	17.950	148.073	1.259	60.130	7,54	68,37
2017	19.302	184.166	1.352	36.093	7,53	24,38
2018	20.757	191.533	1.455	7.367	7,54	4,00

Perbedaan laju peningkatan pengeluaran sapi bibit antara jika dilaksanakan program percepatan dan jika tanpa program percepatan, dapat dilihat pada Grafik 4.6.



4.2.6. Pengeluaran Sapi Potong

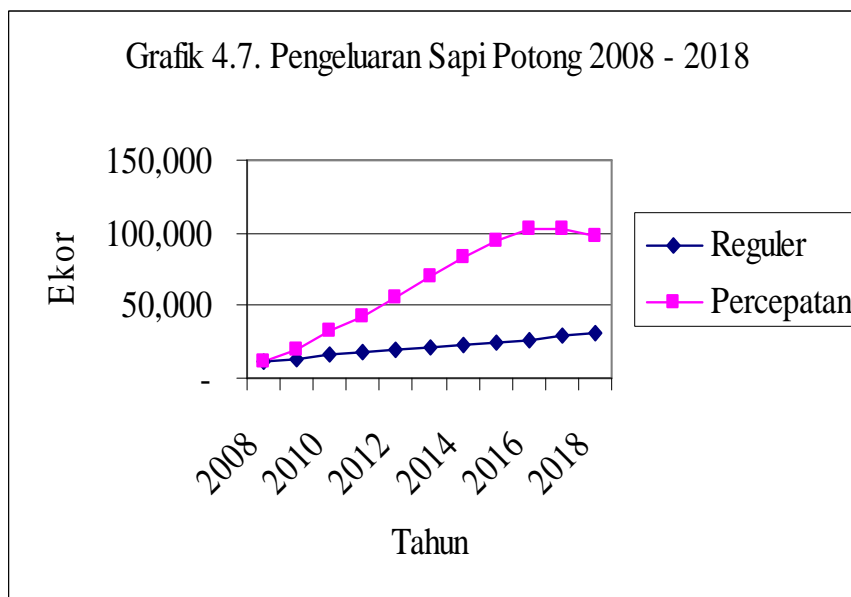
Berdasarkan hasil analisis *supply* dan *demand* dan pertimbangan kebutuhan konsumsi daging sapi dalam daerah, maka jumlah sapi potong yang dapat dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain adalah sebagai berikut (Tabel 4.7).

Tabel 4.7. Pengeluaran sapi potong pada Program Percepatan dan Program Tanpa Percepatan (Reguler)

Tahun	Pengeluaran Sapi Potong Proreg	Pengeluaran Sapi Potong Proper	Selisih	TP Proreg	TP Proper	% Proreg	% Proper
2008	11.348	11.348	-	-	-		
2009	13.672	20.242	6.570	2.324	8.894	20.48	78.37504
2010	15.799	33.117	17.318	2.127	12.875	15.56	63.60537
2011	17.688	43.103	25.415	1.889	9.986	11.96	30.1537
2012	19.280	55.622	36.342	1.592	12.519	9.00	29.04438
2013	20.495	70.761	50.266	1.215	15.139	6.30	27.21765
2014	22.895	83.484	60.589	2.400	12.723	11.71	17.98024
2015	24.938	95.008	70.070	2.043	11.524	8.92	13.80384
2016	26.526	102.628	76.102	1.588	7.620	6.37	8.020377
2017	28.891	102.860	73.969	2.365	232	8.92	0.226059
2018	30.732	97.409	66.677	1.841	(5.451)	6.37	-5.29944

Keterangan: TP = tambahan pengeluaran

Perbedaan laju perkembangan pengeluaran sapi potong antara program reguler dan NTB Bumi Sejuta Sapi dapat dilihat pada Grafik 4.7 berikut ini .



4.3. Dampak Ekonomi Program Percepatan

Program NTB BSS diharapkan member dampak yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat (ekonomi masyarakat) sebagai konsekuensi dari meningkatnya produksi usaha ternak sapi program percepatan. Pendapatan masyarakat dari usaha ternak sapi terdiri dari nilai ekonomi sapi yang dipotong dalam daerah, nilai penjualan sapi bibit dan sapi potong keluar daerah.

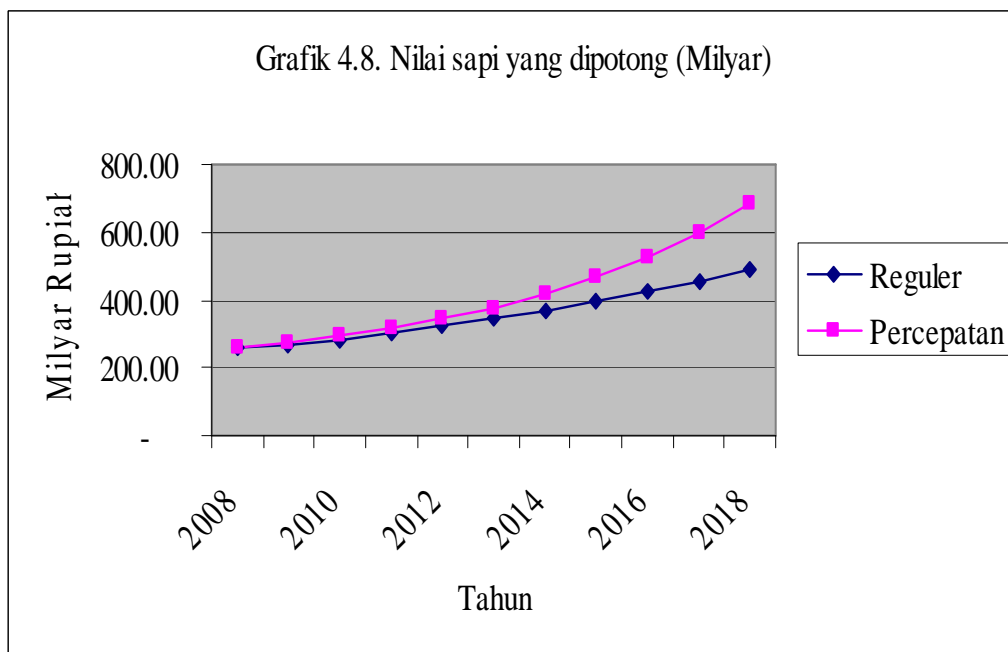
4.3.1. Nilai Ekonomi Sapi Yang Dipotong Dalam Daerah

Untuk menghitung nilai ekonomi sapi yang dipotong dalam daerah NTB digunakan asumsi harga bobot hidup sapi potong. Rp. 25.000/kg. Jika diasumsikan rata-rata bobot badan ternak sapi yang dipotong sebesar 250 kg/ekor, maka harga sapi yang dipotong dalam daerah adalah Rp. 6.250.000,- per ekor. Berdasarkan asumsi tersebut, selama 10 tahun ke depan total nilai ekonomi sapi yang dipotong dalam daerah terpredikdikan seperti pada Tabel 4.8. Berdasarkan Tabel 4.8 di atas terlihat bahwa pada Tahun 2013 program percepatan mampu menghasilkan nilai ekonomi sapi yang dipotong dalam daerah sebesar Rp. 376,59 milyar. Kemudian pada tahun 2018 ketika populasi mencapai optimal nilai ekonominya mencapai Rp. 681,58 milyar. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya nilai ekonomi sapi yang dipotong dalam daerah akan berada di sekitar jumlah Rp. 681,58 milyar tersebut.

Tabel 4.8. Nilai Ekonomi Sapi yang Dipotong di Dalam Daerah

Tahun	Sapi Yang Dipotong (Ekor)		Nilai Sapi Yang Dipotong (Milyar Rupiah)	
	Program Reguler	Program Percepatan	Program Reguler	Program Percepatan
2008	41.575	41.575	259.84	259.84
2009	43.238	43.429	270.24	271.43
2010	45.400	46.727	283.75	292.04
2011	48.124	50.490	300.78	315.56
2012	51.493	54.787	321.83	342.42
2013	55.612	60.255	347.58	376.59
2014	58.949	67.185	368.43	419.91
2015	63.075	75.247	394.22	470.29
2016	68.121	84.653	425.76	529.08
2017	72.890	95.658	455.56	597.86
2018	78.721	109.050	492.01	681.56

Perbedaan nilai ekonomi sapi potong dalam daerah antara program percepatan dan program reguler dapat dilihat pada Grafik 4.8.



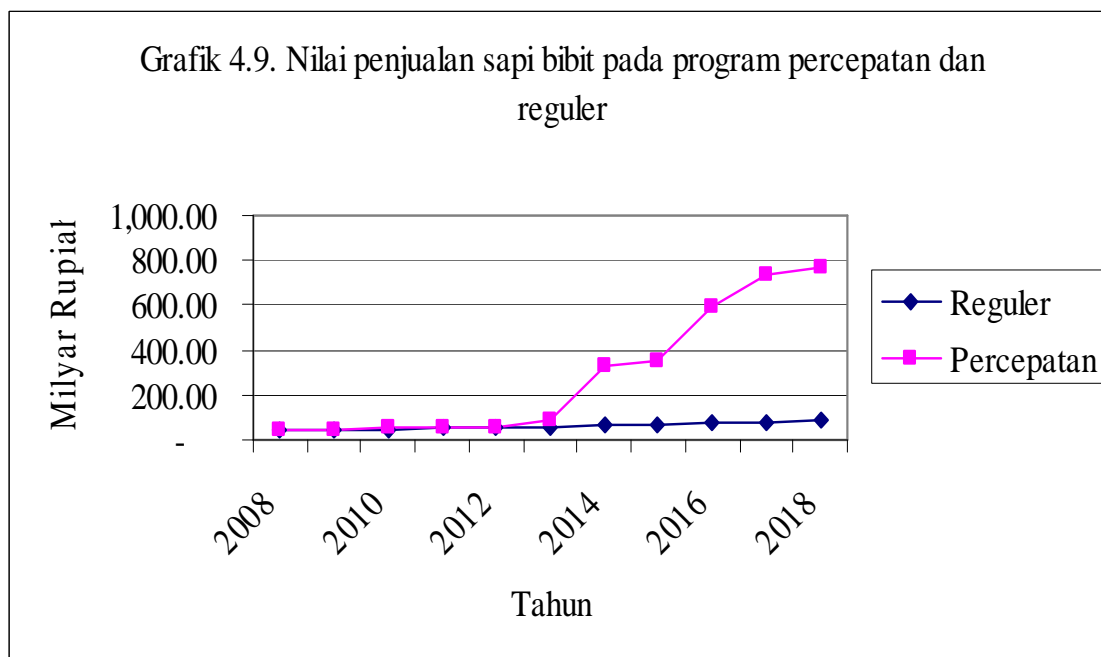
4.3.2. Nilai Penjualan Sapi Bibit Keluar Daerah

Perhitungan nilai penjualan sapi bibit keluar daerah didasarkan pada asumsi harga sapi bibit di NTB rata-rata Rp. 4.000.000.-/ekor. Berdasarkan harga tersebut, nilai hasil penjualan sapi bibit ke luar daerah NTB terprediksikan seperti pada Tabel 4.9. Dalam Tabel 4.9 nampak bahwa dengan adanya program percepatan, nilai penjualan sapi bibit pada Tahun 2013 mencapai Rp.91.13 milyar dan pada Tahun 2018 ketika populasi sapi telah mencapai optimum meningkat menjadi Rp.766.13 milyar atau hampir 10 kali lipat daripada nilai penjualan sapi bibit program reguler. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya nilai penjualan sapi bibit tetap di sekitar nilai Rp. 766.13 milyar karena populasi sapi sudah optimal. Pada program reguler, nilai penjualan sapi bibit pada tahun 2013 hanya sebesar Rp. 57,74 milyar dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 83,03 milyar. Dengan meningkatnya nilai penjualan sapi bibit ke luar daerah berarti pendapatan masyarakat NTB, khususnya peternak sapi pembibitan juga meningkat, demikian pula pendapatan asli daerah (PAD) NTB.

Tabel 4.9. Nilai penjualan ternak sapi bibit ke luar daerah pada program reguler dan program percepatan.

Tahun	Sapi Bibit Yang Keluar(Ekor)		Nilai penjualan sapi bibit (milyar rupiah)	
	Program Reguler	Program Percepatan	Program Reguler	Program Percepatan
2008	10,037	10,037	40,15	40,15
2009	10,793	10,359	43,17	41,44
2010	11,606	12,858	46,42	51,43
2011	12,481	13,487	49,92	53,95
2012	13,422	14,636	53,69	58,54
2013	14,434	22,783	57,74	91,13
2014	15,521	83,484	62,08	333,94
2015	16,691	87,943	66,76	351,77
2016	17,950	148,073	71,80	592,29
2017	19,302	184,166	77,21	736,66
2018	20,757	191,533	83,03	766,13

Perbedaan nilai penjualan sapi bibit antara adanya program percepatan dan tanpa program percepatan (reguler) dapat digambarkan seperti pada Grafik 4.9.



Dalam Grafik4.9 nampak bahwa setelah Tahun 2013 terjadi *booming* pengeluaran sapi bibit. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang ketat selama 5 tahun (2009-2013), terutama kebijakan pengendalian pengeluaran sapi bibit ke luar daerah.

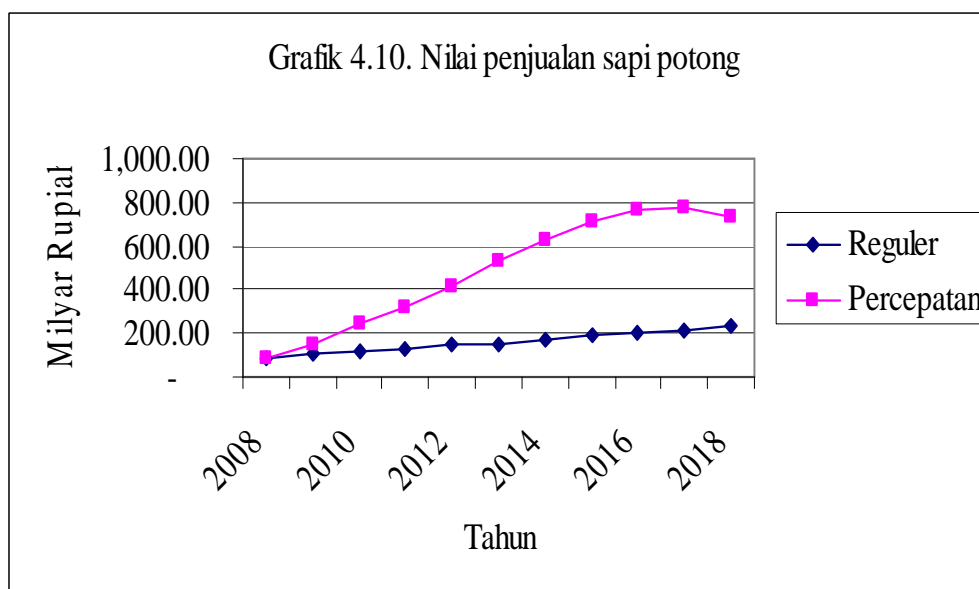
4.3.3. Nilai Pengeluaran Sapi Potong

Perhitungan nilai penjualan sapi potong yang dijual ke luar daerah didasarkan pada asumsi-asumsi berikut: (1) harga sapi potong rata-rata Rp. 25.000/kg berat hidup dan (2) berat hidup sapi potong yang dijual ke luar daerah rata-rata 300kg. Dengan demikian harga sapi potong yang dijual ke luar daerah rata-rata Rp. 7.500.000,- per ekor. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka nilai sapi potong yang dijual ke luar NTB terprediksikan seperti pada Tabel 4.10. Dalam Tabel 6.10 terlihat bahwa dengan program percepatan, nilai penjualan sapi potong ke luar NTB pada Tahun 2013 mencapai Rp.530,71 milyar dan pada Tahun 2018 mencapai Rp.730,57 milyar. Nilai ini jauh lebih tinggi dari nilai penjualan sapi potong pada tahun yang sama jika tidak ada program percepatan. Hal ini menunjukkan bahwa NTB memiliki potensi sebagai daerah sumber sapi bibit dan sumber sapi potong. Oleh karena itu, untuk menjaga kedua potensi tersebut perlu dilakukan pemetaan wilayah, mana wilayah untuk pengembangan sapi pembibitan, dan mana wilayah untuk pengembangan sapi penggemukan.

Tabel 4.10. Nilai penjualan sapi potong ke luar NTB pada program percepatan dan tanpa percepatan (reguler).

Tahun	Nilai penjualan sapi potong (Milyar)		Jumlah Sapi Potong yang dijual ke luar NTB Ekor)	
	Reguler	Percepatan	Reguler	Percepatan
2008	85,11	85,11	11,348	11,348
2009	102,54	151,82	13,672	20,242
2010	118,49	248,38	15,799	33,117
2011	132,66	323,27	17,688	43,103
2012	144,60	417,17	19,280	55,622
2013	153,71	530,71	20,495	70,761
2014	171,71	626,13	22,895	83,484
2015	187,04	712,56	24,938	95,008
2016	198,95	769,71	26,526	102,628
2017	216,68	771,45	28,891	102,860
2018	230,49	730,57	30,732	97,409

Perbedaan nilai pengeluaran sapi potong antara jika dilaksanakan program percepatan dan jika tanpa program percepatan (reguler) dapat dilihat pada Grafik 4.10 berikut.



4.3.4. Total Nilai Produksi Sapi di NTB

Total nilai produksi sapi di NTB terdiri dari nilai sapi yang dipotong dalam daerah, nilai sapi bibit yang dijual ke luar daerah, dan nilai sapi potong yang dijual ke luar daerah. Tabel 4.11 dan 4.12 menyajikan total nilai produksi sapi yang merupakan rekapitulasi dari nilai-nilai ekonomi pada Tabel 4.8, 4.9, dan 4.10.

Tabel 4.11. Nilai produksi sapi di NTB tanpa program percepatan (reguler)

Tahun	Nilai Produksi Sapi (milyar rupiah)			
	Sapi dipotong dalam daerah	Sapi bibit yang dijual	Sapi potong yang dijual	Jumlah nilai
2009	270,24	43,17	102,54	415,95
2010	283,75	46,42	118,49	448,66
2011	300,78	49,92	132,66	483,36
2012	321,83	53,69	144,60	520,12
2013	347,58	57,74	153,71	559,03
2014	368,43	62,08	171,71	602,22
2015	394,22	66,76	187,04	648,02
2016	425,76	71,80	198,95	696,51
2017	455,56	77,21	216,68	749,45
2018	492,01	83,03	230,49	805,53

Tabel 4.12. Nilai produksi sapi di NTB dengan program percepatan

Tahun	Nilai Produksi Sapi (milyar rupiah)			
	Sapi dipotong dalam daerah	Sapi bibit yang dijual	Sapi potong yang dijual	Jumlah nilai
2009	271,43	41,44	20,242	333,112
2010	292,04	51,43	33,117	376,587
2011	315,56	53,95	43,103	412,613
2012	342,42	58,54	55,622	456,582
2013	376,59	91,13	70,761	538,481
2014	419,91	333,94	83,484	837,334
2015	470,29	351,77	95,008	917,068
2016	529,08	592,29	102,628	1,224, 000
2017	597,86	736,66	102,860	1,437,380
2018	681,56	766,13	97,409	1,545,100

Apabila dibandingkan nilai produksi sapi antara program percepatan dan tanpa program percepatan sebagaimana terlihat pada masing-masing Tabel 6.11 dan 6.12, ternyata program percepatan menghasilkan nilai produksi sapi yang jauh lebih tinggi daripada program reguler (lihat Tabel 4.13).

Tabel 4.13. Perbandingan nilai produksi sapi antara program percepatan dan reguler.

Tahun	Nilai Produksi Program Reguler (milyar rupiah)	Nilai Produksi Program Percepatan (milyar rupiah)
2009	415,95	333,112
2010	448,66	376,587
2011	483,36	412,613
2012	520,12	456,582
2013	559,03	538,481
2014	602,22	837,334
2015	648,02	917,068
2016	696,51	1.224, 000
2017	749,45	1.437,380
2018	805,53	1.545,100
Jumlah	5.928,85	6.854,.257

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun program percepatan mampu menghasilkan nilai produksi sebesar Rp. 6.854,.257 milyar atau Rp.925,41 milyar lebih tinggi dari pada program reguler. Nilai ini belum termasuk nilai tambahan populasi pada program percepatan, yaitu 341.987 ekor. Dengan perkiraan harga rata-rata Rp. 3.500.000,- per ekor maka nilai tambahan populasi tersebut sebesar Rp. 1.196,954 milyar. Dengan demikian secara keseluruhan, program NTB BSS dalam kurun waktu 10 tahun mampu menghasilkan nilai ekonomi Rp. 2.021,864 milyar lebih tinggi dari pada program reguler.

BAB V

KELUARAN NTB BUMI SEJUTA SAPI

NTB BSS adalah gerakan masyarakat dalam rangka melakukan akselerasi pengembangan peternakan sapi di NTB, sehingga populasi sapi pada saat ini 546.114 ekor dapat ditingkatkan menjadi 1.000.000 ekor pada tahun 2013 dan menjadikan peternakan sapi sebagai lokomotif penggerak atau pengungkit sektor ekonomi lainnya.

Kegiatan akselerasi tersebut menyangkut beberapa indikator yaitu peningkatan jumlah induk produktif dan pejantan terseleksi, peningkatan kelahiran dan penurunan angka kematian pedet, pengendalian pemotongan betina produktif dan pengeluaran ternak bibit, ditunjang dukungan pemasukan sapi bibit dan ternak potong dari luar daerah, peningkatan SDM dan kelembagaan peternak, sarana dan prasarana peternakan.

Keluaran program NTB Bumi Sejuta Sapi adalah :

1. Terwujudnya peternakan sapi terintergrasi dengan mengembangkan kearifan lokal melalui sistem kandang kolektif dan padang penggembalaan (Lar/So), sehingga pada tahun 2013 tercapainya populasi sapi 1.000.000 ekor;
2. Tercapainya grade (kelas) A dan B sapi ras bali NTB sesuai standar;
3. Tercapainya swasembada daging menunjang ketahanan pangan;
4. Terbangunnya pabrik pakan ternak ruminansia di sentra-sentra produksi;
5. Berkembangnya industri hilir dibidang peternakan ;
6. Meningkatkan dukungan terhadap pengembangan pariwisata;
7. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan peternak serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja 344.000 orang.

BAB VI

PROGRAM AKSI NTB BSS

Dalam bab ini dibahas komponen-komponen Program Aksi yaitu (1) Isu Strategis, (2) Kebijakan, (3) Kegiatan, (4) Sasaran, (5) Lokasi, (6) Pembiayaan, (7) Penanggung Jawab.

6.1. Isu Strategis

Isu strategis dalam NTB BSS dikonsentrasikan pada 7 (tujuh) permasalahan yang paling penting dalam pengembangan sapi di NTB, yaitu :

- 1) Populasi, produksi, dan produktivitas ternak sapi belum optimal;
- 2) Tata ruang padang penggembalaan belum ada sehingga pemanfaatannya belum optimal;
- 3) Pemanfaatan teknologi pakan, lahan berbasis pakan, dan limbah pertanian/industri belum optimal;
- 4) Penyediaan daging ASUH masih terbatas;
- 5) Pengembangan SDM dan kelembagaan belum efektif dan efisien;
- 6) Sarana dan prasarana untuk pengembangan peternakan sapi belum memadai;
- 7) Investasi dalam bidang peternakan masih sangat terbatas.

6.2. Kebijakan

Kebijakan dalam NTB BSS adalah keputusan dan komitmen penentu kebijakan tentang upaya-upaya strategis untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi dalam isu strategis. Kebijakan-kebijakan yang penting adalah sebagai berikut:

6.2.1. Peningkatan Populasi, Produksi, dan Produktivitas

Dalam upaya peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas sapi ditetapkan empat kebijakan pokok, yaitu:

- 1) 3 S (Satu induk–Satu anak–Satu tahun): tujuan kebijakan ini untuk mengoptimalkan produktivitas induk sapi, sehingga meningkatkan jumlah kelahiran pedet;
- 2) Pengendalian pengeluaran sapi bibit betina: kebijakan ini berupa pembatasan pengeluaran sapi bibit betina selama tiga tahun pertama program NTB BSS (2009-2011), yang semula sekitar 13.000 ekor menjadi 8.500 ekor per tahun. Dengan pembatasan pengeluaran sapi bibit betina selama periode tertentu maka jumlah induk pada periode berikutnya akan meningkat;

- 3) Pengendalian pemotongan betina produktif: kebijakan ini berupa upaya pengurangan persentase pemotongan betina produktif terhadap jumlah pemotongan tercatat, dari 20% pada Tahun 2009 menjadi 10% pada Tahun 2013 dan 5% pada Tahun 2018. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan jumlah induk produktif;
- 4) Pengendalian penyakit pedet: kebijakan ini berupa upaya pengurangan jumlah kematian pedet yang diakibatkan oleh parasit dengan memberikan obat cacing gratis untuk pedet umur 1 sampai 6 bulan. Kebijakan ini penting karena hampir 70% kematian pedet diakibatkan oleh parasit;

6.2.2. Tata Ruang Padang Pengembalaan

Tata ruang padang penggembalaan di wilayah Pulau Sumbawa perlu diatur sehingga pemanfaatannya menjadi optimal. Selama ini pemanfaatan padang penggembalaan bersifat turun-temurun, tanpa melibatkan campur tangan pemerintah untuk perbaikan ataupun perlindungannya. Oleh karena, itu dalam upaya membuat tata ruang padang penggembalaan ternak diperlukan kebijakan:

- 1) MOU Gubernur dengan Bupati se-Pulau Sumbawa: dengan MOU ini dapat dibuat regulasi tata ruang dan pemanfaatan lahan-lahan yang memungkinkan untuk dijadikan padang penggembalaan;
- 2) Penerbitan sertifikat lahan untuk padang penggembalaan (Lar bahasa Sumbawa, So bahasa Bima).

6.2.3. Pemanfaatan Teknologi Pakan, Lahan Basis Pakan, dan Limbah Pertanian/ Industri

Pakan ternak merupakan faktor pembatas dalam pengembangan peternakan sapi. Sementara ini pakan ternak ruminansia, terutama sapi, berasal dari padang penggembalaan, sebagian wilayah hutan, rumput alam pada lahan-lahan yang tidak digunakan untuk pertanian, dan limbah/hasil sisa produksi pertanian dan industri. Lahan-lahan sumber pakan tersebut ke depan cenderung semakin sempit sehingga ketersediaan pakan ternak akan berkurang. Oleh karena itu, introduksi teknologi pakan ternak sangat diperlukan sehingga mengurangi ketergantungan ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi. Dalam hal ini diperlukan kebijakan:

- 1) Regulasi integrasi antar sub sektor dan lintas sektor: kebijakan ini penting karena terkait dengan pemanfaatan lahan perkebunan, kehutanan, dan pertanian tanaman pangan sebagai sumber pakan ternak. Selain itu perlu bekerja sama dengan sector lain, misalnya

dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UKM dalam pembangunan pabrik pakan ternak;

- 2) Pembangunan pabrik pakan ternak ruminansia: untuk sementara pabrik pakan ternak dibangun di wilayah Pulau Lombok terutama untuk memenuhi kebutuhan pakan sapi penggemukan.

6.2.4 Penyediaan Daging ASUH

Untuk mendukung ketahanan pangan diperlukan kebijakan peningkatan ketersediaan protein hewani dan pemotongan ternak sesuai standar baku agar diperoleh produk daging sapi yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Karenanya diperlukan kebijakan regulasi penertiban RPH dan pemasaran daging sapi.

6.2.5 Pengembangan SDM dan Kelembagaan

Peningkatan kapasitas SDM petugas dinas, penyuluh, dan peternak, serta penguatan kelembagaan peternakan sapi baik secara kuantitatif maupun kualitatif sangat dibutuhkan dalam program NTB BSS. Kebijakan-kebijakan penting yang diperlukan dalam hal ini adalah:

- 1) Revitalisasi penyuluhan peternakan: kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja penyuluh;
- 2) Pengembangan kelompok tani-ternak: kebijakan ini bertujuan agar kelompok tani-ternak menjadi lembaga pemberdayaan dengan manajemen modern, bukan hanya sekedar untuk mengatasi pencurian ternak;
- 3) Pengembangan institusi pendukung: kebijakan ini bertujuan agar institusi-institusi pendukung program NTB BSS, seperti Lembaga Perkreditan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penyuluhan, Puskesmas, Pasar Hewan, dan sebagainya dapat berfungsi optimal.

6.2.6 Sarana dan Prasarana Peternakan Sapi

Sarana dan prasarana sangat besar perannya di dalam pengembangan peternakan sapi, baik pada sub sistem hulu, sub sistem budidaya, maupun sub sistem hilir. Oleh karena itu, dalam program NTB BSS ditetapkan kebijakan perlunya pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangannya.

6.2.7. Investasi Bidang Peternakan

Pengembangan peternakan sapi di NTB memerlukan adanya sinergi antara peternakan rakyat dan perusahaan. Perusahaan budidaya sapi dapat dikembangkan di wilayah Pulau Sumbawa, sedangkan pabrik pakan ternak dan Rumah Potong Hewan modern lebih layak dibangun di wilayah Pulau Lombok. Untuk mendukung pengembangan peternakan sapi sistem perusahaan diperlukan kebijakan regulasi investasi di bidang peternakan sapi. Dengan regulasi tersebut diharapkan para investor tertarik menanamkan modalnya pada bidang peternakan sapi.

6.3. Kegiatan

Kegiatan adalah upaya untuk mencapai sasaran yang diinginkan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Secara ringkas kegiatan-kegiatan pada masing-masing kebijakan dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan 3S (Satu anak-Satu induk-Satu tahun) adalah:
 - Pengadaan dan distribusi calon induk sapi,
 - Pengadaan dan distribusi pejantan unggul,
 - Intensifikasi IB (Inseminasi Buatan),
 - Klasifikasi grade sapi bibit berdasarkan standar dan penyelamatan/perlindungan sapi bibit grade tinggi (R & D),
 - Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular,
 - Optimalisasi pelaksanaan Village Breeding Centre (VBC),
 - Pameran Sapi dan Panen Pedet,
 - Verifikasi dan validasi data statistik peternakan,
 - Survey dan evaluasi pembangunan peternakan nasional (R & D).
- 2) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan pengendalian sapi bibit adalah:
 - Penetapan alokasi bibit yang dikeluarkan dengan SK Gubernur.
- 3) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan pengendalian pemotongan betina produktif adalah:
 - Penjaringan sapi betina produktif di pasar hewan/RPH.
- 4) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan pengendalian penyakit pedet adalah :
 - Pemberian obat-obat parasit internal dan eksternal pada pedet.
- 5) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan MOU Gubernur dan Bupati se Pulau Sumbawa adalah:
 - Penetapan regulasi padang penggembalaan,
 - Pengembangan pakan ternak sistem 3-strata, Gemarampak,

- Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi (Tambora, Kapet Bima, Pulau Ngali dan Pulau Rakit dan tempat lainnya).
- 6) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan penerbitan sertifikat “Lar” (bahasa Sumbawa), “So” (bahasa Bima) adalah:
- Sertifikasi lahan ”Lar /So”.
 - Koordinasi pembinaan pengelolaan lahan dan air untuk peternakan.
- 7) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan regulasi integrasi antar sub sektor dan lintas sektor adalah:
- Pengembangan instalasi biogas asal ternak untuk masyarakat (Batamas),
 - Pengembangan Industri rumah tanggapPengolahan hasil peternakan,
 - Pengolahan pupuk organik,
 - Pengembangan usaha sapi terintegrasi/kawasan agroteknopark berbasis sapi,
- 8) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan pengembangan pakan ternak adalah:
- Pengembangan pakan lokal,
 - Membangun instalasi pengolahan pakan ternak,
 - Introduksi pakan berkualitas pada lahan-lahan kosong, DAS, lahan pinggir hutan dan jalan,
 - Pengawasan/uji mutu pakan ternak.
- 9) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan Regulasi penertiban RPH dan pemasaran daging adalah :
- Penertiban administrasi, teknis pemotongan, pasar/kios/swalayan daging sapi,
 - Identifikasi dan pemetaan serta pengendalian zoonosis,
 - Penerapan kesejahteraan hewan,
 - Pengendalian dan pengawasan tataniaga produk pangan asal hewan,
 - Biosekuriti lingkungan,
 - Peningkatan fungsi pasar hewan.
- 10) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan revitalisasi penyuluh peternakan adalah:
- Rekrutmen tenaga penyuluh peternakan sapi,
 - Peningkatan sumber daya petugas dan penyuluh peternakan,
 - Penguatan kelembagaan penyuluhan peternakan.
- 11) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan pengembangan kelompok tani ternak adalah :
- Penguatan kelembagaan kelompok tani-ternak sapi perbibitan,
 - Penguatan kelembagaan kelompok tani-ternak sapi penggemukan,
 - Pelatihan dan magang bagi peternak,
 - Kerjasama dengan Toga, Toma, dan LSM,

- Kerjasama dengan ACIAR,
 - Kerjasama dengan JICA,
 - Pendampingan program sarjana membangun desa (SMD) bidang peternakan,
 - Pengembangan Agribisnis LM3
 - Peningkatan kapasitas Sarjana Pendamping, SMD, dan PMUK.
- 12) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan Pengembangan institusi pendukung (*Supporting Institution*) adalah:
- Pembentukan sekretariat NTB BSS,
 - Pembentukan Beef Cattle Center (BCC),
 - Pembentukan satuan keamanan khusus peternakan sapi,
 - Pengembangan lembaga keuangan mikro untuk peternakan.
- 13) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan pengembangan sarana/prasarana peternakan sapi adalah:
- Pembuatan jalan produksi,
 - Pembukaan padang penggembalaan,
 - Pembukaan kebun HMT,
 - Pembangunan embung,
 - Pembuatan sumur bor,
 - Pengembangan air permukaan/irigasi tanah dangkal,
 - Bak air minum ternak,
 - Pembangunan/rehab RPH,
 - Rehab pasar hewan,
 - Fasilitasi kandang kolektif,
 - Pembangunan pabrik pakan mini,
 - Pembangunan gudang/tempat penyimpanan pakan,
 - Pembangunan/rehab Puskesmas,
 - Pengembangan sarana UPT Ternak dan HMT Serading,
 - Pengembangan sarana BIBD Banyumulek,
 - Pengembangan sarana dan peralatan Lab Keswan dan RSH,
 - Sarana dan prasarana bagi penyuluh peternakan sapi,
 - Pembangunan pabrik pupuk organik dari kotoran ternak.

14) Kegiatan-kegiatan pada kebijakan regulasi investasi dan permodalan bidang peternakan adalah:

- Fasilitasi KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS), Kredit SP3 (Skema Pelayanan, Pembiayaan, Pertanian) dan skema kredit lainnya,
- Fasilitasi para investor di bidang peternakan,
- Fasilitasi peningkatan efektifitas HGU peternakan,
- Pengembangan perusahaan daerah di bidang peternakan sapi.

6.4. Sasaran

Sasaran adalah sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas. Secara ringkas sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Sasaran-sasaran dari kebijakan 3 S (Satu induk - Satu anak - Satu tahun) adalah:

- Terdistribusinya sapi calon induk kepada petani peternak sehingga skala pemeliharaan sapi perbibitan meningkat;
- Terdistribusinya pejantan unggul pada kelompok-kelompok tani-ternak;
- Terlaksananya program IB secara intensif;
- Terklasifikasinya grade sapi bibit sesuai standar A, B, dan C;
- Berkurangnya/terbebasnya penyakit hewan menular;
- Berkembangnya kelompok VBC;
- Terlaksananya pameran sapi dan kegiatan panen pedet;
- Tersedianya data statistik peternakan yang valid;
- Tersedia data dasar pembangunan peternakan.

(2) Sasaran-sasaran dari kebijakan pengendalian pengeluaran bibit adalah:

- Terkendalinya pengeluaran sapi bibit setiap tahun agar tidak terjadi pengurasan sapi bibit sehingga dapat segera tercapai jumlah induk sapi optimal.

(3) Sasaran-sasaran dari kebijakan pengendalian pemotongan betina produktif adalah:

- Terlaksananya penjarangan sapi bibit di RPH, dalam upaya mengurangi jumlah pemotongan sapi betina produktif.

(4) Sasaran-sasaran dari kebijakan pengendalian penyakit pedet adalah:

- Tersedia dan terlayannya pengobatan penyakit parasit pada pedet sehingga tingkat kematian pedet menurun.

- (5) Sasaran-sasaran dari kebijakan MOU Gubernur dan Bupati se-P.Sumbawa adalah:
- Tersusunnya regulasi padang penggembalaan,
 - Terlaksananya penanaman pakan ternak dengan sistem 3-strata dan Gemarampak;
 - Terlaksananya pengembangan kawasan peternakan terintegrasi Tambora, Kapet Bima, P. Ngali dan P. Rakit dan tempat lainnya.
- (6) Sasaran-sasaran dari kebijakan penerbitan sertifikat “Lar” (bahasa Sumbawa), “So” (bahasa Bima) adalah:
- Terbitnya sertifikat lahan padang penggembalaan ternak rakyat,
 - Terkoordinirnya pengelolaan lahan dan air untuk peternakan,
- (7) Sasaran-sasaran dari kebijakan regulasi integrasi antar sub sektor dan lintas sektor adalah:
- Terbangunnya instalasi biogas asal ternak untuk masyarakat di kelompok,
 - Berkembangnya home industri pengolahan hasil-hasil peternakan sapi,
 - Terbangunnya unit pengolahan pupuk organik asal kotoran ternak,
 - Terlaksananya pengembangan usaha sapi terpadu/kawasan agroteknopark berbasis sapi.
- (8) Sasaran-sasaran dari kebijakan pengembangan pakan ternak adalah:
- Berkembangnya pemanfaatan pakan lokal,
 - Terbangunnya instalasi pakan ternak,
 - Tersedianya pakan ternak sepanjang musim,
 - Terintroduksinya pakan berkualitas pada lahan-lahan kosong/DAS/pinggir hutan dan jalan,
 - Terlaksananya pengawasan dan uji mutu pakan.
- (9) Sasaran-sasaran dari kebijakan Regulasi penertiban RPH dan pemasaran daging adalah:
- Tersusunnya regulasi penertiban pemotongan ternak dan pemasaran daging sapi,
 - Terlaksananya identifikasi dan pemetaan serta pengendalian zoonosis,
 - Terlaksananya penerapan kesrawan,
 - Terlaksananya peningkatan fungsi pasar hewan,
 - Terlaksananya pengendalian dan pengawasan tataniaga produk pangan asal hewan.
- (10) Sasaran-sasaran dari kebijakan revitalisasi penyuluh peternakan adalah:
- Terpenuhiya tenaga penyuluh peternakan sapi sesuai kebutuhan,
 - Tersedianya petugas dan penyuluh peternakan yang berkualitas,
 - Terbangunnya kelembagaan penyuluhan peternakan yang kuat,

- (11) Sasaran-sasaran dari kebijakan pengembangan kelompok tani ternak adalah:
- Berkembangnya kelompok tani-ternak sapi baik secara kuantitatif maupun kualitatif,
 - Terlaksananya pelatihan dan magang bagi peternak sapi,
 - Terjalinnnya kerjasama dengan Toma, Toga, dan LSM,
 - Meningkatnya intensitas kerja sama dengan ACIAR dan JICA,
 - Terlaksananya pendampingan program SMD bidang peternakan,
 - Terlaksananya pengembangan agribisnis LM3,
 - Tercapainya peningkatan kapasitas SDM tenaga pendamping di lapangan.
- (12) Sasaran-sasaran dari kebijakan pengembangan institusi pendukung (*Supporting Institution*) adalah:
- Terbentuknya Sekretariat NTB BSS,
 - Terbentuknya Beef Cattle Center (BCC),
 - Terbentuknya satuan keamanan khusus peternakan sapi,
 - Berkembangnya lembaga keuangan mikro untuk peternakan.
- (13) Sasaran-sasaran dari kebijakan pengembangan sarana /prasarana peternakan sapi adalah:
- Terbangunnya sarana jalan usaha tani peternakan,
 - Tersedianya lahan penggembalaan ternak rakyat,
 - Tersedianya kebun HMT,
 - Terbangunnya embung untuk peternakan,
 - Tersedianya sumur bor untuk ternak,
 - Tersedianya air bersih untuk ternak dan HMT,
 - Tersedianya bak tempat minum ternak,
 - Terlaksananya rehabilitasi RPH ,
 - Terlaksananya rehabilitasi pasar hewan ,
 - Terfasilitasinya kandang kolektif,
 - Terbangunnya pabrik pakan mini ,
 - Terbangunnya gudang pakan ternak,
 - Terlaksananya pembuatan/rehab Puskesmas,
 - Tersedianya sarana UPT Serading,
 - Tersedianya sarana BIB Banyumulek,
 - Tersedianya sarana UPT Lab. Keswan dan Rumah Sakit Hewan,.
 - Tersedianya sarana dan prasarana penyuluh peternakan,
 - Terbangunnya pabrik pupuk organik berbasis kotoran ternak.

(14) Sasaran-sasaran dari kebijakan Regulasi investasi bidang peternakan adalah:

- Tersedianya fasilitas kredit usaha peternakan rakyat,
- Terfasilitasinya para investor di bidang peternakan,
- Terjadinya peningkatan efektifitas HGU,
- Terlaksananya promosi potensi dan peluang usaha di bidang peternakan sapi,
- Terbentuknya perusahaan daerah bidang peternakan sapi.

6.5. Pembiayaan

Pembiayaan program NTB BSS direncanakan berasal dari lima sumber, yaitu APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta, dan Lainnya. Oleh karena program NTB BSS pada dasarnya merupakan bagian integral dari program P2SDS nasional maka sebagian besar pembiayaan diharapkan berasal dari APBN. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, besar pembiayaan mulai Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 harus semakin besar paralel dengan jumlah kegiatan yang dilakukan. Setelah Tahun 2013, kenaikan pembiayaan tidak perlu besar atau bahkan tidak perlu dinaikkan, karena populasi dan produksi sapi sudah masuk dalam kategori optimal. Pembiayaan setelah Tahun 2013 lebih dikonsentrasikan pada upaya untuk mempertahankan populasi, produksi, dan produktivitas ternak sapi, terutama pada kegiatan penyediaan pakan ternak. Rekapitulasi jumlah dan sumber pembiayaan per tahun selama lima tahun (2009-2013) tertera pada Tabel 6.1 dan secara rinci tertera pada Lampiran 2 s/d 6.

Tabel 6.1. Rekapitulasi pembiayaan NTB BSS 2009 - 2013

Rp. Milyar

NO	SUMBER PEMBIAYAAN	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	APBN	31.16	50.51	52.94	55.24	56.42	246	59.79
2	APBD I	12.34	9.36	7.76	8.79	8.48	47	11.35
3	APBD II	9.81	11.25	11.59	12.58	13.32	59	14.22
4	SWASTA	3.00	7.45	11.54	11.02	11.74	45	10.86
5	LAINNYA	3.11	3.11	3.11	3.12	3.12	16	3.78
TOTAL		59.42	81.69	86.94	90.74	93.08	412	100.00

BAB VII

ORGANISASI PELAKSANA NTB BSS

Untuk kelancaran pelaksanaan program NTB BSS perlu dibentuk Organisasi Pelaksana Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota serta mekanisme kerjanya, termasuk hubungan kerja dengan Tim Pelaksana P2SDS di Tingkat Pusat.

7.1. Tingkat Pusat

Program NTB BSS merupakan bagian integral dari Program P2SDS Nasional, yang diformalkan dengan Nota Kesepakatan Kerjasama antara Gubernur NTB dan Direktur Jenderal Peternakan yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2008 di Mataram.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/HK.060/8/2007, bahwa dalam rangka mempercepat swasembada daging sapi nasional telah ditetapkan Tim Pelaksana P2SDS Pusat dengan susunan keanggotaan yaitu Direktur Jenderal Peternakan (Ketua), Biro Perencanaan Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan, Pusat Pembiayaan Departemen Pertanian, UPT Direktorat Jenderal Peternakan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, asosiasi dan perwakilan kelompok tani ternak.

Tim Pelaksana P2SDS Pusat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian dan mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyiapkan pedoman umum percepatan pencapaian swasembada daging sapi secara nasional,
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produktivitas ternak sapi dan kontribusi terhadap swasembada daging nasional,
- c. Melaksanakan pemantauan, supervisi dan evaluasi kegiatan.

7.2. Tingkat Provinsi

Organisasi Pelaksana Tingkat Provinsi terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Koordinasi. Organisasi Pelaksana Tingkat Provinsi dipimpin oleh Wakil Gubernur. Sekretaris Eksekutif adalah Staf Ahli Gubernur bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan. Ketua pelaksana teknis adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Ketua pelaksana koordinasi adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Keanggotaan organisasi ini pada dasarnya adalah mitra kerja, terdiri dari unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Staf Ahli Gubernur yang membidangi fungsi peternakan,

Bappeda Provinsi NTB, Dinas/Instansi terkait, asosiasi di bidang peternakan sapi, organisasi profesi, Perguruan Tinggi (Fakultas Peternakan), BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) dan unsur terkait lain yang diperlukan sesuai kebutuhan. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana NTB BSS Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

Tim Pelaksana Provinsi mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyusun Blue Print program NTB BSS,
- b. Menyusun pedoman umum dan pedoman operasional pelaksanaan program NTB BSS,
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program NTB BSS antar instansi teknis terkait dan *stakeholders* peternakan sapi di wilayah provinsi,
- d. Melakukan koordinasi dengan Tim P2SDS Pusat,
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan perencanaan berdasarkan blue print,
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program NTB BSS,
- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Susunan Organisasi Pelaksana selengkapnya tertera pada Lampiran 9.

7.3. Tingkat Kabupaten/Kota

Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Koordinasi. Organisasi Pelaksana Kabupaten/Kota dipimpin oleh Wakil Bupati/Walikota. Sekretaris Eksekutif adalah Staf Ahli Bupati/Wali kota yang membidangi peternakan. Ketua pelaksana teknis adalah Kepala Dinas Peternakan/yang membidangi fungsi peternakan. Ketua pelaksana koordinasi adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota. Keanggotaan organisasi ini pada dasarnya adalah mitra kerja, terdiri dari unsur Dinas Peternakan/ yang membidangi fungsi peternakan, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas/Instansi terkait, asosiasi di bidang peternakan sapi, organisasi profesi, Perguruan Tinggi (Fakultas Peternakan), dan unsur terkait lain yang diperlukan sesuai kebutuhan. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana NTB BSS Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Organisasi Pelaksana Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota sebagai Pengarah. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan sebagai Ketua Harian dan Sekretaris Dinas sebagai Sekretaris. Keanggotaan Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi peternakan, Staf Ahli Bupati/Walikota yang membidangi fungsi peternakan, Asisten Bidang Ekonomi dan

Pembangunan, Dinas/Instansi terkait, Asosiasi Bidang Peternakan Sapi, dan Organisasi Profesi, serta unsur terkait lain yang diperlukan sesuai kebutuhan. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Tim Pelaksana Kabupaten/Kota mempunyai tugas yaitu :

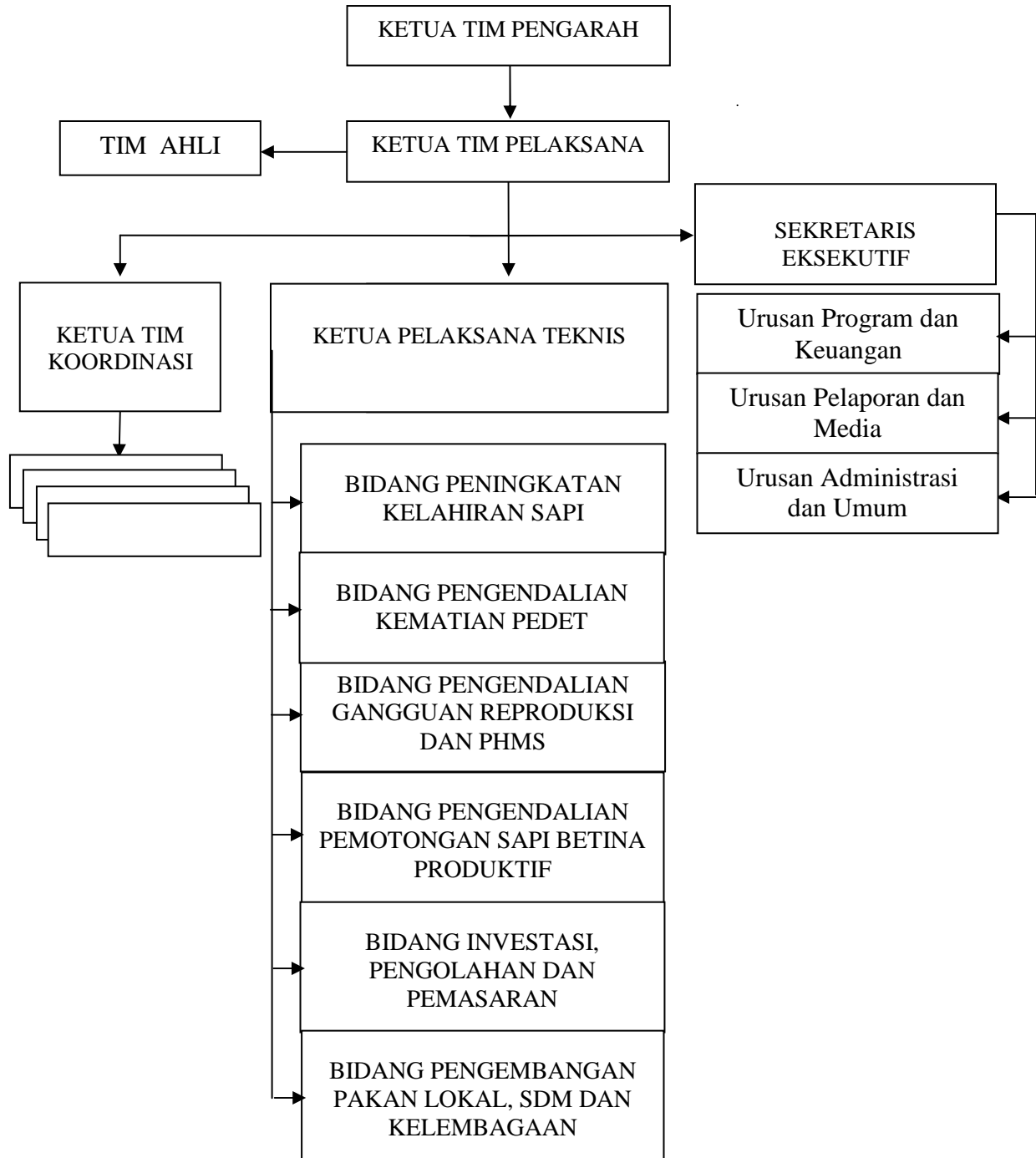
- a. Menyusun kebijakan dan kegiatan-kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman umum dan pedoman operasional yang disusun oleh Tim Provinsi,
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dengan Dinas/Instansi terkait dan seluruh *stakeholders* peternakan sapi di tingkat Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan TNB BSS,
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab,
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan NTB BSS di tingkat Kabupaten/Kota,
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi.

Susunan Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota tertera pada Lampiran 10.

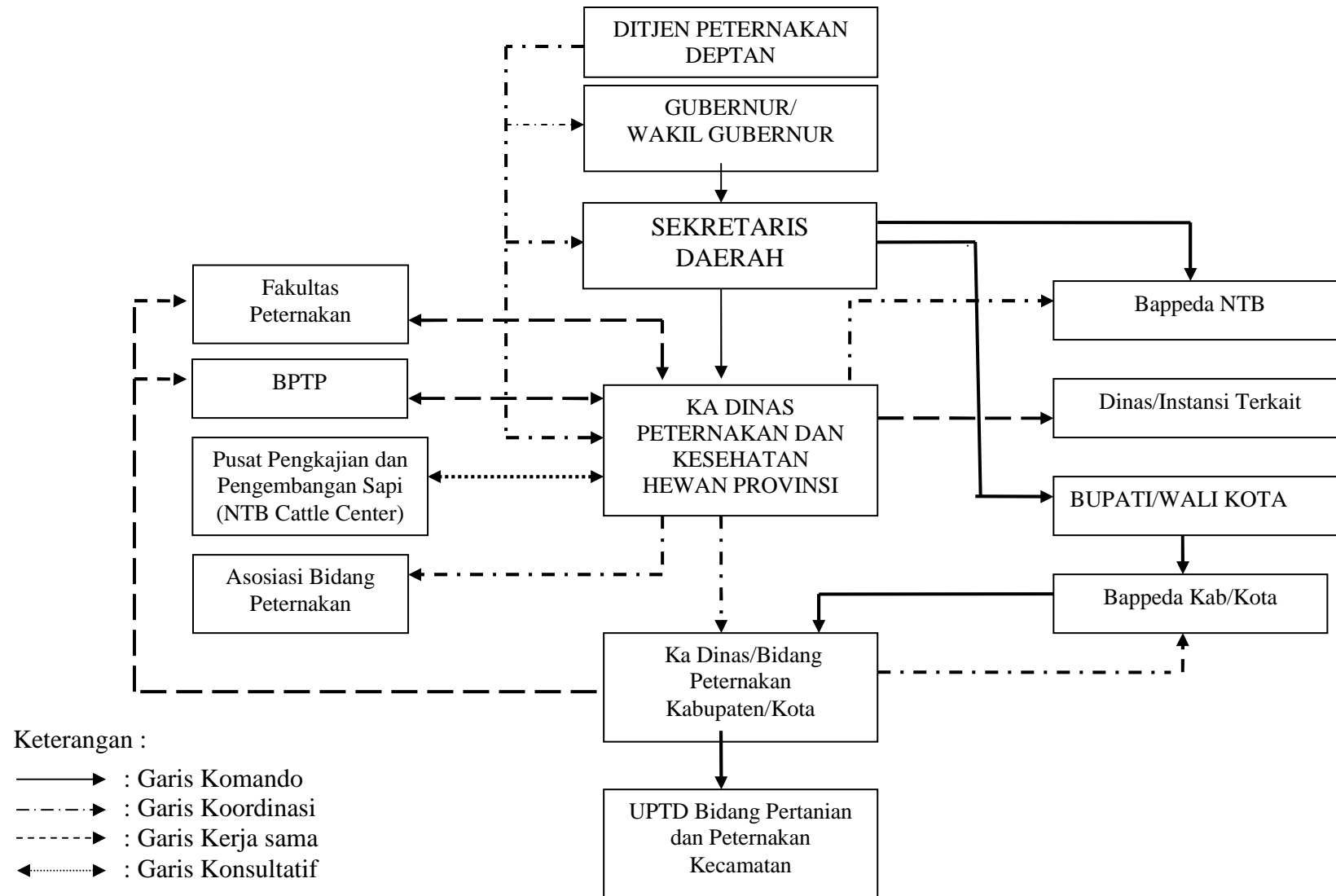
7.4. Mekanisme Kerja

Dalam upaya efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi pelaksana NTB BSS perlu disusun mekanisme kerja antar *stakeholders* yang terkait. Mekanisme kerja tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pusat koordinasi pelaksanaan NTB BSS, menerima komando langsung dari Gubernur/Wakil Gubernur, berkoordinasi dengan Tim P2SDS Pusat, Bappeda Provinsi, Asosiasi Bidang Peternakan, Dinas/Bidang Peternakan Kabupaten/Kota, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (Fakultas Peternakan), Dinas/Instansi terkait, serta konsultasi dengan organisasi profesi dan pusat kajian dan pengembangan sapi (*Beef Cattle Center*). Struktur dan mekanisme kerja organisasi pelaksana NTB BSS disajikan dalam Gambar 7.1.

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA
PROGRAM NUSA TENGGARA BARAT BUMI SEJUTA SAPI
(NTB BSS)**



STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM NTB BSS



Gambar 6.1. Struktur dan Mekanisme Kerja Pelaksana NTB BSS

BAB VIII

PENUTUP

Mengingat potensi produksi ternak sapi (*supply capacity*) Provinsi NTB sangat besar, sementara permintaan (*demand*) ternak tersebut terus meningkat, maka komoditas ternak sapi dapat menjadi unggulan komparatif dan kompetitif guna menunjang kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat Provinsi NTB. Dalam upaya mengoptimalkan potensi tersebut, Gubernur mencanangkan Program NTB BUMI SEJUTA SAPI (NTB BSS) sebagai wujud kemauan politik dan komitmen masyarakat terhadap pentingnya peranan ternak sapi bagi kesejahteraan masyarakat NTB. Oleh karena itu, pengembangan peternakan sapi tidak dapat lagi dilakukan sendiri oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program tersebut harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu dengan dinas/instansi lain yang terkait, baik antar subsektor maupun lintas sektoral. Di samping itu juga perlu dukungan dari pihak-pihak lainnya yang bergerak di bidang peternakan, seperti peneliti, penyuluh, asosiasi-asosiasi, dan swasta.

Reposisi sektor peternakan sapi sebagai *leading sector* dan lokomotif penggerak perekonomian NTB merupakan pilihan yang tepat. Upaya tersebut hanya dapat dilakukan apabila seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-NTB, tetap memiliki komitmen yang kuat pada program NTB BSS. Pembangunan peternakan ke depan bukan lagi sekadar bertumpu pada persoalan produksi dan produktivitas semata, akan tetapi harus menuju pada peningkatan kesejahteraan petani-peternak, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Basis dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat petani-ternak.

Akhirnya, keberhasilan program NTB BSS akan bergantung pada sejauh mana komitmen politik pemerintah (*good will*), lembaga legislatif (*political will*), lembaga yudikatif, swasta, dan masyarakat di NTB. Komitmen ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan, perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi, dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program secara konsisten dan penuh tanggung jawab (*all out*) dalam pengembangan peternakan sapi.

Lampiran 1.

RENCANA AKSI NTB BUMI SEJUTA SAPI PERIODE 2009 – 2013

NO.	PERMASALAHAN	KEBIJAKAN	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI				
1	Populasi, produksi, dan produktivitas belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 S (Satu induk - Satu anak - Satu tahun) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan dan distribusi calon induk sapi, ▪ Pengadaan dan distribusi pejantan unggul, ▪ Intensifikasi IB (Inseminasi Buatan), ▪ Klasifikasi grade sapi bibit berdasarkan standar dan penyelamatan/perlindungan sapi bibit grade tinggi (R & D), ▪ Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular, ▪ Optimalisasi pelaksanaan Village Breeding Centre (VBC), ▪ Pameran Sapi dan Panen Pedet, ▪ Verifikasi dan validasi data statistik peternakan, ▪ Survey dan evaluasi pembangunan peternakan nasional (R & D). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdistribusinya sapi calon induk kepada petani peternak sehingga skala pemeliharaan sapi perbibitan meningkat; ▪ Terdistribusinya pejantan unggul pada kelompok-kelompok tani-ternak; ▪ Terlaksananya program IB secara intensif; ▪ Terklasifikasinya grade sapi bibit sesuai standar A, B, dan C; ▪ Berkurangnya/terbebasnya penyakit hewan menular; ▪ Berkembangnya kelompok VBC; ▪ Terlaksananya pameran sapi dan kegiatan panen pedet; ▪ Tersedianya data statistik peternakan yang valid; ▪ Tersedia data dasar pembangunan peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ BIB Provinsi NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB 				
						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian pengeluaran sapi bibit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan alokasi bibit yang dikeluarkan dengan SK Gubernur. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terkendalinya pengeluaran sapi bibit setiap tahun agar tidak terjadi pengurusan sapi bibit sehingga dapat segera tercapai jumlah induk sapi optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disnakwan Provinsi NTB
						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian pemotongan betina produktif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjaringan sapi betina produktif di pasar hewan/RPH. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya penjaringan sapi bibit di RPH, dalam upaya mengurangi jumlah pemotongan sapi betina produktif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab/Kota se NTB
						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian penyakit pedet 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian obat-obat parasit internal dan eksternal pada pedet. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dan terlayannya pengobatan penyakit parasit pada pedet sehingga tingkat kematian pedet menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab/Kota se NTB

2	Tata ruang padang penggembalaan belum ada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MOU Gubernur dan Bupati se P.Sumbawa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan regulasi padang penggembalaan, ▪ Pengembangan pakan ternak sistem 3 strata, gemarampak, ▪ Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi (Tambora, Kapet Bima, Pulau Ngali dan Pulau Rakit dan tempat lainnya). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya regulasi padang penggembalaan, ▪ Terlaksananya penanaman pakan ternak dengan sistem 3 strata dan Gemarampak; ▪ Terlaksananya pengembangan kawasan peternakan terintegrasi Tambora, Kapet Bima, P. Ngali dan` P.Rakit dan tempat lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab.se-P.Sbw ▪ Kab/Kota P.Lombok ▪ Kab. se-NTB
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan sertifikat "Lar(bahasa Sumbawa/So (bahasa Bima) " 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sertifikasi lahan "Lar /So". ▪ Koordinasi pembinaan pengelolaan lahan dan air untuk peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbitnya sertifikat lahan padang penggembalaan ternak rakyat, ▪ Terkoordinirnya pengelolaan lahan dan air untuk peternakan, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab se-P.Sbw ▪ Kab. se-NTB
3	Pemanfaatan teknologi pakan, lahan basis pakan dan limbah pertanian /industri belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulasi integrasi antar sub sektor dan lintas sektor. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan instalasi Biogas Asal Ternak untuk Masyarakat (Batamas), ▪ Pengembangan Home Industri Pengolahan hasil peternakan, ▪ Pengolahan pupuk organik, ▪ Pengembangan usaha sapi terintegrasi/kawasan agroteknopark berbasis sapi, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbangunnya instalasi Biogas Asal Ternak untuk Masyarakat di kelompok, ▪ Berkembangnya home industri pengolahan hasil-hasil peternakan sapi, ▪ Terbangunnya unit pengolahan pupuk organik asal kotoran ternak, ▪ Terlaksananya pengembangan usaha sapi terpadu/kawasan agroteknopark berbasis sapi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan pakan pabrik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan pakan lokal, ▪ Membangun instalasi pengolahan pakan ternak, ▪ Introduksi pakan berkualitas pada lahan-lahan kosong, DAS, lahan pinggir hutan dan jalan, ▪ Pengawasan/uji mutu pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkembangnya pemanfaatan pakan lokal, ▪ Terbangunnya instalasi pakan ternak, ▪ Terintroduksinya pakan berkualitas pada lahan-lahan kosong/DAS/ pinggir hutan dan jalan, ▪ Terlaksananya pengawasan dan uji mutu pakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab. se NTB

4	Penyediaan daging asuh masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulasi penertiban RPH dan pemasaran daging. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penertiban administrasi, teknis pemotongan, pasar/kios/swalayan daging sapi, ▪ Identifikasi dan pemetaan serta pengendalian zoonosis, ▪ Penerapan kesejahteraan hewan, ▪ Pengendalian dan Pengawasan tataniaga produk pangan asal hewan, ▪ Bio Security lingkungan, ▪ Peningkatan fungsi pasar hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya regulasi penertiban pemotongan ternak dan pemasaran daging sapi, ▪ Terlaksananya identifikasi dan pemetaan serta pengendalian zoonosis, ▪ Terlaksananya penerapan kesrawan, ▪ Terlaksananya pengendalian dan pengawasan tataniaga produk pangan asal hewan. ▪ Terlaksananya pengawasan bio sekuriti lingkungan, ▪ Terfasilitasinya peningkatan fungsi pasar hewan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB
5	Pengembangan SDM dan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revitalisasi penyuluh peternakan ▪ Pengembangan Kelompok Tani Ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekrutmen tenaga penyuluh peternakan sapi, ▪ Peningkatan sumber daya petugas dan penyuluh peternakan, ▪ Penguatan kelembagaan penyuluhan peternakan. ▪ Penguatan kelembagaan kelompok tani-ternak sapi perbibitan, ▪ Penguatan kelembagaan kelompok tani-ternak sapi penggemukan, ▪ Pelatihan dan magang bagi peternak, ▪ Kerjasama dengan Toga, Toma, dan LSM, ▪ Kerjasama dengan ACIAR, ▪ Kerjasama dengan JICA, ▪ Pendampingan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) Bidang Peternakan, ▪ Pengembangan Agribisnis LM3 ▪ Peningkatan kapasitas Sarjana Pendamping, SMD, dan PMUK. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhi tenaga penyuluh peternakan sapi sesuai kebutuhan, ▪ Tersedianya petugas dan penyuluh peternakan yang berkualitas, ▪ Terbangunnya kelembagaan penyuluhan peternakan yang kuat, ▪ Berkembangnya kelompok tani-ternak sapi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ▪ Berkembangnya kelompok-kelompok tani ternak usaha sapi penggemukan. ▪ Terlaksananya pelatihan dan magang bagi peternak sapi, ▪ Terjalinnnya kerjasama dengan Toma, Toga, dan LSM, ▪ Makin intensifnya kerjasama dengan ACIAR, ▪ Makin intensifnya kerjasama dengan JICA, ▪ Terlaksananya pendampingan program SMD bidang peternakan, ▪ Terlaksananya pengembangan agribisnis LM3, ▪ Tercapainya peningkatan kapasitas SDM tenaga pendamping di lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Lombok Tengah ▪ 4 Kab se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB ▪ Kab/Kota se NTB

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan institusi pendukung ” Supporting Institution 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan sekretariat NTB BSS, ▪ Pembentukan Beef Cattle Center (BCC), ▪ Pembentukan satuan keamanan khusus peternakan sapi, ▪ Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro untuk peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuknya Sekretariat NTB BSS, ▪ Terbentuknya Beef Cattle Center (BCC), ▪ Terbentuknya satuan keamanan khusus peternakan sapi, ▪ Berkembangnya lembaga keuangan mikro untuk peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mataram ▪ Mataram ▪ 4 kab.se-NTB ▪ Kab/Kota se-NTB
6	Sarana dan Prasarana belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sarana /prasarana peternakan sapi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan jalan produksi, ▪ Pembukaan padang penggembalaan, ▪ Pembukaan kebun HMT, ▪ Pembangunan Embung, ▪ Pembuatan sumur bor, ▪ Pengembangan air permukaan/Irigasi tanah dangkal, ▪ Bak air minum ternak, ▪ Pembangunan/rehab RPH, ▪ Rehab pasar hewan, ▪ Fasilitasi kandang kolektif, ▪ Pembangunan pabrik pakan mini, ▪ Pembangunan gudang/tempat penyimpanan pakan, ▪ Pembangunan /Rehab Puskesmas, ▪ Pengembangan sarana UPT Ternak dan HMT Serading, ▪ Pengembangan sarana BIB Banyumulek, ▪ Pengembangan sarana dan peralatan Lab Keswan dan RSH, ▪ Sarana dan prasarana bagi penyuluh peternakan sapi, ▪ Pembangunan pabrik pupuk organik dari kotoran ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbangunnya sarana jalan usaha tani peternakan, ▪ Tersedianya lahan penggembalaan ternak rakyat, ▪ Tersedianya kebun HMT, ▪ Terbangunnya embung untuk peternakan, ▪ Tersedianya sumur bor untuk ternak, ▪ Tersedianya air bersih untuk ternak dan HMT, ▪ Tersedianya bak tempat minum ternak, ▪ Terlaksananya rehabilitasi RPH , ▪ Terlaksananya rehabilitasi pasar hewan , ▪ Terfasilitasinya kandang kolektif, ▪ Terbangunnya pabrik pakan mini , ▪ Terbangunnya gudang pakan ternak, ▪ Terlaksananya pembuatan/rehab Puskesmas, ▪ Tersedianya sarana UPT Serading, ▪ Tersedianya sarana BIB Banyumulek, ▪ Tersedianya sarana UPT Lab.Keswan dan Rumah Sakit Hewan,. ▪ Tersedianya sarana dan prasarana penyuluh peternakan, ▪ Terbangunnya pabrik pupuk organik berbasis kotoran ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab./Kota se NTB ▪ Kab. se P.Sbw ▪ Kab. se NTB ▪ Kab. se NTB ▪ Kab. se NTB ▪ Kab. se NTB ▪ Kab. se NTB ▪ Kab./Kota se NTB ▪ Kab./Kota se NTB ▪ Kab./Kota se NTB ▪ Kab./Kota se NTB ▪ Kab./Kota se NTB ▪ Kab./Kota se NTB ▪ Kab. Sumbawa ▪ Kab.Lombok Barat ▪ Kab. Lombok Barat ▪ 2 Kab.di P.Sumbawa ▪ Kab./Kota se NTB

7	Investasi masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulasi investasi bidang peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas KKP-E Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS), Kredit SP3 (Skema Pelayanan, Pembiayaan, pertanian) dan skema kredit lainnya, ▪ Fasilitas para investor di bidang peternakan, ▪ Fasilitas peningkatan efektifitas HGU Peternakan, ▪ Promosi peternakan ▪ Pengembangan perusahaan daerah di bidang peternakan sapi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya fasilitas kredit usaha peternakan rakyat, ▪ Terfasilitasinya para investor di bidang peternakan, ▪ Terjadinya peningkatan efektifitas HGU, ▪ Terlaksananya promosi potensi dan peluang usaha di bidang peternakan sapi, ▪ Terbentuknya perusahaan daerah bidang peternakan sapi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kab/Kota. se NTB ▪ Kab/Kota. se NTB ▪ Kab/Kota. se NTB ▪ Kab/Kota. se NTB ▪ Kab/Kota. se NTB
---	------------------------	--	--	--	--

Lampiran 2.

PROGRAM DAN KEGIATAN NTB BUMI SEJUTA SAPI PERIODE 2009 – 2013

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN
1.	Peningkatan kelahiran ternak sapi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan dan distribusi calon induk sapi, ▪ Pengadaan dan distribusi pejantan unggul, ▪ Intensifikasi IB (Inseminasi Buatan), ▪ Klasifikasi grade sapi bibit berdasarkan standar dan penyelamatan/perlindungan sapi bibit grade tinggi (R & D), ▪ Optimalisasi pelaksanaan Village Breeding Centre (VBC), ▪ Pameran Sapi dan Panen Pedet, ▪ Verifikasi dan validasi data statistik peternakan, ▪ Survey dan evaluasi pembangunan peternakan nasional (R & D). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdistribusinya sapi calon induk kepada peternak sehingga skala usaha sapi perbibitan meningkat; ▪ Terdistribusinya pejantan unggul pada kelompok-kelompok tani-ternak; ▪ Terlaksananya program IB secara intensif; ▪ Terklasifikasinya grade sapi bibit sesuai standar A, B, dan C; ▪ Berkembangnya kelompok VBC; ▪ Terlaksananya pameran sapi dan kegiatan panen pedet; ▪ Tersedianya data statistik peternakan yang valid; ▪ Tersedia data dasar pembangunan peternakan.
2.	Pengendalian kematian pedet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian obat-obat parasit internal dan eksternal pada pedet. ▪ Penceg 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dan terlayannya pengobatan penyakit parasit pada pedet sehingga tingkat kematian pedet menurun.
3.	Pengendalian penyakit reproduksi dan penyakit strategis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular, ▪ Pengendalian gangguan reproduksi pada ternak sapi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkurangnya/terbebasnya penyakit hewan menular; ▪ Berkurangnya kasus gangguan reproduksi pada sapi
4.	Pengendalian pemotongan betina produktif.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjaringan sapi betina produktif di pasar hewan/RPH. ▪ Penertiban administrasi, teknis pemotongan, pasar/kios/swalayan daging sapi, ▪ Identifikasi dan pemetaan serta pengendalian zoonosis, ▪ Penerapan kesejahteraan hewan, ▪ Pengendalian dan Pengawasan tataniaga produk pangan asal hewan, ▪ Bio Security lingkungan, ▪ Peningkatan fungsi pasar hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya penjaringan sapi bibit di RPH, dalam upaya mengurangi jumlah pemotongan sapi betina produktif. ▪ Tersusunnya regulasi penertiban pemotongan ternak dan pemasaran daging sapi, ▪ Terlaksananya identifikasi dan pemetaan serta pengendalian zoonosis, ▪ Terlaksananya penerapan kesrawan, ▪ Terlaksananya pengendalian dan pengawasan tataniaga produk pangan asal hewan. ▪ Terlaksananya pengawasan bio sekuriti lingkungan, ▪ Terfasilitasinya peningkatan fungsi pasar hewan

5.	Pengendalian pengeluaran sapi bibit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan alokasi bibit yang dikeluarkan dengan SK Gubernur. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terkendalinya pengeluaran sapi bibit setiap tahun agar tidak terjadi pengurusan sapi bibit sehingga dapat segera tercapai jumlah induk sapi optimal.
6	Pengembangan pakan ternak dan optimalisasi padang penggembalaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan regulasi padang penggembalaan, ▪ Pengembangan pakan ternak sistem 3 strata, gemarampak, ▪ Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi (Tambora, Kapet Bima, Pulau Ngali dan Pulau Rakit dan tempat lainnya). ▪ Sertifikasi lahan "Lar /So". ▪ Koordinasi pembinaan pengelolaan lahan dan air untuk peternakan. ▪ Pengembangan pakan lokal, ▪ Membangun instalasi pengolahan pakan ternak, ▪ Introduksi pakan berkualitas pada lahan-lahan kosong, DAS, lahan pinggir hutan dan jalan, ▪ Pengawasan/uji mutu pakan ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya regulasi padang penggembalaan, ▪ Terlaksananya penanaman pakan ternak dengan sistem 3 strata dan Gemarampak; ▪ Terlaksananya pengembangan kawasan peternakan terintegrasi Tambora, Kapet Bima, P. Ngali dan P.Rakit dan tempat lainnya. ▪ Terbitnya sertifikat lahan padang penggembalaan ternak rakyat, ▪ Terkoordinirnya pengelolaan lahan dan air untuk peternakan, ▪ Berkembangnya pemanfaatan pakan lokal, ▪ Terbangunnya instalasi pakan ternak, ▪ Terintroduksinya pakan berkualitas pada lahan-lahan kosong/DAS/ pinggir hutan dan jalan, ▪ Terlaksananya pengawasan dan uji mutu pakan.
7.	Pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan kelembagaan kelompok tani-ternak sapi perbibitan, ▪ Penguatan kelembagaan kelompok tani-ternak sapi penggemukan, ▪ Pelatihan dan magang bagi peternak, ▪ Kerjasama dengan Toga, Toma, dan LSM, ▪ Kerjasama dengan ACIAR, ▪ Kerjasama dengan JICA, ▪ Pendampingan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) Bidang Peternakan, ▪ Pengembangan Agribisnis LM3 ▪ Peningkatan kapasitas Sarjana Pendamping, SMD, dan PMUK. ▪ Pembentukan sekretariat NTB BSS, ▪ Pembentukan Beef Cattle Center (BCC), ▪ Pembentukan satuan keamanan khusus peternakan sapi, ▪ Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro untuk peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkembangnya kelompok tani-ternak sapi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ▪ Berkembangnya kelompok-kelompok tani ternak usaha sapi penggemukan. ▪ Terlaksananya pelatihan dan magang bagi peternak sapi, ▪ Terjalinnnya kerjasama dengan Toma, Toga, dan LSM, ▪ Makin intensifnya kerjasama dengan ACIAR, ▪ Makin intensifnya kerjasama dengan JICA, ▪ Terlaksananya pendampingan program SMD bidang peternakan, ▪ Terlaksananya pengembangan agribisnis LM3, ▪ Tercapainya peningkatan kapasitas SDM tenaga pendamping di lapangan. ▪ Terbentuknya Sekretariat NTB BSS, ▪ Terbentuknya Beef Cattle Center (BCC), ▪ Terbentuknya satuan keamanan khusus peternakan sapi, ▪ Berkembangnya lembaga keuangan mikro untuk peternakan.

8	Peningkatan sarana dan prasarana peternakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan jalan produksi, ▪ Pembukaan padang penggembalaan, ▪ Pembukaan kebun HMT, ▪ Pembangunan Embung, ▪ Pembuatan sumur bor, ▪ Pengembangan air permukaan/Irigasi tanah dangkal, ▪ Bak air minum ternak, ▪ Pembangunan/rehab RPH, ▪ Rehab pasar hewan, ▪ Fasilitasi kandang kolektif, ▪ Pembangunan pabrik pakan mini, ▪ Pembangunan gudang/tempat penyimpanan pakan, ▪ Pembangunan /Rehab Puskesmas, ▪ Pengembangan sarana UPT Ternak dan HMT Serading, ▪ Pengembangan sarana BIB Banyumulek, ▪ Pengembangan sarana dan peralatan Lab Keswan dan RSH, ▪ Sarana dan prasarana bagi penyuluh peternakan sapi, ▪ Pembangunan pabrik pupuk organik dari kotoran ternak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbangunnya sarana jalan usaha tani peternakan, ▪ Tersedianya lahan penggembalaan ternak rakyat, ▪ Tersedianya kebun HMT, ▪ Terbangunnya embung untuk peternakan, ▪ Tersedianya sumur bor untuk ternak, ▪ Tersedianya air bersih untuk ternak dan HMT, ▪ Tersedianya bak tempat minum ternak, ▪ Terlaksananya rehabilitasi RPH , ▪ Terlaksananya rehabilitasi pasar hewan , ▪ Terfasilitasinya kandang kolektif, ▪ Terbangunnya pabrik pakan mini , ▪ Terbangunnya gudang pakan ternak, ▪ Terlaksananya pembuatan/rehab Puskesmas, ▪ Tersedianya sarana UPT Serading, ▪ Tersedianya sarana BIB Banyumulek, ▪ Tersedianya sarana UPT Lab.Keswan dan Rumah Sakit Hewan., ▪ Tersedianya sarana dan prasarana penyuluh peternakan, ▪ Terbangunnya pabrik pupuk organik berbasis kotoran ternak.
9	Peningkatan Investasi dan Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS), Kredit SP3 (Skema Pelayanan, Pembiayaan, pertanian) dan skema kredit lainnya, ▪ Fasilitasi para investor di bidang peternakan, ▪ Fasilitasi peningkatan efektifitas HGU Peternakan, ▪ Promosi peternakan ▪ Pengembangan perusahaan daerah di bidang peternakan sapi. ▪ Pengembangan instalasi Biogas Asal Ternak untuk Masyarakat (Batamas), ▪ Pengembangan Home Industri Pengolahan hasil peternakan, ▪ Pengolahan pupuk organik, ▪ Pengembangan usaha sapi terintegrasi/kawasan agroteknopark berbasis sapi, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya fasilitas kredit usaha peternakan rakyat, ▪ Terfasilitasinya para investor di bidang peternakan, ▪ Terjadinya peningkatan efektifitas HGU, ▪ Terlaksananya promosi potensi dan peluang usaha di bidang peternakan sapi, ▪ Terbentuknya perusahaan daerah bidang peternakan sapi. ▪ Terbangunnya instalasi Biogas Asal Ternak untuk Masyarakat di kelompok, ▪ Berkembangnya home industri pengolahan hasil-hasil peternakan sapi, ▪ Terbangunnya unit pengolahan pupuk organik asal kotoran ternak, ▪ Terlaksananya pengembangan usaha sapi terpadu/kawasan agroteknopark berbasis sapi.

Lampiran 3.

**ANALISIS PREDIKSI PERKEMBANGAN POPULASI DAN PRODUKSI TERNAK
NTB BUMI SEJUTA SAPI TAHUN 2000 – 2013**

No,	Uraian	Satuan	Data 2008	Indikator Capaian Kinerja				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	Peningkatan Populasi Sapi	Ekor	546,114	602,333	683,347	780,724	89	1,032,507
		%	7,54	10,30	13,45	14,25	15,00	15,00
2	Peningkatan Induk dewasa	Ekor	189,728	207,513	234,910	273,339	320,097	377,090
		%	37,36	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00
3	Kelahiran Pedet	Ekor	126,548	151,484	199,673	232,338	272,082	320,526
		%	66,70	73,00	85,00	85,00	85,00	85,00
4	Penurunan kematian sapi	Ekor	25,310	21,208	25,958	27,881	29,929	32,053
		%	20,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00
5	Peningkatan Panen Pedet	Ekor	101,239	130,277	173,716	204,457	242,153	288,474
6	Produksi Sapi Potong	Ekor	52,924	63,671	79,844	93,593	110,409	131,016
7	Pemotongan Tercatat	Ekor	34,646	37,764	41,352	45,487	50,263	55,792
		%	8,00	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00
8	Pemotongan tidak tercatat	Ekor	6,929	5,665	5,376	5,004	4,524	4,463
		%	20,00	15,00	13,00	11,00	9,00	8,00
9	Pemotongan dalam Daerah	Ekor	41,575	43,429	46,727	50,490	54,787	60,255
10	Potensi Ekspor Sapi Potong	Ekor	11,348	20,242	33,117	43,103	55,622	70,761
11	Produksi Sapi Bibit	Ekor	48,315	66,606	93,872	110,864	131,744	157,458
12	Kebutuhan bibit ternak	Ekor	38,278	56,247	81,014	97,377	117,109	134,675
13	Potensi Ekspor Sapi Bibit	Ekor	10,037	10,359	12,858	13,487	14,636	22,783
14	Serapan Tenaga Kerja	Orang	181,856	200,577	227,555	259,981	298,978	343,825

Lampiran 5.

RENCANA PEMBIAYAAN NTB BUMI SEJUTA SAPI TAHUN 2009

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
1	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak									Disnakwan, Bappeda, BPS, (Prov/Kab/Kota) dan UNRAM
1.1.	Pengadaan dan distribusi calon induk sapi (pola induk bergulir)	1885 ekor	4.400.000	8.294.000.000	0	3.957.000.000	4.337.000.000	0	0	
1.2.	Pengadaan dan distribusi pejantan unggul	353 ekor	7.520.000	2.654.560.000	849.760.000	1.468.800.000	336.000.000	0	0	
1.3.	Pengadaan dan distribusi Sapi Bakalan	286 ekor	4.800.000	1.372.800.000	0	960.000.000	412.800.000	0	0	
1.4.	Intensifikasi IB dan Kawin Alam	1 paket	2.186.200.000	2.186.200.000	1.475.612.000	261.588.000	449.000.000	0	0	
1.5.	Klasifikasi grading sapi bibit (R & D)	1 paket	122.000.000	122.000.000	122.000.000	0	0	0	0	
1.6.	Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular	4 paket	300.000.000	1.200.000.000	433.639.000	287.818.000	478.543.000	0	0	
1.7.	Optimalisasi pelaksanaan Village Breeding Centre (VBC)	1 paket	208.500.000	208.500.000	152.080.000	56.420.000		0	0	
1.8.	Pameran Sapi dan Panen Pedet	1 keg	164.800.000	164.800.000	0	86.800.000	78.000.000	0	0	
1.9.	Verifikasi dan validasi data Statistik peternakan	1 paket	185.900.000	185.900.000	185.900.000	0	0	0	0	
1.10	Survey dan evaluasi pembangunan peternakan masional	2 paket	137.500.000	275.000.000	275.000.000	0	0	0	0	
1.11	Penetapan alokasi sapi bibit yang dikeluarkan	1 keg	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	
1.12	Penjaringan sapi betina produktif di pasar hewan /RPH.	100 ekor	5.000.000	500.000.000	-	500.000.000	0	0	0	
1.13	Pemberian obat-obat parasit internal dan external pada pedet	1 paket	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	0	0	0	
2.	Tata Ruang dan Padang Penggembalaan									Disnakwan, Bappeda, BPN, Dishut, DPU (Prov/ Kab/ Kota)
2.1	Penetapan regulasi padang penggembalaan	1 paket	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	
2.2	Pengembangan pakan ternak sistem 3 strata, Gemarampak.	3 Ha	5.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
2.3	Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi (Tambora, Kapet Bima, Pulau Ngali dan Pulau Rakit dan lainnya.	1 paket	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	
2.4	Sertifikasi lahan "Lar /So.	persil	0	0	0	0	0	0	0	
2.5	Koordinasi pembinaan pengelolaan lahan dan air peternakan	1 paket	347.200.000	347.200.000	347.200.000	0	0	0	0	

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
3.	Pemanfaatan Teknologi Pakan, Lahan dan Limbah Pertanian/Industri									
3.1.	Pengembangan instalasi Biogas Asal Ternak untuk Masyarakat (Batamas)	4 unit	50.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	Disnak, Bappeda, Distamben, Disper-indag, Distan, Diskan (Prov/ Kab/ Kota) dan BPTP
3.2.	Pengembangan home Industri Pengolahan hasil peternakan	1 Paket	363.160.000	363.160.000	344.000.000	19.160.000	0	0	0	
3.3.	Pengolahan pupuk organik,	1 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	
3.4.	Pengembangan usaha sapi terintegrasi/kawasan agroteknopark berbasis sapi	1 kelpk	282.445.700	282.445.700	282.445.700	0	0	0	0	
3.5.	Pengembangan pakan lokal	1 paket	241.252.000	241.252.000	101.000.000	140.252.000	0	0	0	
3.6.	Pengawasan/uji mutu pakan	2 paket	23.780.000	47.560.000	47.560.000	0	0	0	0	
4.	Penyediaan Daging Asuh									
4.1.	Penertiban administrasi, teknis pemotongan, dan pasar/kios/swalayan daging sapi	3 paket	114.000.000	342.000.000	142.907.000	199.093.000	0	0	0	Disnak, Bappeda, Kepolisian, Balai Karantina Hewan, BPOM dan MUI.
4.2.	Identifikasi dan pemetaan serta pengendalian penyakit zoonosis	1 paket	121.664.000	121.664.000	99.194.000	22.470.000	0	0	0	
4.3.	Penerapan kesejahteraan hewan	1 paket	29.260.000	29.260.000	29.260.000	0	0	0	0	
4.4.	Pengendalian dan pengawasan tata niaga produk pangan asal hewan	1 paket	33.480.000	33.480.000	0	33.480.000	0	0	0	
4.5.	Bio sekuriti lingkungan	1 paket	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
4.6.	Peningkatan fungsi pasar hewan	1 paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	
5.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan									
5.1.	Rekrutmen tenaga penyuluh peternakan sapi	org	0	0	0	0	0	0	0	Disnak, Bappeda, Bakorluh, Kepolisian, (Prov/ Kab/ Kota), ACIAR dan JICA
5.2.	Peningkatan sumber daya petugas dan penyuluh peternakan	1 paket	136.935.000	136.935.000	36.935.000	100.000.000	0	0	0	
5.3.	Penguatan kelembagaan kelompok tani ternak	1 paket	80.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	
5.4.	Pelatihan dan magang peternak	1 paket	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0	0	0	
5.5.	Pengembangan sapi bali melalui kerjasama dengan ACIAR	1 kab	612.113.000	612.113.000	0	0	0	0	612.113.000	
5.6.	Pengembangan sapi bali melalui kerjasama dengan JICA	4 kab	656.000.000	2.624.000.000	0	124.000.000	0	0	2.500.000.000	
5.7.	Penghargaan kelompok dan petugas	3 paket	13.000.000	39.000.000	39.000.000	0	0	0	0	

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
	Pendampingan Program Sarjana 5.8. Membangun Desa (SMD) bidang Peternakan.	60 klpk	325.000.000	19.500.000.000	19.500.000.000	0	0	0	0	Disnak, Bappeda, Bakorluh, Kepolisian, (Prov/ Kab/ Kota), ACIAR dan JICA
	5.9. Pengembangan Agribisnis LM3	4 klpk	200.000.000	800.000.000	800.000.000	0	0	0	0	
	5.10 Peningkatan kapasitas tenaga pendamping, LM3, SMD & PMUK	1 keg	165.880.000	165.880.000	165.880.000	0	0	0	0	
	5.12 Pembuatan, asistensi dan sosialisasi Blue Print NTB BSS	1 paket	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	
	5.13 Dukungan Oper. Sekretariat dan koordinasi pelaksanaan NTB BSS	1 tahun	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	
	5.14 Pembentukan Satuan Keamanan Khusus peternakan sapi	0 org	0	0	0	0	0	0	0	
	5.16 Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro untuk peternakan.	1 paket	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
6	Sarana dan Sarana Peternakan Sapi									Disnakan, Bappeda, DPU, Perindag (Prov/ Kab/ Kota)
	6.1. Pembuatan jalan produksi	4 km	100.000.000	400.000.000	300.000.000	0	100.000.000	0	-	
	6.2. Pembukaan padang penggembalaan ternak	222 Ha	4.850.000	1.076.700.000	776.000.000	0	300.700.000	0	0	
	6.3. Pembuatan kebun HMT	280 Ha	4.700.000	1.316.000.000	1.128.000.000	0	188.000.000	0	0	
	6.4. Pembangunan Embung	16 unit	50.000.000	800.000.000	600.000.000	0	200.000.000	0	0	
	6.5. Pembuatan Sumur Bor	2 unit	300.000.000	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	
	6.6. Pengembangan irigasi tanah dangkal	10 unit	45.500.000	455.000.000	305.000.000	0	150.000.000	0	0	
	6.7. Bak Penampung Air Minum Ternak	6 unit	5.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	
	6.8. Pembangunan/Rehab Rumah Potong Hewan	12 unit	78.420.000	941.040.000	0	753.040.000	188.000.000	0	0	
	6.9. Rehab Pasar Hewan	2 unit	155.000.000	310.000.000	155.000.000	155.000.000	0	0	0	
	6.10. Rehab Holding Ground	1 unit	135.000.000	135.000.000	0	0	135.000.000	0	0	
	6.11. Fasilitasi/Stimulan Kandang Kelompok	14 unit	30.000.000	420.000.000	60.000.000	360.000.000	0	0	0	
	6.12. Fasilitasi Pengolahan Pakan ternak	4 unit	100.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	
	6.13. Pembangunan Gudang Pakan/Hijauan	1 unit	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
	6.14. Pembangunan / Rehab Puskesmas	3 unit	583.350.000	1.750.050.000	0	0	1.750.050.000	0	0	
	Pengembangan UPTD Serading									
	6.15 a. Pembibitan ternak serading	1 UPT	604.130.000	604.130.000	284.457.000	319.673.000	0	0	0	
	b. Pembibitan hijauan pakan ternak	1 UPT	71.264.750	71.264.750	0	71.264.750	0	0	0	

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
6.16	Pengembangan Balai Inseminasi Buatan Banyumulek									Disnakwan, Bappeda, DPU, Perindag (Prov/ Kab/ Kota)
	a. Sarana dan prasarana IB	1 Paket	832.500.000	832.500.000	762.500.000	70.000.000	0	0	0	
	b. Kendaraan Roda 2	3 unit	20.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	
6.17	Pengembangan Sarana/Prasarana Laboratorium, Keswan dan RSH	7 Paket	165.710.000	1.159.970.000	0	1.159.970.000	0	0	0	
6.18	Pengembangan Sarana dan peralatan Produk susu sapi Hissar	1 unit	240.000.000	240.000.000	240.000.000		0	0	0	
6.19	Pengadaan Sarana/Prasarana Penyuluh Peternakan	- unit	0	0	0	0	0	0	0	
6.20	Pengadaan Sarana pengolahan pupuk organik dari kotoran ternak	3 paket	53.350.000	160.050.000	160.050.000					
7.	Pengembangan Investasi									Disnakwan, Perbankan, BPN, BPM (Prov/ Kab/ Kota)
7.1.	Fasilitasi kredit penguatan usaha peternakan	1 keg	97.890.000	97.890.000	65.000.000	32.890.000	0	0	0	
7.2.	Investasi dibidang peternakan sapi	1 keg	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	
7.3	Pengembangan perusahaan daerah dibidang peternakan	1 paket	11.140.000	11.140.000	0	11.140.000	0	0	0	
7.4.	Fasilitasi peningkatan efektifitas HGU Peternakan	- keg	0	0	0	0	0	0	0	
7.5.	Promosi potensi dan hasil peternakan sapi	1 paket	178.868.000	178.868.000	178.868.000	0	0	0	0	
8	Monitoring dan Evaluasi	1 tahun	190.900.000	190.886.000	190.886.000	0	0	0	0	Disnakwan
	Jumlah			59.418.198.450	31.156.133.700	12.336.858.750	9.813.093.000	3.000.000.000	3.112.113.000	
	Prosentase Sharing			100,00%	52,44%	20,76%	16,52%	5,05%	5,24%	

Lampiran 6.

RENCANA PEMBIAYAAN NTB BUMI SEJUTA SAPI TAHUN 2010

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
1	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak									
1.1.	Pengadaan dan distribusi calon induk sapi (pola induk bergulir)	2500 ekor	4.500.000	11.250.000.000	4.500.000.000	2.250.000.000	4.500.000.000	0	0	Disnak, Bappeda, BPS, (Prov/Kab/ Kota) dan Unram
1.2.	Pengadaan dan distribusi pejantan unggul	380 ekor	8.000.000	3.040.000.000	960.000.000	800.000.000	1.280.000.000	0	0	
1.3.	Pengadaan dan distribusi Sapi Bakalan	1200 ekor	5.500.000	6.600.000.000	0	1.100.000.000	550.000.000	4.950.000.000	0	
1.4.	Intensifikasi IB dan Kawin Alam	1 paket	2.260.000.000	2.260.000.000	1.500.000.000	260.000.000	500.000.000	0	0	
1.5.	Klasifikasi grading sapi bibit (R & D)	1 paket	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	
1.6.	Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular	4 paket	300.000.000	1.200.000.000	450.000.000	300.000.000	450.000.000	0	0	
1.7.	Optimalisasi pelaksanaan Village Breeding Centre (VBC)	1 paket	208.500.000	208.500.000	160.000.000	48.500.000	0	0	0	
1.8.	Pameran Sapi dan Panen Pedet	1 keg	164.800.000	164.800.000	0	86.800.000	78.000.000	0	0	
1.9.	Verifikasi dan validasi data Statistik peternakan	1 paket	190.000.000	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0	
1.10	Survey dan evaluasi pembangunan peternakan masional	2 paket	150.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	
1.11	Penetapan alokasi sapi bibit yang dikeluarkan	1 keg	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	
1.12	Penjaringan sapi betina produktif di pasar hewan /RPH.	1100 ekor	4.500.000	4.950.000.000	4.500.000.000	450.000.000	0	0	0	
1.13	Pemberian obat-obat parasit internal dan external pada pedet	1 paket	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	0	0	0	
2.	Tata Ruang dan Padang Penggembalaan									
2.1	Penetapan regulasi padang penggembalaan	1 paket	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	Disnak, Bappeda, BPN, Dishut, DPU (Prov/Kab/Kota)
2.2	Pengembangan pakan ternak sistem 3 strata, Gemarampak.	3 Ha	5.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
2.3	Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi (Tambora, Kapet Bima, Pulau Ngali dan Pulau Rakit dan tempat lainnya).	4 paket	400.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	-	0	0	0	
2.4	Pengembangan ranch sapi	500 ekor	4.500.000	2.250.000.000	0	-	0	2.250.000.000	0	
2.5	Sertifikasi lahan "Lar /So.	100 persil	1.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	
2.6	Koordinasi pembinaan pengelolaan lahan dan air peternakan	1 paket	347.200.000	347.200.000	347.200.000	0	0	0	0	

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
3.	Pemanfaatan Teknologi Pakan, Lahan dan Limbah Pertanian/Industri									
3.1.	Pengembangan instalasi Biogas Asal Ternak untuk Masyarakat (Batamas)	4 unit	50.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	Disnak,Bappeda, Distamben, Disperindag, Distan, Diskan (Prov/ Kab/ Kota) dan BPTP
3.2.	Pengembangan home Industri Pengolahan hasil peternakan	1 Paket	363.160.000	363.160.000	344.000.000	19.160.000	0	0	0	
3.3.	Pengolahan pupuk organik,	1 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	
3.4.	Pengembangan usaha sapi terintegrasi/kawasan agroteknopark berbasis sapi	1 kelpk	282.445.700	282.445.700	282.445.700	0	0	0	0	
3.5.	Pengembangan pakan lokal	1 paket	241.252.000	241.252.000	101.000.000	140.252.000	0	0	0	
3.6.	Pengawasan/uji mutu pakan	2 paket	23.780.000	47.560.000	47.560.000	0	0	0	0	
4.	Penyediaan Daging ASUH									
4.1.	Penertiban administrasi, teknis pemotongan, dan pasar/kios/swalayan daging sapi	3 paket	114.000.000	342.000.000	142.907.000	199.093.000	0	0	0	Disnak,Bappeda, Kepolisian, Balai Karantina Hewan, BPOM dan MUI.
4.2.	Identifikasi dan pemetaan serta pengendalian penyakit zoonosis	1 paket	121.664.000	121.664.000	99.194.000	22.470.000	0	0	0	
4.3.	Penerapan kesejahteraan hewan	1 paket	29.260.000	29.260.000	29.260.000	0	0	0	0	
4.4.	Pengendalian dan pengawasan tata niaga produk pangan asal hewan	1 paket	33.480.000	33.480.000	0	33.480.000	0	0	0	
4.5.	Bio sekuriti lingkungan	1 paket	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
4.6.	Peningkatan fungsi pasar hewan	1 paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	
5.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan									
5.1.	Rekrutmen tenaga penyuluh peternakan sapi	30 org	12.000.000	360.000.000	360.000.000	0	0	0	0	Disnak,Bappeda, Bakorluh, Kepolisian, (Prov/ Kab/ Kota), ACIAR dan JICA
5.2.	Peningkatan sumber daya petugas dan penyuluh peternakan	1 paket	36.935.000	36.935.000	36.935.000	0	0	0	0	
5.3.	Penguatan kelembagaan kelompok tani ternak	1 paket	80.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	
5.4.	Pelatihan dan magang peternak	1 paket	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0	0	0	
5.5.	Pengembangan sapi bali melalui kerjasama dengan ACIAR	1 kab	612.113.000	612.113.000	0	0	0	0	612.113.000	
5.6.	Pengembangan sapi bali melalui kerjasama dengan JICA	4 kab	670.000.000	2.680.000.000	0	180.000.000	0	0	2.500.000.000	
5.7.	Penghargaan kelompok dan petugas	3 paket	13.000.000	39.000.000	39.000.000	0	0	0	0	

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
5.8.	Pendampingan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) bidang Peternakan.	70 klpk	303.000.000	21.210.000.000	21.210.000.000	0	0	0	0	Disnak,Bappeda, Bakorluh, Kepolisian, (Prov/ Kab/ Kota), ACIAR dan JICA
5.9.	Pengembangan Agribisnis LM3	4 klpk	200.000.000	800.000.000	800.000.000	0	0	0	0	
5.10.	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping, LM3, SMD &PMUK	1 keg	165.880.000	165.880.000	165.880.000	0	0	0	0	
5.12.	Operasional sekretariat NTB BSS	1 unit	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
5.13.	Operasional Beef Cattle Team	1 paket	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
5.14.	Pembentukan Satuan Keamanan Khusus peternakan sapi	25 org	12.000.000	300.000.000	0	60.000.000	240.000.000	0	0	
5.16.	Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro untuk peternakan.	1 paket	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	
6	Sarana dan Sarana Peternakan Sapi									Disnak,Bappeda, Kimpraswil, Perindag (Prov/ Kab/ Kota)
6.1.	Pembuatan jalan produksi	4 km	100.000.000	400.000.000	300.000.000	0	100.000.000	0		
6.2.	Pembukaan padang penggembalaan ternak	530 Ha	5.000.000	2.650.000.000	976.000.000	1.074.000.000	600.000.000	0	0	
6.3.	Pembuatan kebun HMT	170 Ha	5.000.000	850.000.000	500.000.000	20.000.000	80.000.000	250.000.000	-	
6.4.	Pembangunan Embung	28 unit	50.000.000	1.400.000.000	1.000.000.000	0	400.000.000	0	0	
6.5.	Pembuatan Sumur Bor	3 unit	300.000.000	900.000.000	900.000.000	-	0	0	0	
6.6.	Pengembangan irigasi tanah dangkal	24 unit	45.500.000	1.092.000.000	305.000.000	637.000.000	150.000.000	0	0	
6.7.	Bak Penampung Air Minum Ternak	56 unit	5.000.000	280.000.000	0	0	280.000.000	0	0	
6.8.	Pembangunan/Rehab Rumah Potong Hewan	12 unit	94.000.000	1.128.000.000	0	0	1.128.000.000	0	0	
6.9.	Rehab Pasar Hewan	6 unit	160.000.000	960.000.000	960.000.000	0	-	0	0	
6.10.	Rehab Holding Ground	1 unit	135.000.000	135.000.000	0	0	135.000.000	0	0	
6.11.	Fasilitasi Kandang Kelompok	20 unit	30.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	
6.12.	Pembangunan Pabrik Pakan Mini	1 unit	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	
6.13.	Pembangunan Gudang Pakan/Hijauan	12 unit	50.000.000	600.000.000	300.000.000	-	300.000.000	0	0	
6.14.	Pembangunan / Rehab Puskesmas	10 unit	100.000.000	1.000.000.000	600.000.000	0	400.000.000	0	0	
	Pengembangan UPTD Serading									
6.15.	a. Pembibitan ternak serading	1 Paket	500.000.000	500.000.000	300.000.000	200.000.000	0	0	0	
	b. Pembibitan hijauan pakan ternak	1 Paket	75.000.000	75.000.000	30.000.000	45.000.000	0	0	0	

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
	Pengembangan Balai Inseminasi Buatan Banyumulek									
6.16.	a. Sarana dan prasarana IB	2 Paket	250.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	Disnak,Bappeda, Kimpraswil, Perindag (Prov/ Kab/ Kota)
	b. Kendaraan Roda 2	10 unit	20.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	
6.17.	Pengembangan Sarana/Prasarana Laboratorium Keswan dan RSH	1 Paket	400.000.000	400.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	
6.18.	Pengembangan Sarana dan peralatan Produk susu sapi Hissar	1 paket	240.000.000	240.000.000	240.000.000		0	0	0	
6.19.	Pengadaan Sarana/Prasarana Penyuluh Peternakan	4 unit	20.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	
6.20.	Pengadaan Sarana pengolahan pupuk organik dari kotoran ternak	10 paket	30.000.000	300.000.000	300.000.000					
7.	Pengembangan Investasi									
7.1.	Fasilitasi kredit penguatan usaha peternakan	1 keg	97.890.000	97.890.000	65.000.000	32.890.000	0	0	0	Disnak, Perbankan, BPN, BPM (Prov/ Kab/ Kota)
7.2.	Investasi dibidang peternakan sapi	1 keg	3.030.000.000	3.030.000.000	3.030.000.000	0	0	0	0	
7.3	Pengembangan perusahaan daerah dibidang peternakan	1 paket	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
7.4.	Fasilitasi peningkatan efektifitas HGU Peternakan	1 keg	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
7.5.	Promosi potensi dan hasil peternakan sapi	1 paket	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	0	0	0	
8	Monitoring dan Evaluasi	1 tahun	190.000.000	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0	Disnakwan
	Jumlah			81.685.139.700	50.511.381.700	9.360.645.000	11.251.000.000	7.450.000.000	3.112.113.000	
	Prosentase Sharing			100,00%	61,84%	11,46%	13,77%	9,12%	3,81%	

Lampiran 7.

RENCANA PEMBIAYAAN NTB BUMI SEJUTA SAPI TAHUN 2011

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
1	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak									
	1.1. Pengadaan dan distribusi calon induk sapi (pola induk bergulir)	2500 ekor	4.600.000	11.500.000.000	4.600.000.000	2.300.000.000	4.600.000.000	0	0	Disnak, Bappeda, BPS, (Prov/Kab/Kota) dan Unram
	1.2. Pengadaan dan distribusi pejantan unggul	400 ekor	8.200.000	3.280.000.000	1.148.000.000	820.000.000	1.312.000.000	0	0	
	1.3. Pengadaan dan distribusi Sapi Bakalan	1200 ekor	5.600.000	6.720.000.000	0	1.120.000.000	560.000.000	5.040.000.000	-	
	1.4. Intensifikasi IB dan Kawin Alam	1 paket	2.260.000.000	2.260.000.000	1.500.000.000	260.000.000	500.000.000	0	0	
	1.5. Klasifikasi grading sapi bibit (R & D)	1 paket	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	
	1.6. Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular	4 paket	300.000.000	1.200.000.000	450.000.000	300.000.000	450.000.000	0	0	
	1.7. Optimalisasi pelaksanaan Village Breeding Centre (VBC)	1 paket	208.500.000	208.500.000	160.000.000	48.500.000		0	0	
	1.8. Pameran Sapi dan Panen Pedet	1 keg	164.800.000	164.800.000	0	86.800.000	78.000.000	0	0	
	1.9. Verifikasi dan validasi data Statistik peternakan	1 paket	190.000.000	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0	
	1.10 Survey dan evaluasi pembangunan peternakan nasional	2 paket	150.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	
	1.11 Penetapan alokasi sapi bibit yang dikeluarkan	1 keg	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	
	1.12 Penjaringan sapi betina produktif di pasar hewan /RPH.	1200 ekor	4.600.000	5.520.000.000	4.600.000.000	920.000.000	0	0	0	
	1.13 Pemberian obat-obat parasit internal dan external pada pedet	1 paket	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	0	0	0	
2.	Tata Ruang dan Padang Penggembalaan									
	2.1 Penetapan regulasi padang penggembalaan	1 paket	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	Disnak, Bappeda, BPN, Dishut, DPU (Prov/Kab/Kota)
	2.2 Pengembangan pakan ternak sistem 3 strata, Gemarampak.	4 Ha	5.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	2.3 Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi (Tambora, Kapet Bima, Pulau Ngali dan Pulau Rakit dan tempat lainnya).	4 paket	500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0	0	0	
	2.4 Pengembangan ranch sapi	500 ekor	4.600.000	2.300.000.000	0	-	0	2.300.000.000		
	2.5 Sertifikasi lahan "Lar /So.	100 persil	1.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	
	2.6 Koordinasi pembinaan pengelolaan lahan dan air peternakan	1 paket	347.200.000	347.200.000	347.200.000	0	0	0	0	

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
3.	Pemanfaatan Teknologi Pakan, Lahan dan Limbah Pertanian/Industri									
	3.1. Pengembangan instalasi Biogas Asal Ternak untuk Masyarakat (Batamas)	4 unit	50.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	Disnak,Bappeda, Distamben, Disper-indag, Distan, Diskan (Prov/ Kab/ Kota) dan BPTP
	3.2. Pengembangan home Industri Pengolahan hasil peternakan	1 Paket	363.160.000	363.160.000	344.000.000	19.160.000	0	0	0	
	3.3. Pengolahan pupuk organik,	1 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	
	3.4. Pengembangan usaha sapi terintegrasi/kawasan agroteknopark berbasis sapi	1 kelpk	282.445.700	282.445.700	282.445.700	0	0	0	0	
	3.5. Pengembangan pakan lokal	1 paket	241.252.000	241.252.000	101.000.000	140.252.000	0	0	0	
	3.6. Pengawasan/uji mutu pakan	2 paket	23.780.000	47.560.000	47.560.000	0	0	0	0	
4.	Penyediaan Daging ASUH									
	4.1. Penertiban administrasi, teknis pemotongan, dan pasar/kios/swalayan daging sapi	3 paket	114.000.000	342.000.000	145.000.000	197.000.000	0	0	0	Disnak,Bappeda, Kepolisian, Balai Karantina Hewan, BPOM dan MUI.
	4.2. Identifikasi dan pemetaan serta pengendalian penyakit zoonosis	1 paket	121.664.000	121.664.000	99.194.000	22.470.000	0	0	0	
	4.3. Penerapan kesejahteraan hewan	1 paket	29.260.000	29.260.000	29.260.000	0	0	0	0	
	4.4. Pengendalian dan pengawasan tata niaga produk pangan asal hewan	1 paket	33.480.000	33.480.000	0	33.480.000	0	0	0	
	4.5. Bio sekuriti lingkungan	1 paket	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
	4.6. Peningkatan fungsi pasar hewan	1 paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	
5.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan									
	5.1. Rekrutmen tenaga penyuluh peternakan sapi	30 org	12.000.000	360.000.000	360.000.000	0	0	0	0	Disnak,Bappeda, Bakorluh, Kepolisian, (Prov/ Kab/ Kota), ACIAR dan JICA
	5.2. Peningkatan sumber daya petugas dan penyuluh peternakan	1 paket	36.935.000	36.935.000	36.935.000	0	0	0	0	
	5.3. Penguatan kelembagaan kelompok tani ternak	1 paket	80.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	
	5.4. Pelatihan dan magang peternak	1 paket	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0	0	0	
	5.5. Pengembangan sapi bali melalui kerjasama dengan ACIAR	1 kab	612.113.000	612.113.000	0	0	0	0	612.113.000	
	5.6. Pengembangan sapi bali melalui kerjasama dengan JICA	4 kab	670.000.000	2.680.000.000	0	180.000.000	0	0	2.500.000.000	
	5.7. Penghargaan kelompok dan petugas	3 paket	13.000.000	39.000.000	39.000.000	0	0	0	0	
	5.8. Pendampingan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) bidang Peternakan.	80 klpk	303.000.000	24.240.000.000	24.240.000.000	0	0	0	0	
	5.9. Pengembangan Agribisnis LM3	5 klpk	200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	
	5.10. Peningkatan kapasitas tenaga pendamping, LM3, SMD & PMUK	1 keg	165.880.000	165.880.000	165.880.000	0	0	0	0	
	5.12. Operasional sekretariat NTB BSS	1 unit	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
	5.13. Operasional Beef Cattle Team	1 paket	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
	5.14. Pembentukan Satuan Keamanan Khusus peternakan sapi	25 org	12.000.000	300.000.000	0	60.000.000	240.000.000	0	0	
	5.16. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro untuk peternakan.	1 paket	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
6	Sarana dan Sarana Peternakan Sapi									
	6.1. Pembuatan jalan produksi	5 km	100.000.000	500.000.000	300.000.000	0	200.000.000	0	-	
	6.2. Pembukaan padang penggembalaan ternak	550 Ha	5.000.000	2.750.000.000	2.450.000.000	0	300.000.000	0	0	
	6.3. Pembuatan kebun HMT	180 Ha	5.000.000	900.000.000	600.000.000	-	300.000.000	0	-	
	6.4. Pembangunan Embung	12 unit	50.000.000	600.000.000	200.000.000	0	400.000.000	0	0	
	6.5. Pembuatan Sumur Bor	4 unit	300.000.000	1.200.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0	
	6.6. Pengembangan irigasi tanah dangkal	12 unit	50.000.000	600.000.000	200.000.000	0	400.000.000	0	0	
	6.7. Bak Penampung Air Minum Ternak	40 unit	5.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	
	6.8. Pembangunan/Rehab Rumah Potong Hewan	10 unit	94.000.000	940.000.000	752.000.000	0	188.000.000	0	0	
	6.9. Rehab Pasar Hewan	3 unit	160.000.000	480.000.000	480.000.000	0	-	0	0	
	6.10. Rehab Holding Ground	1 unit	0	0	0	0	0	0	0	
	6.11. Fasilitas Kandang Kelompok	30 unit	30.000.000	900.000.000	300.000.000	120.000.000	480.000.000	0	0	
	6.12. Pembangunan Pabrik Pakan	2 unit	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	
	6.13. Pembangunan Gudang Pakan/Hijauan	12 unit	50.000.000	600.000.000	300.000.000	-	300.000.000	0	0	
	6.14. Pembangunan / Rehab Puskesmas	10 unit	100.000.000	1.000.000.000	600.000.000	0	400.000.000	0	0	
	Pengembangan UPTD Serading									
	6.15. a. Pembibitan ternak serading	1 Paket	500.000.000	500.000.000	300.000.000	200.000.000	0	0	0	
	b. Pembibitan hijauan pakan ternak	1 Paket	75.000.000	75.000.000	30.000.000	45.000.000	0	0	0	
	Pengembangan Balai Inseminasi Buatan Banyumulek									
	6.16. a. Sarana dan prasarana IB	2 Paket	250.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	
	b. Kendaraan Roda 2	10 unit	20.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	
	6.17. Pengembangan Sarana/Prasarana Laboratorium Keswan dan RSH	1 Paket	400.000.000	400.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	
	6.18. Pengembangan Sarana dan peralatan Produk susu sapi Hissar	1 paket	240.000.000	240.000.000	240.000.000		0	0	0	
	6.19. Pengadaan Sarana/Prasarana Penyuluh Peternakan	4 unit	20.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	
	6.20. Pengadaan Sarana pengolahan pupuk organik dari kotoran ternak	10 paket	30.000.000	300.000.000	300.000.000					

Disnak, Bappeda,
Kimpraswil,
Perindag (Prov/
Kab/ Kota)

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
7.	Pengembangan Investasi									
	7.1. Fasilitasi kredit penguatan usaha peternakan	1 keg	97.890.000	97.890.000	65.000.000	32.890.000	0	0	0	Disnak, Perbankan, BPN, BPM (Prov/ Kab/ Kota)
	7.2. Investasi dibidang peternakan sapi	1 keg	3.197.000.000	3.197.000.000	0	0	0	3.197.000.000	0	
	7.3 Pengembangan perusahaan daerah dibidang peternakan	1 paket	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
	7.4. Fasilitasi peningkatan efektifitas HGU Peternakan	1 keg	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
	7.5. Promosi potensi dan hasil peternakan sapi	1 paket	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	0	0	0	
8	Monitoring dan Evaluasi	1 tahun	190.000.000	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0	Disnakwan
	Jumlah			86.942.139.700	52.942.474.700	7.762.552.000	11.588.000.000	11.537.000.000	3.112.113.000	
	Prosentase Sharing			100,00%	60,89%	8,93%	13,33%	13,27%	3,58%	

RENCANA PEMBIAYAAN NTB BUMI SEJUTA SAPI TAHUN 2012

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
1	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak									
1.1.	Pengadaan dan distribusi calon induk sapi (pola induk bergulir)	2500 ekor	4.600.000	11.500.000.000	4.600.000.000	2.300.000.000	4.600.000.000	0	0	Disnak, Bappeda, BPS, (Prov/Kab/Kota) dan Unram
1.2.	Pengadaan dan distribusi pejantan unggul	450 ekor	8.200.000	3.690.000.000	1.189.000.000	1.066.000.000	1.435.000.000	0	0	
1.3.	Pengadaan dan distribusi Sapi Bakalan	1250 ekor	5.600.000	7.000.000.000	0	1.120.000.000	560.000.000	5.320.000.000	-	
1.4.	Intensifikasi IB dan Kawin Alam	1 paket	2.260.000.000	2.260.000.000	1.500.000.000	260.000.000	500.000.000	0	0	
1.5.	Klasifikasi grading sapi bibit (R & D)	1 paket	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	
1.6.	Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular	4 paket	300.000.000	1.200.000.000	450.000.000	300.000.000	450.000.000	0	0	
1.7.	Optimalisasi pelaksanaan Village Breeding Centre (VBC)	1 paket	208.500.000	208.500.000	160.000.000	48.500.000	0	0	0	
1.8.	Pameran Sapi dan Panen Pedet	1 keg	164.800.000	164.800.000	0	86.800.000	78.000.000	0	0	
1.9.	Verifikasi dan validasi data Statistik peternakan	1 paket	190.000.000	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0	
1.10	Survey dan evaluasi pembangunan peternakan masional	2 paket	150.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	
1.11	Penetapan alokasi sapi bibit yang dikeluarkan	1 keg	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	
1.12	Penjaringan sapi betina produktif di pasar hewan /RPH.	1250 ekor	4.600.000	5.750.000.000	4.600.000.000	1.150.000.000	0	0	0	
1.13	Pemberian obat-obat parasit internal dan external pada pedet	1 paket	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	0	0	0	
2.	Tata Ruang dan Padang Penggembalaan									
2.1	Penetapan regulasi padang penggembalaan	1 paket	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	Disnak, Bappeda, BPN, Dishut, DPU (Prov/Kab/Kota)
2.2	Pengembangan pakan ternak sistem 3 strata, Gemarampak.	4 Ha	5.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
2.3	Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi (Tambora, Kapet Bima, P. Ngali dan P. Rakit dan tempat lainnya).	5 paket	500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0	0	0	
2.4	Pengembangan ranch sapi	500 ekor	4.600.000	2.300.000.000	0	-	0	2.300.000.000	0	
2.5	Sertifikasi lahan "Lar /So.	150 persil	1.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	
2.6	Koordinasi pembinaan pengelolaan lahan dan air peternakan	1 paket	347.200.000	347.200.000	347.200.000	0	0	0	0	

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
3.	Pemanfaatan Teknologi Pakan, Lahan dan Limbah Pertanian/Industri									
3.1.	Pengembangan instalasi Biogas Asal Ternak untuk Masyarakat (Batamas)	4 unit	50.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	Disnak, Bappeda, Distamben, Disperindag, Distan, Diskan (Prov/ Kab/ Kota) dan BPTP
3.2.	Pengembangan home Industri Pengolahan hasil peternakan	1 Paket	363.160.000	363.160.000	344.000.000	19.160.000	0	0	0	
3.3.	Pengolahan pupuk organik,	1 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	
3.4.	Pengembangan usaha sapi terintegrasi/kawasan agroteknopark berbasis sapi	1 kelpk	282.445.700	282.445.700	282.445.700	0	0	0	0	
3.5.	Pengembangan pakan lokal	1 paket	241.252.000	241.252.000	101.000.000	140.252.000	0	0	0	
3.6.	Pengawasan/uji mutu pakan	2 paket	23.780.000	47.560.000	47.560.000	0	0	0	0	
4.	Penyediaan Daging ASUH									
4.1.	Penertiban administrasi, teknis pemotongan, dan pasar/kios/swalayan daging sapi	3 paket	114.000.000	342.000.000	145.000.000	197.000.000	0	0	0	Disnak, Bappeda, Kepolisian, Balai Karantina Hewan, BPOM dan MUI.
4.2.	Identifikasi dan pemetaan serta pengendalian penyakit zoonosis	1 paket	121.664.000	121.664.000	99.194.000	22.470.000	0	0	0	
4.3.	Penerapan kesejahteraan hewan	1 paket	29.260.000	29.260.000	29.260.000	0	0	0	0	
4.4.	Pengendalian dan pengawasan tata niaga produk pangan asal hewan	1 paket	33.480.000	33.480.000	0	33.480.000	0	0	0	
4.5.	Bio sekuriti lingkungan	1 paket	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
4.6.	Peningkatan fungsi pasar hewan	1 paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	
5.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan									
5.1	Rekrutmen tenaga penyuluh peternakan sapi	40 org	12.000.000	480.000.000	480.000.000	0	0	0	0	Disnak, Bappeda, Bakorluh, Kepolisian, (Prov/ Kab/ Kota), ACIAR dan JICA
5.2	Peningkatan sumber daya petugas dan penyuluh peternakan	1 paket	36.935.000	36.935.000	36.935.000	0	0	0	0	
5.3.	Penguatan kelembagaan kelompok tani ternak	1 paket	80.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	
5.4.	Pelatihan dan magang peternak	1 paket	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0	0	0	
5.5.	Pengembangan sapi bali melalui kerjasama dengan ACIAR	1 kab	620.000.000	620.000.000	0	0	0	0	620.000.000	
5.6.	Pengembangan sapi bali melalui kerjasama dengan JICA	4 kab	670.000.000	2.680.000.000	0	180.000.000	0	0	2.500.000.000	
5.7.	Penghargaan kelompok dan petugas	3 paket	13.000.000	39.000.000	39.000.000	0	0	0	0	
5.8.	Pendampingan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) bidang Peternakan.	85 klpk	303.000.000	25.755.000.000	25.755.000.000	0	0	0	0	

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
	5.9. Pengembangan Agribisnis LM3	5 klpk	200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	Disnak,Bappeda, Bakorluh, Kepolisian, (Prov/ Kab/ Kota), ACIAR dan JICA
	5.10. Peningkatan kapasitas tenaga pendamping, LM3, SMD & PMUK	1 keg	165.880.000	165.880.000	165.880.000	0	0	0	0	
	5.12. Operasional sekretariat NTB BSS	1 unit	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
	5.13. Operasional Beef Cattle Team	1 paket	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
	5.14. Pembentukan Satuan Keamanan Khusus peternakan sapi	30 org	12.000.000	360.000.000	0	60.000.000	300.000.000	0	0	
	5.16. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro untuk peternakan.	1 paket	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	
6	Sarana dan Sarana Peternakan Sapi									Disnak,Bappeda, Kimpraswil, Perindag (Prov/ Kab/ Kota)
	6.1. Pembuatan jalan produksi	5 km	100.000.000	500.000.000	300.000.000	0	200.000.000	0	-	
	6.2. Pembukaan padang penggembalaan ternak	600 Ha	5.000.000	3.000.000.000	2.700.000.000	0	300.000.000	0	0	
	6.3. Pembuatan kebun HMT	200 Ha	5.000.000	1.000.000.000	600.000.000	-	400.000.000	0	-	
	6.4. Pembangunan Embung	12 unit	50.000.000	600.000.000	200.000.000	0	400.000.000	0	0	
	6.5. Pembuatan Sumur Bor	4 unit	300.000.000	1.200.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0	
	6.6. Pengembangan irigasi tanah dangkal	12 unit	50.000.000	600.000.000	200.000.000	0	400.000.000	0	0	
	6.7. Bak Penampung Air Minum Ternak	40 unit	5.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	
	6.8. Pembangunan/Rehab Rumah Potong Hewan	10 unit	100.000.000	1.000.000.000	700.000.000	0	300.000.000	0	0	
	6.9. Rehab Pasar Hewan	2 unit	200.000.000	400.000.000	400.000.000	0	-	0	0	
	6.10. Rehab Holding Ground	1 unit	0	0	0	0	0	0	0	
	6.11. Fasilitasi Kandang Kelompok	40 unit	30.000.000	1.200.000.000	300.000.000	120.000.000	780.000.000	0	0	
	6.12. Pembangunan Pabrik Pakan Mini	1 unit	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	
	6.13. Pembangunan Gudang Pakan/Hijauan	14 unit	50.000.000	700.000.000	300.000.000	-	400.000.000	0	0	
	6.14. Pembangunan/ Rehab Puskesmas	12 unit	100.000.000	1.200.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0	
	Pengembangan UPTD Serading									
	6.15. a. Pembibitan ternak serading	1 Paket	1.500.000.000	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000	0	0	0	
	b. Pembibitan hijauan pakan ternak	1 Paket	75.000.000	75.000.000	30.000.000	45.000.000	0	0	0	
	Pengembangan Balai Inseminasi Buatan Banyumulek									
	6.16. a. Sarana dan prasarana IB	2 Paket	250.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	
	b. Kendaraan Roda 2	10 unit	20.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
6.17.	Pengembangan Sarana/Prasarana Laboratorium Keswan dan RSH	1 Paket	400.000.000	400.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	Disnak, Bappeda, Kimpraswil, Perindag (Prov/ Kab/ Kota)
6.18.	Pengembangan Sarana dan peralatan Produk susu sapi Hissar	1 paket	240.000.000	240.000.000	240.000.000		0	0	0	
6.19.	Pengadaan Sarana/Prasarana Penyuluh Peternakan	4 unit	20.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	
6.20.	Pengadaan Sarana pengolahan pupuk organik dari kotoran ternak	10 paket	30.000.000	300.000.000	300.000.000					
7.	Pengembangan Investasi									Disnak, Perbankan, BPN, BPM (Prov/ Kab/ Kota)
7.1.	Fasilitasi kredit penguatan usaha peternakan	1 keg	97.890.000	97.890.000	65.000.000	32.890.000	0	0	0	
7.2.	Investasi dibidang peternakan sapi	1 keg	3.395.000.000	3.395.000.000	0	0	0	3.395.000.000	0	
7.3.	Pengembangan perusahaan daerah dibidang peternakan	1 paket	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
7.4.	Fasilitasi peningkatan efektifitas HGU Peternakan	1 keg	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
7.5.	Promosi potensi dan hasil peternakan sapi	1 paket	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	0	0	0	
8	Monitoring dan Evaluasi	1 tahun	190.000.000	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0	Disnakwan
	Jumlah			90.743.026.700	55.236.474.700	8.788.552.000	12.583.000.000	11.015.000.000	3.120.000.000	
	Prosentase Sharing			100,00%	60,87%	9,69%	13,87%	12,14%	3,44%	

Lampiran 9.

RENCANA PEMBIAYAAN NTB BUMI SEJUTA SAPI TAHUN 2013

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER ANGGARAN					PENANGGUNG JAWAB
					APBN	APBD I	APBD II	SWASTA	LAIN-LAIN	
1	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak									
1.1.	Pengadaan dan distribusi calon induk sapi (pola induk bergulir)	2500 ekor	4.600.000	11.500.000.000	4.600.000.000	2.300.000.000	4.600.000.000	0	0	Disnak, Bappeda, BPS, (Prov/Kab/Kota) dan Unram
1.2.	Pengadaan dan distribusi pejantan unggul	500 ekor	8.200.000	4.100.000.000	1.845.000.000	1.025.000.000	1.230.000.000	0	0	
1.3.	Pengadaan dan distribusi Sapi Bakalan	1300 ekor	5.600.000	7.280.000.000	0	1.400.000.000	840.000.000	5.040.000.000	-	
1.4.	Intensifikasi IB dan Kawin Alam	1 paket	2.260.000.000	2.260.000.000	1.500.000.000	260.000.000	500.000.000	0	0	
1.5.	Klasifikasi grading sapi bibit (R & D)	1 paket	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	
1.6.	Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular	4 paket	300.000.000	1.200.000.000	450.000.000	300.000.000	450.000.000	0	0	
1.7.	Optimalisasi pelaksanaan Village Breeding Centre (VBC)	1 paket	208.500.000	208.500.000	160.000.000	48.500.000	0	0	0	
1.8.	Pameran Sapi dan Panen Pedet	1 keg	164.800.000	164.800.000	0	86.800.000	78.000.000	0	0	
1.9.	Verifikasi dan validasi data Statistik peternakan	1 paket	190.000.000	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0	
1.10	Survey dan evaluasi pembangunan peternakan masional	2 paket	150.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	
1.11	Penetapan alokasi sapi bibit yang dikeluarkan	1 keg	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	
1.12	Penjaringan sapi betina produktif di pasar hewan /RPH.	1300 ekor	4.600.000	5.980.000.000	4.830.000.000	1.150.000.000	0	0	0	
1.13	Pemberian obat-obat parasit internal dan external pada pedet	1 paket	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	0	0	0	
2.	Tata Ruang dan Padang Penggembalaan									
2.1	Penetapan regulasi padang penggembalaan	1 paket	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	Disnak, Bappeda, BPN, Dishut, DPU (Prov/Kab/Kota)
2.2	Pengembangan pakan ternak sistem 3 strata, Gemarampak.	4 Ha	5.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
2.3	Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi (Tambora, Kapet Bima, P. Ngali dan P. Rakit dan tempat lainnya).	5 paket	500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0	0	0	
2.4	Pengembangan ranch sapi	500 ekor	4.600.000	2.300.000.000	0	-	0	2.300.000.000	0	
2.4	Sertifikasi lahan "Lar /So.	150 persil	1.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	
2.5	Koordinasi pembinaan pengelolaan lahan dan air peternakan	1 paket	347.200.000	347.200.000	347.200.000	0	0	0	0	

3.	Pemanfaatan Teknologi Pakan, Lahan dan Limbah Pertanian/Industri												
	3.1.	Pengembangan instalasi Biogas Asal Ternak untuk Masyarakat (Batamas)	4 unit	50.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0			Disnak, Bappeda, Distamben, Disperindag, Distan, Diskan (Prov/ Kab/ Kota) dan BPTP
	3.2.	Pengembangan home Industri Pengolahan hasil peternakan	1 Paket	363.160.000	363.160.000	344.000.000	19.160.000	0	0	0			
	3.3.	Pengolahan pupuk organik,	1 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0			
	3.4.	Pengembangan usaha sapi terintegrasi/kawasan agroteknopark berbasis sapi	1 kelpk	282.445.700	282.445.700	282.445.700	0	0	0	0			
	3.5.	Pengembangan pakan lokal	1 paket	241.252.000	241.252.000	101.000.000	140.252.000	0	0	0			
3.6.	Pengawasan/uji mutu pakan	2 paket	23.780.000	47.560.000	47.560.000	0	0	0	0				
4.	Penyediaan Daging ASUH												Disnak, Bappeda, Kepolisian, Balai Karantina Hewan, BPOM dan MUI.
	4.1.	Penertiban administrasi, teknis pemotongan, dan pasar/kios/swalayan daging sapi	3 paket	114.000.000	342.000.000	145.000.000	197.000.000	0	0	0			
	4.2.	Identifikasi dan pemetaan serta pengendalian penyakit zoonosis	1 paket	121.664.000	121.664.000	99.194.000	22.470.000	0	0	0			
	4.3.	Penerapan kesejahteraan hewan	1 paket	29.260.000	29.260.000	29.260.000	0	0	0	0			
	4.4.	Pengendalian dan pengawasan tata niaga produk pangan asal hewan	1 paket	33.480.000	33.480.000	0	33.480.000	0	0	0			
	4.5.	Bio sekuriti lingkungan	1 paket	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0			
4.6.	Peningkatan fungsi pasar hewan	1 paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0				
5.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan												Disnak, Bappeda, Bakorluh, Kepolisian, (Prov/ Kab/ Kota), ACIAR dan JICA
	5.1.	Rekrutmen tenaga penyuluh peternakan sapi	40 org	12.000.000	480.000.000	480.000.000	0	0	0	0			
	5.2.	Peningkatan sumber daya petugas dan penyuluh peternakan	1 paket	36.935.000	36.935.000	36.935.000	0	0	0	0			
	5.3.	Penguatan kelembagaan kelompok tani ternak	1 paket	80.000.000	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0			
	5.4.	Pelatihan dan magang peternak	1 paket	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0	0	0			
	5.5.	Pengembangan sapi bali melalui kerjasama dengan ACIAR	1 kab	620.000.000	620.000.000	0	0	0	0	620.000.000			
	5.6.	Pengembangan sapi bali melalui kerjasama dengan JICA	4 kab	670.000.000	2.680.000.000	0	180.000.000	0	0	2.500.000.000			
	5.7.	Penghargaan kelompok dan petugas	3 paket	13.000.000	39.000.000	39.000.000	0	0	0	0			
	5.8.	Pendampingan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) bidang Peternakan.	85 klpk	303.000.000	25.755.000.000	25.755.000.000	0	0	0	0			
	5.9.	Pengembangan Agribisnis LM3	5 klpk	200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0			
	5.10.	Peningkatan kapasitas tenaga pendamping, LM3, SMD & PMUK	1 keg	165.880.000	165.880.000	165.880.000	0	0	0	0			

	5.12. Operasional sekretariat NTB BSS	1 unit	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	Disnak, Bappeda, Bakorluh, Kepolisian, (Prov/ Kab/ Kota), ACIAR dan JICA
	5.13. Operasional Beef Cattle Team	1 paket	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
	5.14. Pembentukan Satuan Keamanan Khusus peternakan sapi	35 org	12.000.000	420.000.000	0	60.000.000	360.000.000	0	0	
	5.16. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro untuk peternakan.	1 paket	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	
6	Sarana dan Sarana Peternakan Sapi									
	6.1. Pembuatan jalan produksi	5 km	100.000.000	500.000.000	300.000.000	0	200.000.000	0	0	Disnak,Bappeda , Kimpraswil, Perindag (Prov/ Kab/ Kota)
	6.2. Pembukaan padang penggembalaan ternak	650 Ha	5.000.000	3.250.000.000	2.950.000.000	0	300.000.000	0	0	
	6.3. Pembuatan kebun HMT	250 Ha	5.000.000	1.250.000.000	600.000.000	-	650.000.000	0	-	
	6.4. Pembangunan Embung	10 unit	50.000.000	500.000.000	100.000.000	0	400.000.000	0	0	
	6.5. Pembuatan Sumur Bor	4 unit	300.000.000	1.200.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0	
	6.6. Pengembangan irigasi tanah dangkal	12 unit	50.000.000	600.000.000	200.000.000	0	400.000.000	0	0	
	6.7. Bak Penampung Air Minum Ternak	40 unit	5.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	
	6.8. Pembangunan/Rehab Rumah Potong Hewan	10 unit	100.000.000	1.000.000.000	700.000.000	0	300.000.000	0	0	
	6.9. Rehab Pasar Hewan	2 unit	200.000.000	400.000.000	400.000.000	0	-	0	0	
	6.10. Rehab Holding Ground	1 unit	0	0	0	0	0	0	0	
	6.11. Fasilitasi Kandang Kelompok	50 unit	30.000.000	1.500.000.000	300.000.000	120.000.000	1.080.000.000	0	0	
	6.12. Pembangunan Pabrik Pakan Mini	1 unit	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	
	6.13. Pembangunan Gudang Pakan/Hijauan	15 unit	50.000.000	750.000.000	300.000.000	-	450.000.000	0	0	
	6.14. Pembangunan/ Rehab Puskesmas	12 unit	100.000.000	1.200.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0	
	Pengembangan UPTD Serading									
	6.15. a. Pembibitan ternak serading	1 Paket	500.000.000	500.000.000	300.000.000	200.000.000	0	0	0	
	b. Pembibitan hijauan pakan ternak	1 Paket	75.000.000	75.000.000	30.000.000	45.000.000	0	0	0	
	Pengembangan Balai Inseminasi Buatan Banyuwulek									
	6.16. a. Sarana dan prasarana IB	2 Paket	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0	
	b. Kendaraan Roda 2	15 unit	20.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	
	6.17. Pengembangan Sarana/Prasarana Laboratorium Keswan dan RSH	1 Paket	400.000.000	400.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	
	6.18. Pengembangan Sarana dan peralatan Produk susu sapi Hissar	1 paket	240.000.000	240.000.000	240.000.000		0	0	0	
	6.19. Pengadaan Sarana/Prasarana Penyuluh Peternakan	4 unit	20.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	
	6.20. Pengadaan Sarana pengolahan pupuk organik dari kotoran ternak	10 paket	30.000.000	300.000.000	300.000.000					

7.	Pengembangan Investasi										
	7.1. Fasilitasi kredit penguatan usaha	1 keg	97.890.000	97.890.000	65.000.000	32.890.000	0	0	0		
	7.2. Investasi dibidang peternakan sapi	1 keg	4.397.000.000	4.397.000.000	0	0	0	4.397.000.000	0		
	7.3 Pengembangan perusahaan daerah dibidang peternakan	1 paket	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0		
	7.4. Fasilitasi peningkatan efektifitas HGU Peternakan	1 keg	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0		
	7.5. Promosi potensi dan hasil peternakan sapi	1 paket	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	0	0	0		
8	Monitoring dan Evaluasi	1 tahun	190.000.000	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0		Disnakwan
	Jumlah			93.075.026.700	56.422.474.700	8.477.552.000	13.318.000.000	11.737.000.000	3.120.000.000		
	Prosentase Sharing			100,00%	60,62%	9,11%	14,31%	12,61%	3,35%		

Lampiran 4

RENCANA PEMBAIYAAN NTB BUMI SEJUTA SAPI TAHUN 2009 - 2013

(Rp. Milyar)

NO	SUMBER PEMBIAYAAN	2009		2010		2011		2012		2013		JUMLAH	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	APBN	31,16	52,44	50,51	61,84	52,94	60,89	55,24	60,87	56,42	60,62	246	59,79
2	APBD I	12,34	20,76	9,36	11,46	7,76	8,93	8,79	9,69	8,48	9,11	47	11,35
3	APBD II	9,81	16,52	11,25	13,77	11,59	13,33	12,58	13,87	13,32	14,31	59	14,22
4	SWASTA	3,00	5,05	7,45	9,12	11,54	13,27	11,02	12,14	11,74	12,61	45	10,86
5	LAINNYA	3,11	5,24	3,11	3,81	3,11	3,58	3,12	3,44	3,12	3,35	16	3,78
TOTAL		59,42	100,00	81,69	100,00	86,94	100,00	90,74	100,00	93,08	100,00	412	100,00

Lampiran 10.

**DATA POTENSI PADANG PENGEMBALAN (LAR/SO)
BERDASARKAN NOTA KESEPAHAMAN KABUPATEN SE-PULAU SUMBAWA**

No.	Kabupaten	Kecamatan	Padang Pengembalaan		Kebun HMT	
			Potensi (Ha)	Rencana perluasan (Ha)	Potensi (Ha)	Rencana Perluasan (Ha)
1	Sumbawa Barat		3.253	2.048	539	653
		1. Seteluk	1.257	1.758	173	283
		2. Taliwang	1.510	-	2	5
		3. Brang Rea	162	180	351	360
		4. Jereweh	289	85	13	5
		5. Sekongkang	35	25	-	-
2	Sumbawa		32.989	1.699	14.148	425
		1. Rhee	240	-	6	2
		2. Lape Lopok	1.426	-	12	-
		3. Moyo Hilir	13.097	-	13.097	132
		4. Moyo Utara	1.175	137	3	0
		5. Uthan	1.025	850	250	250
		6. Empang	920	-	160	-
		7. Tarano	685	-	130	-
		8. Plampang	1.455	-	28	-
		9. Labangka	458	202	428	20
		10. Maronge	1.700	-	2	-
		11. Ropang	10.539	460	-	-
		12. Labuan Badas	-	-	2	-
		13. Batu Lanteh	269	50	31	21
3	Dompu		8.126	3.650	1.520	231
		1. Dompu	-	-	124	2
		2. Pajo	330	50	56	2
		3. Hu'u	471	150	108	5
		4. Woja	-	-	55	2
		5. Manggelewa	750	250	514	50
		6. Kempo	1.000	500	85	10
		7. Kilo	580	200	148	10
		8. Pekat	4.995	2.500	430	150
4	Bima		15.589	1.160	805	126
		1. Ambalawi	373	100	1	-
		2. Belo	352	10	10	1
		3. Bolo	-	-	1	-
		4. Donggo	620	50	57	10
		5. Lambu	-	-	1	1
		5. Langgudu	648	-	-	-
		6. Madapangga	-	-	1	-
		7. Monta	-	-	4	1
		8. Sanggar	2.214	500	50	-
		9. Sape	-	-	5	1
		10. Tambora	1.100	500	100	10
		11. Wawo	250	-	10	2
		12. Wera	9.997	-	560	100
		13. Woha	35	-	5	1
		Total	59.957	8.557	17.013	1.435



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 185 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BLUE PRINT NTB BUMI SEJUTA SAPI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan ekonomi pedesaan berbasis sumber daya lokal dan mewujudkan Nusa Tenggara Barat sebagai Bumi Sejuta Sapi perlu menyusun Blue Print sebagai pedoman bagi unsur terkait
- b. dalam upaya meningkatkan populasi dan produktivitas ternak sapi di daerah;
- bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan Blue Print sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Blue Print NTB Bumi Sejuta Sapi Provinsa Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang- undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
5. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KU.410/I/2009 tentang Penetapan Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi NTB;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Tim Penyusunan Blue Print NTB Bumi Sejuta Sapi Provinsa Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :
- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan Blue Print NTB Bumi Sejuta Sapi;
 - b. menyusun dan merumuskan dokumen Blue Print NTB Bumi Sejuta Sapi;
- melakukan asistensi dan konsultasi dokumen Blue Print NTB Bumi Sejuta Sapi dengan instansi/lembaga terkait;
- c. melakukan sosialisasi Blue Print dan langkah-langkah operasional NTB Bumi Sejuta Sapi kepada aparatur terkait, pelaku usaha, organisasi profesi,
 - d. asosiasi dan masyarakat;
- Melaporkan hasil penyusunan Blue Print kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan;
- KETIGA :
- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 yang tersedia di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dari sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Pebruari 2009.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 25 Maret 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pertanian di Jakarta;
3. Dirjen Peternakan Departemen Pertanian di Jakarta;
4. Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian di Jakarta;
5. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
7. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;
8. Kepala Bappeda Provinsi NTB di Mataram;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB di Mataram;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB di Mataram;
11. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 185 TAHUN 2009

TANGGAL : 25 Maret 2009

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pembina	
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Pengarah	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. NTB	Pengarah	
5	Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Pangan	Pengarah	
6	Kepala Bappeda Prov. NTB	Ketua	
7	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB	Wakil Ketua	
8	Dekan Fakultas Peternakan Universitas Mataram	Wakil Ketua	
9	Kepala BPTP Provinsi NTB	Wakil Ketua	
10	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB	Sekretaris I	
11	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.Bappeda Provinsi NTB	Sekretaris II	
12	Prof. Dr. Ir. Soekardono, SU, Bidang Keahlian Sosial Ekonomi Peternakan	Anggota	
13	Prof. Ir.H.Chairussyuhur Arman, MSc.,PhD,Bidang Keahlian Teknologi Reproduksi Ternak	Anggota	
14	Ir. Dahlanuddin, M.Rur.Sc, PhD, Bidang Keahlian Sistem Produksi Ruminansia	Anggota	
15	Dr. Ir. Sudirman, SU, Bidang Keahlian Teknologi Pakan Herbivora.	Anggota	
16	Ir. Tanda Panjaitan, PhD, Bidang Keahlian Nutrisi Ruminansia.	Anggota	
17	Dr. Ir. Ketut Puspadi, Bidang Keahlian Penyuluhan Pembangunan dan Sistem Sosial.	Anggota	
18	Kasubbid Pertanian dan Kelautan pada Bappeda Provinsi NTB.	Anggota	
19	Armin Alamsyah, SPt, Msi, Staf pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB.	Anggota	
20	Setiawan Hijrah Saputra, SPt., Staf pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 314 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI PROGRAM NTB BUMI SEJUTA SAPI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya pelaksanaan Program Nusa Tenggara Barat sebagai Bumi Sejuta Sapi diperlukan rekomendasi oleh pakar/tenaga ahli yang profesional terkait dengan metode dan teknologi yang digunakan;
- b. bahwa untuk kelancaran program sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Tim Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang pembentukan Tim Ahli Program NTB Bumi Sejuta Sapi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang- undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi NTB;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Ahli Program NTB Bumi Sejuta Sapi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyiapkan rencana program kegiatan pelaksanaan Program NTB Bumi Sejuta Sapi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. merumuskan strategi pengembangan Program dan Jaringan Kerjasama dengan Multi Pihak dalam kegiatan pelaksanaan Program NTB Bumi Sejuta Sapi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Program NTB Bumi Sejuta Sapi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 yang tersedia di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dari sumber lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2009.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 23 – 6 – 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

12. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
13. Menteri Pertanian di Jakarta;
14. Dirjen Peternakan Departemen Pertanian di Jakarta;
15. Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian di Jakarta;
16. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian di Jakarta;
17. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
18. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;
19. Kepala Bappeda Provinsi NTB di Mataram;
20. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB di Mataram;
21. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB di Mataram;
22. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 314 TAHUN 2009

TANGGAL : 23 – 6 – 2009

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Prof. Dr. Ir. Soekardono, SU	Tenaga Ahli Bidang Sosial Ekonomi Peternakan	
2	Prof. Ir.H.Chairussyuhur Arman, MSc.,PhD	Tenaga Ahli Bidang Teknologi Reproduksi Ternak	
3	Prof. Ir. Suwardji, MApp.Sc.,PhD.	Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Lahan Kering	
4	Ir. Dahlanuddin, M.Rur.Sc, PhD	Tenaga Ahli Bidang Sistem Produksi Ruminansia	
5	Dr. Ir. Sudirman, SU	Tenaga Ahli Bidang Teknologi Pakan Herbivora	
6	Ir. Tanda Panjaitan, PhD	Tenaga Ahli Bidang Nutrisi Ruminansia	
7	Dr. Ir. Ketut Puspadi	Tenaga Ahli Bidang Penyuluhan Pembangunan dan Sistem Sosial	
8	Dr. Prayitno Basuki, MA	Tenaga Ahli Bidang Ekonomi	
9	Dr. Hirsanuddin, SH.,M.Hum	Tenaga Ahli Bidang Hukum	
10	Ir. Markum, M.Si	Tenaga Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
11	Farid Ma'arif, SIP	Tenaga Ahli Bidang Komunikasi dan Media	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 315 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM PELAKSANA, PELAKSANA TEKNIS DAN PELAKSANA KOORDINASI PROGRAM NTB BUMI SEJUTA SAPI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan masyarakat berbasis sumber daya lokal, Pemerintah Daerah bertekad mewujudkan Nusa Tenggara Barat sebagai Bumi Sejuta Sapi melalui upaya peningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, asosiasi dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk kelancaran Program NTB Bumi Sejuta Sapi sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Koordinasi Program NTB Bumi Sejuta Sapi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Undang- undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 4. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi NTB;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Koordinasi Program NTB Bumi Sejuta Sapi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

TIM PENGARAH

- a. memberikan arahan pelaksanaan Program NTB Bumi Sejuta Sapi agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan ;
- b. menetapkan kebijakan umum Program NTB Bumi Sejuta Sapi;
- c. memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan Program NTB Bumi Sejuta Sapi .

TIM PELAKSANA

- a. menyiapkan dan merumuskan kebijakan strategis, rencana aksi dan langkah-langkah operasional Program NTB Bumi Sejuta Sapi;
- b. melaksanakan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan memfasilitasi kelancaran Program NTB Bumi Sejuta Sapi ;
- c. memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan NTB Bumi Sejuta Sapi ;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

PELAKSANA TEKNIS

- a. membuat Julak, Juknis dan Pelaporan lainnya terkait pelaksanaan Program NTB Bumi Sejuta Sapi ;
- b. monitoring dan mengevaluasi Juklak, Juknis dan Pedoman lainnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pelaksana.

PELAKSANA KOORDINASI

- a. melaksanakan koordinasi Program NTB Bumi Sejuta Sapi antara pemerintah, dunia usaha, asosiasi, dan masyarakat (multi pihak);

- b. melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi Program NTB Bumi Sejuta Sapi dengan Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (P2SDS) tingkat Pusat dan Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 yang tersedia di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dari sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Gubernur NUSA Tenggara Barat Nomor 186 TAHUN 2009 tentang Pembentukan Tim Pelaksana NTB Bumi Sejuta Sapi Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2009.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 23 – 6 – 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pertanian di Jakarta;
3. Dirjen Peternakan Departemen Pertanian di Jakarta;
4. Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian di Jakarta;
5. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
7. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;
8. Kepala Bappeda Provinsi NTB di Mataram;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB di Mataram;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB di Mataram;
11. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

38.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NTB	Anggota	
39.	Kepala Biro Adm. Perekonomian Setda Prov. NTB	Anggota	
40.	Kepala Biro Adm. Kerjasama dan SDA Setda Prov. NTB	Anggota	
41.	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. NTB	Anggota	
42.	Ketua KADIN Prov. NTB	Anggota	
43.	Ketua DPD PEPEHANI Prov. NTB	Anggota	
44.	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Prov. NTB	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI